KESEIMBANGAN HIDUP PERADABAN DAN PERDAMAIAN

BERITA INDONESIA®

Edisi 15/Th.I/ 9 - 22 Juni 2006

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Pak Harto tak lagi mampu mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya.

MENJAWAB DALAM DIAM

بسم الله الرحمن الرحيم

AL - ZAYTUN **BERITA INDONESIA** **Century Bank**

Menyampaikan

Turut Berduka Cita

Atas musibah Gempa yang melanda
Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya

Semoga mereka
yang meninggal
diampuni segala dosanya
dan diterima amal ibadah
oleh Tuhan Yang Maha Esa

Yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin

Sampul:
Eri Irawan
Karikatur:
Dandy Hendrias

Edisi No.15/Th.I/**9-22 JUNI 2006**

DARI REDAKSI 4
SURAT KOMENTAR 5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
BERITA TERDEPAN 12
VISI BERITA 13

BERITA UTAMA
PAK HARTO MENJAWAB DALAM DIAM
Pro-kontra membayangi perkara Pak Harto yang tidak tuntas selama delapan tahun ini. Suara yang menuntutnya untuk diadili lebih galau dari empati mayoritas massa yang diam. Pak Harto sendiri tak lagi mampu mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya 14

"Pemerintah Masih Ragu-ragu" 17
Menanti 'Political Will' Presiden 18
Mengembalikan Kehormatan Bangsa 20
Kontroversi Tak Kunjung Padam 21
Biarkan Keadilan Bicara 22
Selesaikan Tanpa Dendam 24

BERITA HUKUM
Rekomendasi Akibat Buntu 26
Kasus Heli harus Selesai 27

BERITA KHAS
Tanpa Monopoli Bisa 28

LENTERA
KESEIMBANGAN HIDUP PERADABAN DANPERDAMAIAN
Setting pembangunan adalah membangun suatu budaya. Budaya ingin maju, ingin kuat secara individual, masyarakat, dan bangsa, dilandasi oleh budaya dan peradaban yang kokoh masuk ke dalam realisasi pemenuhan kebutuhan hidup 34

BERITA EKONOMI
Bankir Pelat Merah Tak Usah Takut 32
Prospek Ekonomi Dalam Sorotan 33

BERITA OPINI
Dr. Deding Ishak Ibnu Sudja. 39

BERITA NEWSMAKER
Mbah Maridjan 40

BERITA HANKAM
Tantangan di Tengah Minimnya Anggaran 42
Dankormar Resmikan Puslatpur Antralina 43

BERITA NASIONAL
Curhat Mencari Jatidiri Bangsa 44
Prioritaskan RUU Administrasi Pemerintahan 45

BERITA KHUSUS
Duka Nestapa di Yogya 46

BERITA OLAHRAGA
Argentina Incar Gelar Ketiga 49

BERITA POLITIK
"Warning" dari Gedung Juang'45 50

BERITA WAWANCARA
Marwan Batubara 52

BERITA IPTEK
2006, Tahunnya Para Gamers 54

BERITA HUMANIORA
Sebuah Pencerahan Jiwa 56

BERITA MANCANEGARA
Timor Leste Masih Bergolak 58

BERITA DAERAH
Bandung "Kota Sampah" 59

BERITA FEATURE
Tambora Mengguncang Jagad 60

BERITA MEDIA
Semua Tergantung Soeharto 62

BERITA KESEHATAN
Virus Maut Ancam Penjara 63

BERITA PEREMPUAN
Persembahan Kaum Hawa 64

BERITA BUDAYA
Musim Salak Telah Berlalu 65

BERITA TOKOH
Widi Agoes Pratikto 30

BERITA INDONESIA

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto
Anis Fuadi

Redaktur Pelaksana:
Anna Fauzia Diponegoro
Mangatur Lorielcide Paniroy (Website)

Sekretaris Redaksi
Retno Handayani

Kepala Litbang dan Pusat Data:
Suryo Pranoto

Staf Redaksi:
Haposan Tampubolon
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Henry Maruasas
Christian Natamado
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorielcide Paniroy

Desainer:
Eri Irawan, Esero Design

Biro Redaksi:
Medan: H. M. Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, **Purwakarta:** Benhard Sihite, **Tarakan:** Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT Citraprinsip Publisitas Indoadprint

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/ Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorielcide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana *Berita Indonesia* seusai wawancara dengan mantan Hakim Agung, Bismar Siregar, di kediamannya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera

Pembaca yang budiman,

Negeri ini kembali diguncang duka dengan musibah bencana alam yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter yang terjadi pukul 5.30, pada Sabtu, 27 Mei menewaskan hampir 6.000 jiwa dan ribuan korban luka-luka, memporak-porandakan sekitar 40.000 lebih bangunan. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi musibah ini.

Sajian Berita Utama edisi kali ini mengangkat berita mantan Presiden Soeharto yang hingga kini masih diributkan beberapa kalangan. Sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas semakin memunculkan berbagai perdebatan. Di saat kesehatannya mulai menurun, beberapa pihak mendesak agar dia segera diadili. Sementara itu, pihak lain mempertanyakan layakkah Soeharto diadili di tengah kesehatan yang memburuk dan usia yang semakin lanjut. Mungkin benar, banyak kesalahan sudah dilakukannya selama ia berkuasa 30 tahun. Tapi, jasanya selama itu *toh* juga tidak sedikit. Tak mampukah negeri ini memaafkannya?

Mantan Hakim Mahkamah Agung, Bismar Siregar mengatakan, mengadili Soeharto sekarang ini, hukumnya haram. Karena usia beliau sudah 80 tahun lebih. "Allah telah menjadikan usia 80 tahun, seperti anak-anak, yang tidak berdosa. Apakah kita akan melawan kehendak Allah?" komentarnya.

Berbagai berita lainnya kami sajikan untuk Anda diantaranya peringatan 61 tahun Hari Lahir Pancasila (1 Juni 1945-1 Juni 2006) yang diadakan di Jakarta Convention Center (1/6). Dalam kesempatan itu, Presiden SBY memberikan pandangannya tentang Pancasila.

Selamat membaca dan menikmati sajian kami.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http://www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A
  Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
  Telp. (021) 70930474, 8293113
  (021) 83701736
  Fax. (021) 8293113, 9101871

Meneladani Sikap Nabi

Akhir-akhir ini tuntutan agar Presiden RI ke-2, Bapak H. M. Soeharto diadili, makin menggema. Ada gejala apa ini? Apakah ini cermin masyarakat yang frustasi akibat kemiskinan, terlilit hutang, dan rendahnya moral? Saya menghimbau, mari kita merenungkan kembali, apakah sikap-sikap yang ditunjukkan itu, seperti yang pernah dicontohkan orang nomor satu dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, seperti yang ditulis Michael Hart, yakni Nabi Muhammad SAW.

Muhammad adalah seorang yang berjiwa besar, tatkala menaklukkan kota Mekkah tanpa pertumpahan darah, dengan memaafkan Abu Sofyan yang pernah menyebabkan putrinya jatuh dari untanya hingga menemui ajal. Dia pun tetap menjaga dan menghormati lawan yang baru saja tunduk di hadapannya, lengser dari kekuasaan, dengan menyerukan pada penduduk Mekkah, bahwa siapapun yang menyarungkan pedangnya, tinggal di rumah masing-masing atau berlindung masuk ke rumah Abu Sofyan, akan dijamin keamanannya.

Alangkah indahnya, bila kita bisa meneladani sikap-sikap terpuji dari Nabi. Para penguasa sekarang, sedikit atau banyak, adalah produk dari Orde Baru. Ketukkanlah palu keadilan bagi diri Anda sendiri, sebelum memvonis orang lain. Jujurlah, apa yang sebenarnya Anda cari, atau motif apa yang menyelinap dalam lubuk hati Anda? Cobalah pikir dan bayangkan, bagaimana bila persoalan itu menimpa Anda? Anda yang sekarang memangku jabatan, telah merasa berbuat baik, tapi begitu lengser, Anda 'diadili' di zaman yang berbeda, dengan cara-cara yang kurang manusiawi. Padahal Anda sudah mulai insyaf dari beberapa kesalahan yang mungkin pernah diperbuat, memasuki hari tua, dan bercita-cita agar meninggal dalam keadaan khusnul khotimah.

Sekali lagi saya berharap semoga tidak ada tendensi tertentu, atau maksud-maksud terselubung yang berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, di balik penuntutan terhadap 'pengadilan' Soeharto.

Nanik R. S. Yosep
Sukoharjo, Jawa Tengah

Turut Berduka Bersama Korban Gemba

Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada semua saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Yogyakarta. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah yang terjadi ini. Semoga bantuan yang dibutuhkan oleh para korban yang masih hidup dapat diterima semaksimal mungkin oleh para korban tersebut.

Christiena v.d.Braak,
christiena263@msn.com

Seruan Anak Korban Gempa

Aku anak SMP kelas 3, tinggal di daerah Plered yang sudah kena gempa besar kemarin. Semua bangunan rusak. Tapi kenapa sih yang dikasih bantuan cuma yang parah. Yang lain kan juga butuh makan walaupun nggak sakit. Kalo lihat berita di TV bantuan datang dari berbagai penjuru. Tapi kenapa distribusinya nggak sampai ke desa saya? Kalo mendengarkan tetangga yang mengeluh, saya ikut kasihan walaupun saya dan keluargaku juga seperti itu. Trus kenapa di jalan-jalan banyak tentara mondar-mandir naik truk nggak berhenti ngasih bantuan. Saran dan permohonan saya, mbok bantuan tu diratakan biar adil. Cepetan dikirim soalnya makanan yang didapat minim sekali. Mohon

BUNG WARTO

diperhatikan dan segera ditindak lanjuti. Oh iya, kami juga butuh tenda. Kalo bisa yang anti air, masalahnya sekarang tiap malem pasti hujan. Kalo nggak ada tenda, apa kek, yang bisa buat berteduh tapi anti air. Daripada banyak yang masuk angin, ntar rumah sakit yang dah penuh pasien tambah repot. Pokoknya kirimkan apa yang bisa dikirim.

Puji,
poejhie_smart@plasa.com

Majalah BI Sarat Informasi

Alhamdulillah, majalah ini banyak memberikan informasi dari Iptek hingga Imtaq. Informasi yang disampaikan sangat bermanfaat dan juga memiliki informasi yang terkini dan terbuka. Semoga semakin maju, jangan sampai pernah memikirkan tanggapan yang miring karena sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui! Dengan kebenaran yang termaktub dalam Al-Qur'an.

Ali Ahmad,
hamdan_49_ali@yahoo.co.id

Hasil Survei LSI

Publikasi LSI tentang indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan SBY telah memancing komentar berbagai pihak. LSI sebagai lembaga survei independen memang telah menunjukkan kredibilitasnya, antara lain dengan perhitungan cepat hasil Pemilu dan Pilkada di beberapa daerah yang telah teruji keakuratannya. Sebagai lembaga survei independen memang LSI hanya melihat fakta, dan tidak yang lain-lainnya. Begitu juga halnya dengan publikasi terakhir tentang indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY, harus diterima dengan segala kebesaran hati. Namun menurut saya harus ada pihak lain yang menjelaskan dari aspek sosiologi, ataupun psikologi massa misalnya, bahwa kepuasan yang berkaitan kinerja ekonomi, kesejahteraan masyarakat, selalu cenderung bernilai "kurang". Bahkan untuk sepuluh tahun mendatang, bagaimanapun kondisinya. Saya bukannya membela pemerintahan SBY. Saya kira memang Bung Denny JA yang saya kagumi itu tidak perlu bicara apa-apa selain fakta.

Marijo,
bmarijo@yahoo.com

Demonstrasi Harus Beri Solusi

Bila kita cermati berbagai demonstrasi di Indonesia, kita akan menemukan bahwa terdapat banyak demonstrasi, pawai, aksi rakyat yang membawa topik yang kurang krusial bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mengapa bangsa kita hanya melulu mempermasalahkan RUU APP yang menjadi ruang privat, sedangkan banyak kepentingan rakyat yang mendesak kurang mendapat perhatian. Bagaimana bila kita seyogianya mengangkat isu kekerasan domestik, penjualan anak dan wanita, perbaikan fasilitas kota, pemberantasan korupsi atau pun penghentian perusakan alam? Tentu akan lebih menyentuh relung hidup bangsa ini. Dalam demonstrasi pun sebaiknya pula perlu ditekankan solusi apa yang bisa diambil. Tidak hanya memaki, mengecam dan menghujat tanpa makna. Semakin bangsa kita terpuruk mengurusi persoalan tidak esensial, maka kita akan semakin tertinggal dengan negara lain, bahkan negara tetangga. Mari mengedepankan solusi dan bukan hanya teriak-teriak tanpa tindakan.

Aloysius Heriyanto,
denriyan@gmail.com

Indonesia Negara Hukum

Membaca berita mengenai penangkapan 21 anggota FPI, membuat saya kembali menaruh harapan kepada aparat kita. Negara kita adalah negara hukum dan tidak ada satu orang pun atau organisasi apapun yang berhak untuk melakukan *sweeping* ataupun hal hal lain yang mengandalkan kelompoknya untuk membenarkan tindakan mereka. Kalau kita perhatikan, mereka hanya berani melakukan *sweeping* secara bergerombol. Oleh karenanya keputusan tegas polisi untuk menangkap mereka semoga tidak berhenti sampai di situ. Karena jika orang-orang ini tidak ditindak sesuai hukum maka mereka pasti akan memandang rendah aparat dan hukum yang berlaku.

Esty Hari,
esty@cavitkealy.com

Pejabat Laporkan Kekayaan

Sebagai pejabat negara seharusnya memberikan contoh yang baik dengan melaporkan kekayaannya. Apakah mereka sedang sibuk mengamankan kekayaannya yang didapat dengan cara tidak semestinya. Kalau memang didapat secara jujur, laporkan saja nggak usah takut kan kalau kekayaannya akan diperiksa oleh yang berwenang. Beri contoh yang baik jangan karena punya jabatan dan kekuasaan terus sesuka hati. Sebaiknya beri mereka *deadline.*

Bambang Soetedjo,
bam.soetedjo@hccnet.nl

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN: Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 Fax.(021) 8293113, 9101871

17/05/2006

The Da Vinci Code Buka Festival Film Cannes

Pemutaran film The Da Vinci Dode secara resmi menandai dibukanya Festival Film Cannes ke-59 yang berlangsung hingga 28 Mei. Film yang dibuat berdasarkan novel dengan judul sama karya penulis Dan Brown ini memuat kontroversi yang menceritakan Yesus sempat memiliki anak dari Maria Magdalena. Film yang disutradarai Ron Howard ini memasang sejumlah bintang terkenal, antara lain Tom Hanks (memerankan Robert Langdon, profesor di bidang simbologi dari Universitas Harvard) dan bintang Prancis yang melejit lewat film Amelie, Audrey Tautou.

Namun, sayangnya, film yang berdurasi 2 jam 32 menit itu tidak sedahsyat novelnya, meskipun teka-teki dan ketegangan masih tersaji di sana. Bahkan, usai pemutarannya, 2.000 penonton malah mencemooh. Film itu dinilai kritikus film Cannes berlebihan dan terlalu banyak musik. "Film ini terlalu berlebihan, terlalu banyak musik dan terlalu luhur," kata Peter Brunetem, kritikus pada harian The Boston Globe.

18/05/2006

Barcelona Juara Liga Champion

Gol Samuel Eto'o dan Juliano Belletti membuat Arsenal harus mengubur impiannya. Kedua gol yang terjadi hanya selang lima menit itu, telah membawa kemenangan Barcelona menjadi juara Liga Champion untuk kedua kalinya dengan menundukkan Arsenal 2-1. Eto'o membuat gol balasan di menit ke-76, setelah sebelumnya sejak menit ke-37 Arsenal unggul 1-0 lewat sundulan kepala Sol Campbell yang menyambut tendangan bebas Thierry Henry.

Kedudukan 1-1 ini hanya bertahan selama lima menit, karena di menit ke-81 Barca membuat gol kemenangannya lewat Belleti. Dengan kemenangan ini, Barcelona berhasil mewujudkan impiannya untuk kembali menjadi juara Liga Champion sejak terakhir kalinya bisa memeluk piala itu di tahun 1992. Selain itu, dengan hasil tersebut, Spanyol menjadi negara yang paling sering memenangkan Liga Champion dengan total juara 11 kali, Real Madrid sembilan kali dan Barcelona dua kali.

Rupiah Kembali Melemah

Ibarat yoyo, nilai tukar rupiah dan harga saham terus naik turun dengan tajam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) ditutup pada level 1.400,85 atau melemah 61,31 poin. Aksi jual saham besar-besaran di BEJ akhirnya memicu rupiah kembali melemah. Rupiah ditutup pada posisi 9.185 per dolar AS, melemah 275 poin bila dibandingkan dengan penutupan sehari sebelumnya. Rupiah bahkan sempat terpuruk di level 9.328 per dolar AS. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi Sarwono, kurs rupiah itu melemah akibat harapan para investor akan naiknya suku bunga The Fed yang lebih tinggi. Ekspektasi itu didasari pengumuman laju inflasi di AS yang lebih tinggi daripada perkiraan semula.

19/05/2006

Presiden SBY Jenguk Soeharto

Presiden bersama Ny. Ani Yudhoyono menjenguk mantan Presiden Soeharto yang masih dirawat di RSPP, Jakarta. Dalam kunjungan sekitar 20 menit itu, SBY didampingi Seskab Sudi Silalahi dan Jurubicara Kepresidenan Andi Malarangeng. Presiden mengharapkan pengobatan atas Soeharto dilakukan sebaik-baiknya. Presiden juga menyatakan, kedatangannya merupakan wujud misi kemanusiaan dan persaudaraan di antara sesama warga bangsa. "Termasuk kita dengan para mantan pemimpin kita," ujarnya.

20/05/2006

Sarasehan Kebangkitan Nasional

Mantan Ketua MPR Amien Rais ber-

KarikaturBerita

sama sejumlah tokoh nasional seperti Kwik Kian Gie, Alvin Lie, Rosihan Anwar dan budayawan Emha Ainun Nadjib menghadiri acara sarasehan nasinal dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Joang 45, Jakarta.

Dalam pertemuan itu mereka menilai pemerintahan SBY sudah tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat banyak terutama dalam mengelola aset-aset negara dan sumberdaya alam seperti penjualan aset negara, eksplorasi dan eksploitasi energi. Diakhir acara sarasehan, Amien meminta agar SBY, jajaran pemerintah dan BIN tidak menginterprestasikan macam-macam hasil pertemuan tersebut.

21/05/2006

Terdakwa Suap Meninggal di RS Polri

Salah seorang terdakwa kasus penyuapan yang melibatkan pegawai Mahkamah Agung, Sudi Ahmad, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta. Meninggalnya terdakwa itu mengakibatkan perkara yang tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pun gugur.

Menurut Muhibuddin, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP. Karena itulah, segala dakwaan dan tuntutan atas diri terdakwa itu tak diteruskan lagi. Sesuai visum dokter, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak, menjelaskan Sudi Ahmad meninggal dunia karena penyakit hernia yang sudah lama dideritanya. Pada Jumat (19/5) sekitar pukul 18.00 WIB, Sudi dibawa dari Rutan Polda Metro Jaya ke RS Polri Dr Soekamto, di Kramat Jati, Jakarta Timur. Tumpak mengatakan, pihak keluarga Sudi sudah mendampingi selama perawatan, sampai akhirnya meninggal pada Minggu malam sekitar pukul 24.00 WIB.

22/05/2006

Sebanyak 66.000 PNS Bergaji Dobel

Sebanyak 66.000 PNS mendapat gaji dobel. Selain itu, 341.000 PNS lainnya berstatus tidak jelas meski gaji mereka setiap bulan tetap dibayarkan. Kerugian negara sedikitnya mencapai Rp 227 miliar setiap bulan. "Kita akan proses secara hukum PNS yang ternyata selama ini menerima gaji ganda karena merugikan keuangan negara," ujar Meneg PAN Taufik Effendi di sela-sela acara peresmian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Deputi Informasi Kepegawaian BKN Masni Rani Mochtar mengatakan, selama ini negara membayarkan gaji kepada empat juta PNS, namun ternyata jumlah PNS yang terdaftar hanya 3,7 juta orang.

23/05/2006

Timor Leste Bergejolak?

Kerusuhan kembali melanda ibu kota Timor Leste, Dili, sejak Senin hingga Selasa (23/5). Baku tembak terjadi antara kelompok mantan tentara yang dipecat dan tentara pemerintah, menyebabkan sedikitnya satu tentara pemerintah tewas dan tujuh lainnya luka-luka.

Pemerintah Australia dan Selandia Baru segera mengirimkan tentara ke Timor Leste guna membantu pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Mari Al-katiri dan Presiden Xanana Gusmao dalam menangani aksi kekerasan para mantan tentara yang marah karena dipecat itu.

Tembak-menembak terdengar di pinggiran Dili, khususnya dari perbukitan di wilayah itu, tempat para mantan tentara membangun kamp-kamp sementara. Para mantan tentara yang berjumlah sepertiga dari tentara Timor Leste mengancam akan melakukan perang gerilya jika pemerintah dan komandan militer menolak mengangkat mereka kembali.

Gus Dur Diusir, Ratusan Massa Demo

Dialog Lintas Etnis dan Agama yang menghadirkan K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) nyaris berbuntut kerusuhan menyusul keluarnya pernyataan dari Gus Dur yang dianggap telah melukai Front Pembela Islam (FPI) Purwakarta. Gus Dur menuding ormas Islam, seperti FPI dalam setiap aksinya selalu ada yang mendanai dan FPI itu bikinan jenderal-jenderal yang berebut pangkat seperti Nugroho Jayusman, Wiranto dan Brigjen Kivlan Zen. Melihat keadaan yang tidak memungkin-

KarikaturBerita

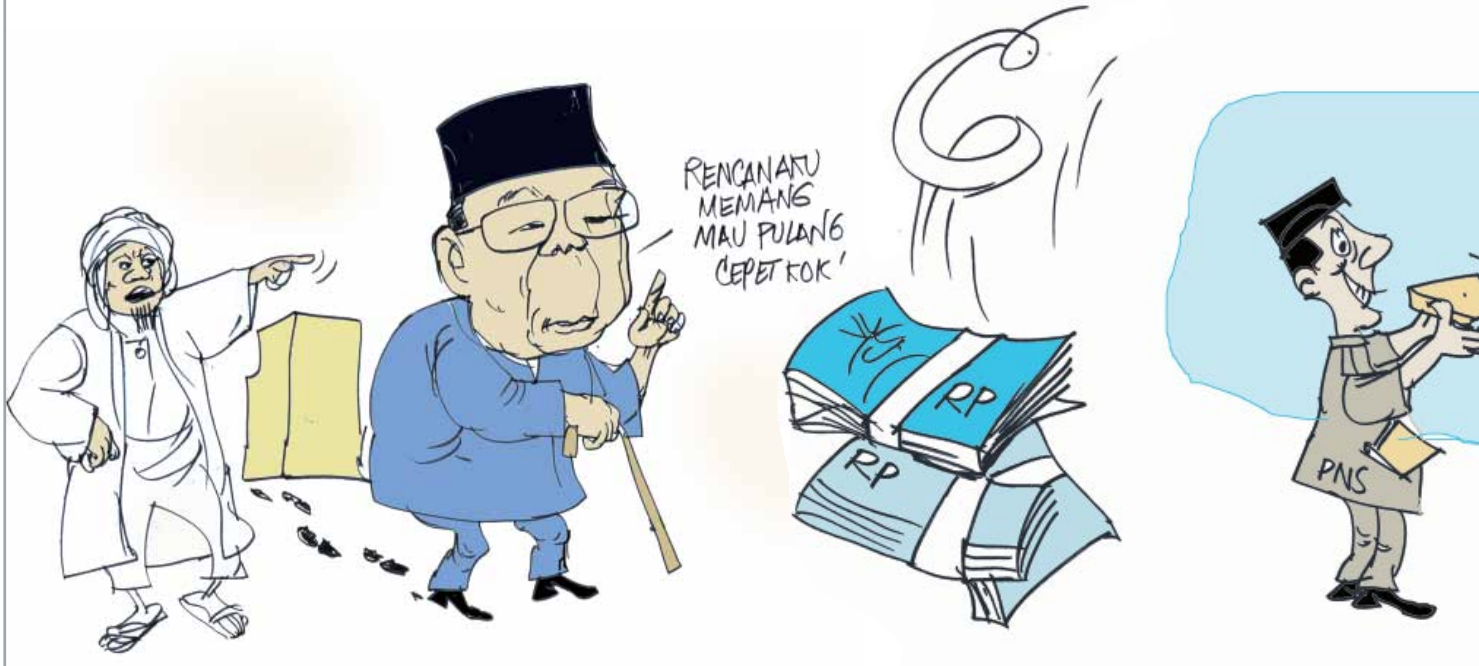

kan lagi, Gus Dur segera diamankan. Akibatnya, Jumat 26 Mei sejumlah massa pendukung Gus Dur dari Garda Bangsa mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan FPI, mereka tidak menerima pengusiran yang dilakukan terhadap Gus Dur.

Sebaliknya FPI melalui pimpinannya Habib Rizieq melaporkan balik Gus Dur dengan tuduhan mencemarkan agama melalui pernyataannya di media massa yang menyebutkan Alquran sebagai kitab suci yang paling porno.

Namun Sabtu 27 Mei, Gus Dur membantah dirinya diusir oleh ormas-ormas Islam tersebut. Menurutnya yang terjadi hanya kesalahpahaman saja. "Siapa yang diusir, saya dari awal sudah bilang sama panitia bahwa saya tidak bisa mengikuti acara sampai habis. Begitu selesai berbicara, tanya jawab saya langsung pulang. Jadi bukan pengusiran," cetus Gus Dur. Hal itu disampaikannya dalam acara bincang-bincang di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta Timur.

24/05/2006

Sejuta Pemilik NPWP Tak Bayar

Lebih dari sejuta pemilik nomor pokok wajib pajak atau NPWP hingga saat ini tidak pernah mengisi surat pemberitahuan pajak. "Kami belum tahu berapa besar potensinya karena mengisi surat pemberitahuan saja tidak pernah. Setelah kami cek, ternyata jumlahnya lebih dari satu juta," kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution seusai menghadiri pelantikan 11 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (24/5). Menurut dia, pada umumnya, pemilik NPWP yang belum membayar pajak tersebut adalah wajib pajak perorangan, bukan dari wajib pajak badan atau perusahaan. Hingga saat ini, Ditjen Pajak mengklaim jumlah penduduk yang telah memiliki NPWP sebanyak 10 juta orang.

Akan tetapi, belakangan ini jumlah itu diperkirakan akan menyusut karena terdapat berbagai kesalahan informasi dan identitas dalam NPWP itu. Dengan demikian mengharuskan adanya penarikan kartu NPWP yang sudah dibagikan. Target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2006 sebesar Rp 362,8 triliun. Target penerimaan terbesar dibebankan pada PPh nonmigas yang ditetapkan sebesar Rp 173,2 triliun.

25/05/2006

Ruyandi Hutasoit Tetap Pimpin PDS

Ruyandi Hutasoit tetap memimpin Partai Damai Sejahtera (PDS) hingga lima tahun ke depan bersama Apri Sukandar setelah memenangkan pemilihan dalam Musyawarah Nasional (Munas) I partai tersebut di Jakarta. Pasangan Ruyandi-Apri mengalahkan pasangan Jhony Lumintang-Ben Sitompul dengan meraih 284 dari 442 suara. Johny-Ben hanya memperoleh 157 suara.

Proses pemilihan berlangsung satu putaran karena hanya diikuti dua pasang calon. Semula ada empat pasang, yakni Ruyandi-Denny Tewu, Johny-Ben, Constan Ponggawa-Sahat Sinaga, Apri-Richard Pasaribu. Namun, empat pasang ini mengerucut menjadi dua pasang dengan perubahan pasangan yang mengejutkan karena Ruyandi justru menggaet Apri Sukandar.

26/05/2006

Rp 134 Miliar untuk Tangani Flu Burung

Melihat semakin banyaknya korban flu burung yang berjatuhan, pemerintah akhirnya mengalokasikan Rp 134 miliar untuk menangani flu burung. Dana itu terdiri dari Rp 6 miliar untuk urusan kesekretariatan, pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kapasitas. Sebanyak Rp 3 miliar digunakan untuk penanganan jangka pendek termasuk penanganan kasus di Karo, Sumatera Utara. Dana Rp 125 miliar lainnya kini tengah diajukan kepada Menteri Keuangan untuk memenuhi kebutuhan peralatan maupun obat-obatan di seluruh Indonesia.

Dana itu di bawah koordinasi Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemik Influenza (Komnas FBPI). Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan hal itu selepas memimpin rapat Komnas FBPI, Jumat (26/5). Seperti diketahui, selama Juli-18 Mei 2006 di Indonesia terjadi 43 kasus flu burung, dengan 33 orang di antaranya meninggal, atau tingkat kematian men-

capai 76,7 persen. Dari 33 provinsi yang ada, sebanyak 27 provinsi telah terjangkiti penyakit ini.

27/05/2006

Gempa Guncang Yogya

Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter, pukul 05.53 WIB mengguncang D.I. Yogyakarta dan sekitarnya. Bencana gempa ini meluluhlantakkan rumah penduduk, bangunan, infrastruktur dan memutuskan jaringan telekomunikasi. Sampai hari kelima (31/5), korban tewas mencapai 5.846 orang.

Dengan rincian Kabupaten Bantul 3.580 orang, Sleman 326 orang, Gunungkidul 69 orang, Kota Yogyakarta 165 orang, Kulon Progo 26 orang, Klaten 1.668 orang, Boyolali 3 orang, Magelang 3 orang Purworejo 5 orang dan Sukoharjo satu orang. Sedangkan korban yang luka berat 17.515 orang dan luka ringan 5.216 orang. Gempa ini mengakibatkan 48.873 rumah penduduk rusak total dan nyaris rata dengan tanah serta 56.559 rumah lainnya mengalami kerusakan. Begitu pula 36 bangunan rumah ibadah, 23 unit sekolah dan 31 bangunan milik pemerintah.

Selain rumah penduduk, beberapa situs juga mengalami kerusakan. Seperti Bangsal Traju Mas di Kraton atapnya roboh, Taman Sari yang pernah direhab dindingnya retak-retak. Demikian pula Candi Brahma di kompleks Candi Prambanan, Klaten mengalami kerusakan serius. Presiden SBY selama beberapa hari memindahkan kegiatannya dari Istana Kepresidenan di Jakarta ke Gedung Agung Yogyakarta dalam menjalankan tugas kenegaraan termasuk menangani para korban gempa. Hari Rabu (31/5) Presiden kembali ke Jakarta dan penanganan pasca gempa selanjutnya dilakukan Wapres Jusuf Kalla yang akan berkantor di Gedung Agung. Presiden menyatakan penanganan tanggap darurat sudah lebih efektif dan semua sistem telah berjalan.

Menlu Palestina Galang Bantuan

Kesulitan ekonomi yang melilit Palestina akibat embargo ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kalangan DPR/MPR. SBY berjanji mengirimkan makanan dan obat-obatan, sedangkan pejabat legislatif langsung menyerahkan bantuan uang tunai.

Sumbangan hasil penggalangan oleh Komite Nasional untuk Rakyat Pelestina (KNRP) yang digagas PKS itu, diserahkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada Menteri Luar Negeri Palestina Mahmoud Al Zahar di gedung MPR/DPR, Jakarta. Nilainya mencapai USD 90 ribu (Rp 837 juta) dan diserahkan secara tunai.

"Meski Indonesia masih bermasalah, yang dihadapi Palestina lebih berat. Karena itu, sudah sepantasnya sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar, kita membantu," kata Hidayat yang didamping AM Fatwa dan Ketua KNRP Suripto di Gedung MPR/DPR. Selain bantuan dana, kalangan legislatif juga akan membentuk Kaukus Parlemen untuk Rakyat Palestina (KPRP). "Kaukus ini semacam kelompok kerja di DPR, yang *concern* terhadap masalah Palestina," ujar Ketua DPR Agung Laksono usai pertemuan dengan Mahmoud Al Zahar.

Sjahrir Ketua Umum PIB 2006-2011

Presiden SBY mengingatkan semua pihak kepada ikrar bersama bangsa ini terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok mana pun diminta tidak memaksakan kehendak dan merusak kaidah hukum. "Saya kira kita semua setuju bahwa konsensus dasar kita, yang telah menjadi dasar negara, yang mesti kita pertahankan, kita lestarikan dan kita aktualisasikan sepanjang masa adalah Pancasila," ujarnya di depan peserta Kongres I Partai Indonesia Baru (PIB) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Selain Pancasila, konsensus dasar lain yang menjadi modal pembangunan bangsa adalah UUD 1945, NKRI dan ikrar Bhinneka Tunggal Ika. Kongres I PIB yang dihadiri sekitar 600 peserta dari 30 pimpinan daerah dan 180 pimpinan cabang ini dengan suara bulat memilih kembali Sjahrir sebagai ketua umum untuk masa jabatan 2006-2011.

28/05/2006

Marinir AS Tutupi Kasus Haditha

Anggota parlemen Amerika Serikat

KarikaturBerita

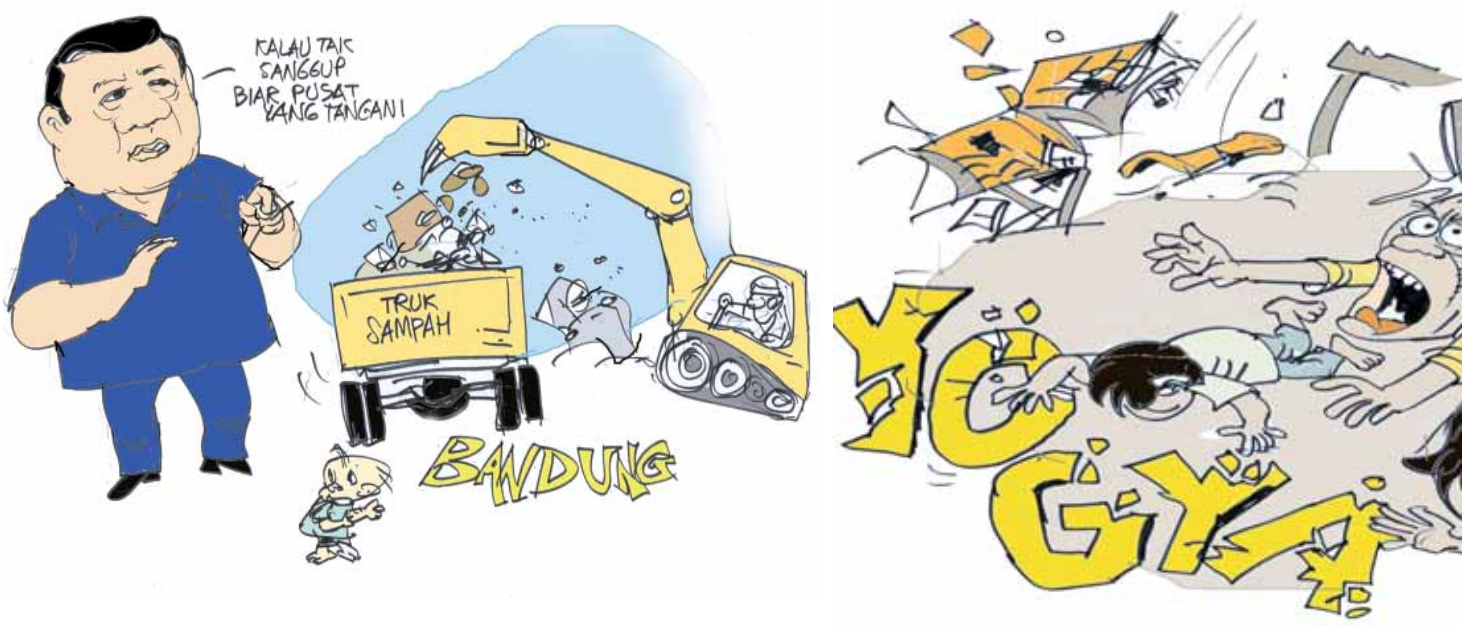

menuduh Marinir AS mencoba menutup-nutupi peristiwa pembantaian 24 warga sipil tidak bersenjata di kota Haditha, Irak, November lalu. Parlemen berjanji akan menggelar penyidikan di tingkat Kongres atas kasus ini. Tuduhan bahwa marinir AS menembak mati warga sipil Irak mendorong keprihatinan yang luas di AS.

Sebelumnya, AS telah tersudut akibat skandal penyiksaan terhadap para tahanan di penjara Abu Ghraib, Irak. "Ini (pembantaian Haditha) lebih buruk dari (skandal) Abu Ghraib," kata anggota Kongres John Murtha dari Partai Demokrat Pennsylvinia, Minggu (28/5). Peristiwa Haditha terjadi pada 19 November 2005.

Pembantaian dipicu oleh ledakan bom jalanan yang menewaskan seorang anggota marinir. Setelah ledakan bom, anggota marinir AS menembak dan membunuh warga sipil yang tak bersenjata yang sedang berada di dalam taksi di sekitar lokasi ledakan.

29/05/2006

RI Pastikan Bayar 50% Utang ke IMF

Indonesia memastikan akan membayar utang kepada Dana Moneter Internasional sekitar US$ 3,9 miliar pada semester pertama tahun ini atau 50% dari total utang US$ 7,8 miliar. Sisanya ditargetkan lunas awal 2007. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan untuk membayar utang kepada IMF dalam dua tahun secara bertahap. IMF pun mendukung rencana percepatan pembayaran utang ini, namun masih ada masalah administrasi yang belum selesai. Deputi Gubernur BI Aslim Tadjuddin menambahkan, percepatan pembayaran utang itu akan memberikan hal yang positif kepada investor internasional. "Itu kan sebagai *balance of payment support*. Kami telah menghitungnya," katanya.

30/05/2006

MUI Haramkan SMS Berhadiah

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II menyatakan, SMS berhadiah yang kini marak, hukumnya haram. Kegiatan itu dianggap telah mengandung unsur-unsur judi. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah menertibkannya.

Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, memaparkan, definisi SMS berhadiah yang dinyatakan haram itu adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai dengan janji pemberian hadiah. Dijelaskannya, SMS berhadiah mengandung judi karena mengundi nasib yang menyebabkan konsumen memperoleh hadiah besar dengan cara yang mudah.

Selain itu, kata Ma'aruf, mengandung tabdzir, sebab cenderung membentuk perilaku mubazir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram. "SMS berhadiah juga sudah mengandung gharar, yakni tergolong permainan tak jelas dan bersifat mengelabui," kata dia, saat memaparkan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II yang berlangsung 25-27 Mei lalu di Ponpes Gontor Ponorogo. Ma'ruf mengingatkan, SMS berhadiah lebih untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya (kapitalisme) bagi produsen atau penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah.

31/05/2006

Soeharto Sudah Pulang, Tetapi Tetap Diawasi

Setelah dirawat selama 27 hari dan sempat menjalani operasi pemotongan usus sepanjang 40 sentimeter, mantan Presiden Soeharto diizinkan meninggalkan rumah sakit. Kondisi kesehatannya dinilai makin membaik dan ia telah kembali ke rumah. Namun, para dokter tetap akan mengawasi perkembangan kondisi Soeharto.

"Beliau masih memakai pengaman, yaitu selang yang ada di dalam perut Pak Harto belum dilepas," kata koordinator tim dokter spesialis dari Tim Dokter Kepresidenan, Prof Djoko Rahardjo, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Tim medis baik dari RSPP maupun Tim Dokter Kepresidenan serta keluarga Soeharto sepakat perawatan atas diri mantan Presiden itu dapat dialihkan ke rumah pribadi Soeharto di kawasan Jl. Cendana, Jakarta.

Maut Menjelang Subuh

Maut tak mengenai waktu dan tempat. Datangnya tak bisa diramalkan. Itulah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Terbungkus rok dan blus yang masih utuh, jasad gadis usia 10 tahun, sebut saja bernama Indah, ditarik keluar dari reruntuhan rumahnya. Jasadnya terbujur kaku, rambut kusut sebatas bahu masih berlumur debu. Sebelum dibungkus kain panjang, ayahnya meminta agar jasad putrinya ditidurkan di atas tanah. Sang ayah menangisi putrinya yang sudah tidak bernyawa, mencium keningnya sampai para penyelamat meminta untuk merelakan putrinya pergi. Sang ayah hanya bisa memandang kosong ke arah jenazah putrinya yang dibawa para penyelamat untuk dimakamkan.

Sebelum gempa maut menjemput dinihari Sabtu (27/5), Sri Mulyani masih menyusui bayinya, Jangkung, usia lima hari, di rumahnya di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Sri tewas tertimbun selama enam jam oleh reruntuhan bangunan rumahnya. Jangkung yang ada di pangkuannya selamat. Ketika dia meregang nyawa kemungkinan bayinya terlepas dari dekapannya, terlepas ke lantai, dan selamat.

Ada semacam isyarat dari Jangkung sebelum maut merenggut nyawa Mulyani (27). Jangkung, tidak seperti biasanya, rewel terus menerus sejak Jum'at. Kakak almarhumah, Sri Lestari, berkata, "Bisa jadi rewelnya Jangkung sebagai satu pertanda." Mulyani tewas di atas tempat tidur yang beralaskan tikar. Kemungkinan dia tertimpa runtuhan dinding dan atap. Jasadnya yang kaku berada dalam posisi merangkul dan melindungi bayinya. Sedangkan rumahnya rata dengan tanah.

Jangkung diketemukan warga masih bernafas di antara timbunan reruntuhan. Bayi mungil itu tidak menangis. Namun Jangkung menangis kencang setelah wajahnya diolesi air.

Sekujur tubuh ibu muda itu berlumur darah yang keluar dari luka-luka di kepala, wajah dan tubuh. Lenang Trisujono, ayah Jangkung selamat karena ketika gempa terjadi dia berada di luar rumah, sedang mencuci popok bayinya. Dalam guncangan yang terjadi begitu cepat dan dahsyat, Lenang berlari menuju rumahnya untuk menyelamatkan istri dan bayinya. Apa daya, dia sendiri terluka kena bangunan rumahnya yang sedang runtuh. Lenang mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan istri dan bayinya. Enam jam kemudian dia mendapatkan istrinya mati terduduk, tetapi bayinya selamat.

Tragedi yang menimpa Indah dan Mulyani hanya sebagian kecil episode maut gempa bumi tektonik yang merenggut nyawa lima ribuan orang lebih. Gempa yang berkekuatan 5,9 Skala Richter itu

memporak-poranda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, dinihari Sabtu (27/5). Banyak anak dan orang tua yang tidak mampu menyelamatkan diri, terkubur di dalam reruntuhan rumah. Mereka yang terjaga dari tidur lantaran guncangan gempa, berlari meninggalkan rumah untuk mencari tempat-tempat yang lebih aman. Mereka hanya membawa barang seadanya, terdampar di tenda-tenda pengungsian.

Namun di tengah tragedi tersebut masih ada yang bisa bergembira. Di sela kesibukan evakuasi dan erangan korban yang menderita luka parah, sepasang warga Desa Manggeng, Kecamatan Jetis, Bantul, Agus Pribadi (25) dan Istiani (22) datang ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan. Pasangan tersebut, diantar oleh ayah pengantin wanita, seorang warga dan beberapa petugas SAR menuju KUA. Pasangan itu mendapat perhatian para pengungsi yang bernaung di tenda-tenda darurat di dekat KUA. Mereka pun ikut jadi penonton upacara akad nikah tersebut. Pengantin pria mengatakan pernikahan hari itu sudah direncanakan tiga bulan lalu. Ayah pengantin wanita, Mulyono hanya bisa meneteskan air mata, karena putrinya menikah dalam suasana duka.

Sebenarnya pasangan tersebut menetap di Batam, pulang kampung untuk melangsungkan pernikahan. Mereka tiba di Desa Manggeng Jum'at, sedangkan gempa terjadi Sabtu dinihari. Rumah kedua mempelai sama-sama hancur, jadi tidak ada pesta perkawinan bagi mereka.

Sebagian besar korban yang selamat mengeluhkan tiadanya tenda untuk berteduh. Mereka kedinginan di tengah angin kencang dan hujan deras. Tak ada pasokan makanan dan selimut. Bantuan pangan dari pemerintah terlambat datang, sehingga memaksa mereka mengemis untuk memuaskan rasa lapar. Kusno, korban dari Prambanan, Klaten, menuturkan kepada *Koran Tempo* (29/5), bersama ratusan korban lainnya, dia berdiri berjejer antara Yogya-Klaten, menyodorkan kaleng mengharapkan pemberian dari para pengendara yang sedang lewat.

Seorang korban di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, mengaku kesulitan membeli makanan karena semua toko tutup. Ganang Hadiwijoyo menuturkan anak-anak dan orang tua menderita sakit karena kekurangan makanan dan tempat berteduh. "Saat ini kami membutuhkan bantuan agar bisa bertahan hidup," kata Ganang kepada *Koran Tempo.*

Hampir semua suratkabar di Jakarta membuka dompet kemanusiaan untuk disumbangkan kepada para korban gempa di DIY dan Jateng. Laporan terakhir mengungkapkan gempa Sabtu subuh sudah menelan 5.162 nyawa, 3.490 di DIY dan 1.672 di Jateng. Kerugian material mencapai Rp 2,5 triliun. Tak kurang dari 33.616 rumah penduduk rusak parah, 19.593 di DIY dan sisanya di Jateng. Gempa subuh di Yogya masih menyisakan kepedihan dan penderitaan. ■ SH **(Laporan terkait halaman 46)**

Pak Harto, Masa Lalu

Sayang, di Indonesia tidak ada pemimpin sekaliber Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Hanya Mandela yang mampu melupakan semua penghinaan dan penderitaan selama 30 tahun lebih di sel penjara rezim *apartheid* kulit putih begitu menghirup udara bebas. Mandela juga tidak tergiur untuk membalas dendam meski terpilih jadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Dia malah mengajak bangsanya melupakan semua penghinaan dan penderitaan yang dialami ratusan tahun di bawah rezim otoriter pembedaan warna kulit.

Mandela mengubur dalam-dalam masa lalu bangsanya yang gelap, mengajak (dan meneladani) mereka untuk membangun masa depan. Sebab balas dendam hanya menciptakan gejolak dan konflik serta membuang-buang waktu. Mandela ingin segera membangun negerinya di atas landasan kebersamaan. Obsesinya, bangsa Afrika Selatan yang mayoritas berpenduduk kulit hitam harus segera bebas dari pengucilan, penghinaan, penderitaan dan keterbelakangan. Walhasil, dalam tempo relatif singkat bangsa Afrika Selatan bangkit, mengubah dirinya—dari bangsa budak menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Setelah obsesinya terwujud, Mandela tidak ingin berlama-lama di kursi kekuasaan, turun pada saat yang tepat, ketika rakyatnya menghendakinya tetap berkuasa. Namun setelah tidak berkuasa lagi, Mandela tetap dihormati dan dielukan oleh rakyatnya.

Apa kaitan Mandela dengan Pak Harto? Tak lama setelah bebas dari penjara, Mandela berkunjung ke Jakarta dan menemui Pak Harto. Dalam waktu singkat, Mandela belajar banyak hal dari Pak Harto. Sebaliknya, setelah Mandela menjadi presiden, Pak Harto berkunjung ke Capetown, tetapi tak berminat belajar dari Mandela.

Tiga hal yang tidak dipetik Pak Harto dari Mandela; membiarkan dendam berkepanjangan bahkan puluhan tahun setelah penumpasan G-30-S/PKI (1965), berkuasa terlalu

lama dan melepas jabatan di saat rakyat tak lagi menginginkannya. Setelah mengundurkan diri (21 Mei 1998), Pak Harto digiring menjadi isu sentral bangsa ini.

Jenderal Soeharto tampil gagah di puncak usianya, 45 tahun, ketika mengambil estafet kepemimpinan nasional dari Presiden (mendiang) Soekarno, Maret 1966 dan dikukuhkan oleh MPRS, Maret 1968. Turunnya Bung Karno dan naiknya Pak Harto, merupakan ujung dari gejolak politik yang berdarah-darah, dinihari 1 Oktober 1965. Di kemudian hari, Pak Harto bisa berkuasa sampai 32 tahun lantaran mendapat dukungan kuat dari ABRI dan Golkar yang dikukuhkan MPR di dalam sidang umum lima tahunan.

Artinya kesalahan yang dilimpahkan pada Pak Harto sekarang ini merupakan bagian dari kesalahan kolektif. Memang ada bagian yang salah dari sistem demokrasi di era Pak Harto, tetapi itu merupakan sebuah strategi untuk membangun ekonomi agar Indonesia segera bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pak Harto mengalami nasib yang hampir sama dengan Bung Karno, menjadi tumpahan kesalahan kolektif. MPRS mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup, tetapi Majelis itu pula yang mencabut kekuasaannya.

Apakah kesalahan kolektif tersebut akan terulang lagi di era reformasi yang sudah memasuki usia sewindu ini? Faktanya, dendam terus bergelora sehingga menarik bangsa ini ke belakang. Langkahnya ke depan tersendat-sendat. Sekarang dan kemarin telah lahir tradisi baru yang mengentalkan teriakan, cercaan, kekerasan dan pemaksaan kehendak. Tradisi ini mendapat tempat terhormat di media massa, seolah-olah itu perasaan dan kehendak rakyat. Dalam sorotan tajam kamera TV dan suratkabar, tradisi ini menciutkan nyali polisi, para petinggi eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tradisi ini juga yang memaksakan pengadilan Pak Harto dalam usia uzur 85 tahun. Padahal tim dokter telah memberi rekomendasi medis bahwa Pak Harto menderita kerusakan jaringan syaraf otak secara permanen, dan saat ini sedang menjalani proses penyembuhan dari berbagai penyakit fisik. Pak Harto, ketika masih sehat, mematuhi semua proses hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa.

Atas rekomendasi medis tim dokter pribadi dan negara, Mahkamah Agung menerbitkan fatwa hukum bahwa Pak Harto hanya bisa diadili setelah penyakitnya disembuhkan. Pengadilan Negeri mengembalikan perkara Pak Harto ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Baru-baru ini, Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Namun semua ketetapan hukum tersebut tidak menghentikan teriakan, aksi dan pemaksaan kehendak untuk mengadili Pak Harto. Presiden Susilo yang dipilih oleh 60 juta lebih pemilih sekalipun tak mampu menghentikan tuntutan di jalanan. Malah dia hanya menjawab tuntutan tersebut dengan sebuah pernyataan yang mengambang; perkara Pak Harto diendapkan sementara waktu.

Sekarang, penyakit fisik Pak Harto semakin kompleks. Namun dendam padanya tak juga padam meskipun hukum menafikan pengadilan bagi seseorang yang menderita penyakit rohani dan jasmani. Agar bisa menjalani sisa usianya dengan tenang dan damai, sudah semestinya Pak Harto dibebaskan dari semua beban hukum. Biarlah Pak Harto jadi bagian masa lalu.

Ada baiknya bangsa ini belajar dari Afrika Selatan—mengakhiri balas dendam untuk membangun masa depan di atas landasan kebersamaan.■

Pro-kontra membayangi perkara Pak Harto yang tidak tuntas selama delapan tahun ini. Suara yang menuntutnya untuk diadili lebih galau dari empati mayoritas massa yang diam. Pak Harto sendiri tak lagi mampu mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya.

Pak Harto Menjawab Dalam Diam

Garis-garis keriput tampak semakin jelas di wajah mantan Presiden Soeharto yang baru saja meninggalkan Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Dia masuk rumah sakit awal Mei karena pendarahan usus. Rambut putihnya tampak semakin jarang, *the smiling general* tak lagi terlihat ceria. Di balik senyumnya tersirat kegelisahan membayangi usianya yang semakin uzur.

Lahir 8 Juni 1921 di bawah bayang-bayang bintang Gemini, agaknya peruntungan Pak Harto sudah memudar, bahkan penuh antagonisme. Ketika berkuasa, kata-katanya dipatuhi para pembantunya laksana sabda nabi. Namun hanya dalam jarak waktu tujuh bulan lebih, peruntungan Pak Harto beralih dari seorang presiden yang sangat disegani dan dihormati menjadi pesakitan yang dihadapkan pada tim pemeriksa Kejaksaan Agung. Setelah berkuasa lebih dari 30 tahun, Pak Harto mengundurkan diri 21 Mei 1998, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, 9 Desember 1998.

Dialog pada awal pemeriksaan: Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersediakah untuk memberi keterangan pada hari ini? Pak Harto menjawab: "Ya, saya dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya." Lantas Tim Pemeriksa mengajukan pertanyaan berikutnya: Terlebih dahulu kami ingin memberi penjelasan kepada saudara bahwa saudara diminta hadir di Kejaksaan hari ini dimaksudkan untuk diminta penjelasan saudara tentang: a. Masalah Pembangunan Industri Mobil Nasional yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 1996 beserta peraturan pelaksanaannya; b. Masalah Yayasan-Yayasan yang didirikan atau dipimpin oleh H.M. Soeharto; c. Masalah-masalah lain yang secara lebih jelas akan dikemukakan dalam pertanyaan kami nanti berkaitan dengan aset/keuangan dan lain-lain. Dengan penjelasan secara singkat tersebut apakah saudara mengerti maksud Kejaksaan Agung meminta keterangan saudara hari ini, dan sekali lagi meminta penegasan keterangan tentang hal-hal tersebut? Pak Harto kembali menjawab: "Mengerti."

Sekelumit kutipan berita acara pemeriksaan (BAP) Kejaksaan itu tergambar betapa posisi Pak Harto yang tadinya disanjung dan dihormati, direndahkan dan diremehkan kendatipun dia sudah sangat berjasa di dalam membangun perekonomian dan martabat bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional. Sekarang, Pak Harto tak lagi mampu menjawab pertanyaan sesingkat dan sesederhana apapun lantaran penyakitnya semakin kompleks. Tim dokter pribadi maupun negara sudah memberi rekomendasi bahwa Pak Harto menderita kerusakan jaringan syaraf otak permanen.

Namun tuntutan dari 40 LSM untuk mengadilinya semakin membahana. Sebanyak 72,58 persen dari 5.624 responden pilihan majalah *Tempo* yang dibreidel semasa pemerintahan Pak Harto, menyatakan setuju diadili meskipun sang tokoh sedang terbaring sakit. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), melangkah mundur hanya dengan sebuah pernyataan, "perkara Pak Harto diendapkan dulu," sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Susilo urung menerbitkan Keputusan Presiden untuk memulihkan status hukum Pak Harto.

Sekadar menghibur keluarga Cendana, Presiden Susilo menyempatkan diri untuk menjenguk Pak Harto di RSP Pertamina. Kondisi kesehatan Pak Harto selama proses penyembuhan mengalami pasang dan surut. Tim dokter RSP Pertamina melakukan pembedahan usus di tengah upaya pemulihan kondisi jantung, ginjal dan paru-parunya. Lantaran usianya yang sudah uzur, Pak Harto membutuhkan waktu cukup lama untuk penyembuhan organ-organ penting tubuhnya.

Sejak pengunduran dirinya, cacian, hujatan dan tuduhan korupsi dilimpahkan kepada Pak Harto dan keluarganya. Pak Harto dituduh menimbun kekayaan triliunan rupiah, hasil korupsinya selama 30 tahun berkuasa. Majalah internasional terkemuka, *TIME* edisi Asia, menurunkan laporan sampul; *Suharto Inc.,* melansir adanya transfer dana 9 milir dolar AS atas nama Soeharto dari sebuah bank di Swiss ke sebuah bank di Austria. Pak Harto (Juli 1998) menggugat *TIME* atas laporan tersebut, tetapi dikalahkan oleh pengadilan.

Menanggapi berbagai pemberitaan dan pernyataan yang simpang siur itu, Pak Harto (6/9-98) mengumumkan kekayaannya lewat wawancara dengan *TPI*. Pak Harto menyangkal memiliki kekayaan seperti yang diberitakan media massa, baik dalam maupun luar negeri. Kata Pak Harto: "Saya tidak punya uang satu sen pun di luar negeri." Uangnya yang berjumlah Rp 22 miliar hanya disimpan di bank-bank dalam negeri. Jika ternyata ada uangnya yang tersimpan di luar negeri, Pak Harto memberi surat kuasa kepada Menteri Kehakiman Muladi dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib, menarik uang itu untuk diserahkan kepada negara.

Pemerintah Swiss (11/9-98) mengeluarkan pernyataan resmi, bersedia membantu pemerintah Indonesia melacak rekening-rekening Pak Harto di bank-bank Swiss.

Kemudian, Presiden Habibie (21/11-98) mengusulkan pembentukan komisi independen yang bertugas mengusut harta kekayaan H.M. Soeharto. Pak Harto (22/11-98) menanggapi pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, menulis surat kepada Habibie, melaporkan kekayaan dan menyerahkan

TAK BISA DISIDANG: Kerusakan jaringan syaraf otak permanen.

PAK HARTO: Menyerahkan surat kuasa pada kejaksaan Agung.

penggunaan dana tujuh yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah. Kejagung (29/9-98) membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta Kekayaan H.M. Soeharto, dipimpin Jampidsus Antonius Sujata. Tim Pusat Intelijen Kejagung (28/10-98) memeriksa data tanah peternakan Tapos yang disebut-sebut sebagai milik Pak Harto.

Habibie (2/12-98) menerbitkan Instruksi Presiden (No.30/1998) tentang pengusutan kekayaan H.M. Soeharto. Hanya tiga hari berikutnya (5/12-98) Jaksa Agung mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Pak Harto. Pak Harto memenuhi panggilan tersebut 9 Desember 1998. Kemudian Habibie menunjuk Ghalib sebagai Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto. Sebelumnya, Ghalib (21/9-98) datang ke kediaman di Jalan Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Pak Harto. Sebaliknya, Pak Harto (25/9-98) mendatangi kantor Kejaksaan Agung, menyerahkan dua konsep surat kuasa untuk melacak harta kekayaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Surat kuasa lainnya yang diberikan kepada pemerintah adalah untuk memeriksa rekeningnya di bank-bank seluruh dunia.

M. Ghalib dan Muladi (30/5-99), anggota kabinet Habibie, anak angkat Pak Harto, berangkat ke Swiss dan Austria untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar seperti yang dilaporkan *TIME*. Kepergian mereka juga untuk melacak harta kekayaan Pak Harto lainnya yang diduga diamankan di luar negeri. Sekembalinya di Jakarta (11/6-99), Muladi mengumumkan hasil penyelidikannya, tidak menemukan simpanan uang Pak Harto di bank-bank Swiss dan Austria. Namun pengadilan tetap memenangkan *TIME* dari segi prosedur penulisan berita, kendati tidak punya bukti tentang uang yang ditransfer. Tidak hanya *TIME*. Media cetak barat terkemuka lainnya, harian *The Asian Wall Street Journal* (edisi 12/1-99), menulis bahwa Pak Harto sebagai presiden terkaya di dunia, memiliki 1.247 perusahaan keluarga. Sejumlah aktivis dan media massa dalam negeri juga menuding bahwa harta kekayaan Pak Harto mencapai triliunan rupiah. Namun semua tudingan tersebut tidak terbukti.

Di depan Komisi I DPR (7/12-98), Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas tujuh yayasan yang didirikan dan dipimpin Pak Harto—Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, dengan total kekayaan Rp 4,014 triliun. M. Ghalib juga mengungkapkan pihaknya menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar. Kekayaan itu ditambah kepemilikan tanah seluas 400 ribu hektar atas nama Keluarga Cendana. Namun ujung-ujungnya Kejaksaan Agung di era Habibie tidak menemukan cukup bukti untuk mendakwa Pak Harto di pengadilan, malahan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3).

Perkara Pak Harto dibuka kembali oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam pemerintahan Presiden KH Abdurahman Wahid, mencabut SP-3 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung, sebelumnya. Kejaksaan Agung (8/8-2000) melimpahkan kasus Pak Harto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan H.M. Soeharto digelar 31 Agustus 2000. H.M. Soeharto diperintahkan hadir pada sidang pengadilan yang dilaksanakan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Lalu Mariyun. Namun majelis hakim menyidang kursi (terdakwa) kosong, karena Tim Dokter, setelah melakukan pemeriksaan medis secara lengkap, mengeluarkan rekomendasi bahwa Pak Harto menderita sakit jaringan syaraf otak permanen, dan tidak mungkin menjalani proses persidangan.

Persidangan dibuka kembali 14 September 2000. Pak Harto tetap tidak bisa hadir atas alasan yang sama. Pak Harto (23/9-2000) menjalani pemeriksaan medis selama 9 jam di RSP Pertamina. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan 24 dokter, dipimpin oleh Prof. dr. M. Djakaria. Tim Dokter mengumumkan hasil pemeriksaannya bahwa Pak Harto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak berkomunikasi. Penyakit ini dinyatakan sebagai gangguan permanen. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut, Tim Pengacara Pak Harto menolak menghadirkan kliennya di persidangan.

Setelah mendapat hasil pemeriksaan kesehatan Pak Harto, pada 28 September 2000, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan (28/9-2000) menetapkan penuntutan

Penghentian penuntutan berdasarkan alasan medis

perkara pidana H.M. Soeharto tidak dapat diterima, dan sidang dihentikan. Keputusan ini diperkuat oleh fatwa hukum Mahkamah Agung bahwa proses pengadilan bisa dilanjutkan hanya setelah tim dokter yang ditunjuk negara memberikan rekomendasi medis bahwa kesehatan (jasmani dan rohani) Pak Harto sudah bisa disembuhkan. Lantas Marzuki mengeluarkan perintah cekal, tahanan kota dan tahanan rumah kepada Pak Harto.

Sekarang, di tengah tuntutan pengadilannya yang menggelora, kesehatan Pak Harto makin jauh panggang dari api. Jaksa Agung Abdul Rahman berupaya mengalihkan perkara Pak Harto dari tindak pidana korupsi ke perdata. Untuk perkara pidana, Pak Harto diberi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Perihal SKP3 yang diterbitkan oleh kejaksaan, Komisi III DPR terbelah—ada yang setuju dan tidak setuju pencabutan surat tersebut. Di dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung Abdul Rahman (29/5), para anggota Komisi III yang setuju menggugat bahwa SKP3 tidak diketemukan di dalam ketentuan hukum Indonesia. Namun mereka yang tidak setuju bersikukuh bahwa ketetapan itu merupakan domain hukum Kejaksaan Agung yang tidak sepatutnya dicampuri secara politis.

Dalam proses panjang kasus tersebut, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Presiden cenderung mendeponir perkara Pak Harto. Jika ketetapan mereka tak bisa dipegang, lantas siapakah yang berhak menjadi juri di negeri ini?■ (SH–dari berbagai sumber)

"Pemerintah Masih Ragu-Ragu"

Mantan Hakim Mahkamah Agung, Bismar Siregar menganggap bahwa presiden masih ragu-ragu dalam memutuskan kasus Mantan Presiden Soeharto. Padahal, "Allah mengembalikan usia 80 tahun menjadi seperti anak-anak lagi," kata Bismar. Artinya, Soeharto mestinya telah terbebas dari tuntutan hukum, apalagi kondisi kesehatannya mulai menurun.

Mengenai kasus Soeharto, Bismar Siregar menilai bahwa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono masih bersikap ragu-ragu. Dengan kembali mengendapkan kasus itu, memberi peluang rakyat untuk tambah gelisah.

"Sebagai seorang imam, saya menilai SBY keliru dengan mengatakan mengendapkan masalah Soeharto. Kenapa tidak bilang saja 'saya hentikan, karena Soeharto telah tua'. Apalagi sebagai muslim harus meyakini bahwa usia 80 tahun, Tuhan mengembalikan dia seperti anak-anak, tidak ada dosa lagi. Tapi, kenapa SBY kembali mengambangkan masalah ini?"

Sebagai Mantan Hakim Mahkamah Agung, Bismar menyayangkan sikap itu. Apalagi kesannya Soeharto benar-benar telah 'dilumpuhkan'. Bahkan untuk mencabut kasus Soeharto, harus dicabut juga Tap MPR. "Mengapa menentukan nasib seseorang saja harus menghabiskan banyak waktu? Tak bisakah kita memaafkan dan membuang dendam dalam hati," ujarnya. Kendati orang menganggap bahwa dosa Soeharto telah banyak, namun Bismar tetap mengingatkan bahwa sebagai orang yang beragama maka harus mengingat kebaikan seseorang dan melupakan yang tidak baik. "Maafkanlah dia," tambahnya.

Walaupun mengaku bukan kroni Soeharto, Bismar menganggap bahwa mengadili Soeharto sekarang ini, sama dengan melakukan penganiayaan hukum. "Haram mengadili Soeharto," tegas Bismar. Karena ia berpegang pada ayat dari Al-Quran, yang berbunyi, *'Seseorang yang berusia 80 tahun, ia telah dikembalikan oleh Tuhan seperti anak-anak yang belum memiliki dosa'* apalagi ditegaskan Bismar bahwa keluarga Soeharto sudah meminta maaf.

Menurut Bismar, Majelis Ulama hendaknya bisa membuat pernyataan yang menyejukkan. "Majelis ulama seharusnya mengatakan, jangan sakiti dia walaupun fisiknya dia sudah sakit, jangan sakiti batinnya, maafkan kesalahannya" tambah opung 11 cucu ini. Jika berpikir sebagai praktisi hukum, Bismar mengajak bahwa hukum itu sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, namun perlu juga mendengarkan hati nurani dan iman.

Bismar juga mengingatkan bahwa selama berkuasa 30 tahun, Soeharto juga telah memiliki banyak jasa. Pembangunan sekarang ini tak lepas dari jasa Soeharto. 'Dosa-dosa' Soeharto adalah dosa politik, jadi hendaknya jangan semata-mata menyalahkan dirinya. "Golkar penyebab negara ini hancur. Sekarang mestinya Golkar harus menahan diri, janganlah mereka menonjolkan diri sekarang. Mereka itu yang menahan-nahan Pak Harto ketika ingin lengser. Sedangkan para ulama juga ikut andil. Mestinya waktu itu mereka mengingatkan Pak Harto. Tapi tidak kan? Tapi, kenapa sekarang hanya Soeharto yang disalahkan?" ■ AD, CRS

BISMAR SIREGAR

Menanti 'Political Will' Pre

Jaksa Agung menghentikan proses penuntutan perkara terhadap mantan Presiden HM Soeharto. Presiden SBY sendiri justru mengendapkan persoalan itu. DPR dan Presiden perlu mengambil terobosan politik.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, (10/5), untuk mengendapkan kasus mantan Presiden RI, HM Soeharto, menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Polemik pun tak terhindarkan mencuat ke permukaan.

Pernyataan SBY menyiratkan ketidakjelasan sikap tegas pemerintah terhadap kasus Soeharto. Padahal, proses peradilan atas kasus tersebut mengambang, tak berketentuan, seakan tanpa ada hasil akhir.

Di satu sisi, pengadilan tingkat pertama sudah digelar. Namun, di lain sisi, HM Soeharto yang jadi terdakwa tidak bisa dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) lantaran menderita sakit yang permanen.

Sewaktu berada di Bandung, (20/5), Presiden SBY mengatakan kepada sejumlah mahasiswa yang menemuinya bahwa dirinya menyerahkan kasus hukum Pak Harto kepada penegak hukum. "Dengan demikian, penegak hukumlah yang melakukan sesuatu atas nama undang-undang dan bisa menjelaskan kepada rakyat," kata Presiden SBY saat itu.

"Saya menghormati supremasi hukum. Oleh karena itu, kasus hukum mantan Presiden Soeharto, kita tidak boleh mencampuri. Saya tidak boleh masuk sama sekali karena bisa keliru," tegasnya.

Barangkali, bertolak dari kenyataan tersebut, Jaksa Agung RI, Abdul Rahman Saleh, melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) dugaan korupsi HM Soeharto, pada 11 Mei 2006.

Di hadapan Komisi III (hukum) DPR-RI, (22/5), Jaksa Agung menyatakan bahwa keluarnya SKP3 kasus Pak Harto adalah murni dari segi teknis hukum dan bukan berarti memberikan pengampunan karena kasusnya masih belum final.

Kepada anggota Dewan, Arman —demikian Jaksa Agung biasa disapa— mengklarifikasi, SKP3 itu dikeluarkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh tim dokter independen dari RSCM (tim pemantau kesehatan bentukan Kejaksaan Agung), dan dengan tim dokter kepresidenan, bulan Mei 2006, kondisi mantan presiden Soeharto masih buruk, atau sama dengan hasil pemeriksaan pada tahun 2002.

"Untuk tidak menggantungkan nasib orang, dikeluarkanlah SKP3," ujarnya. Jaksa Agung juga menambahkan, pengeluaran SKP3 tidak masuk dalam masalah politik, atau ruang lingkup yang menjadi wewenang Presiden seperti amnesti, abolisi, atau rehabilitasi.

Sementara itu, terhadap pernyataan Presiden SBY yang memilih untuk mengendapkan kasus Pak Harto, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menilainya sangat lamban. Sebab, proses peradilan sudah berjalan selama delapan tahun.

"Sudah delapan tahun *kok* diendapkan, mau sampai kapan lagi," tandas mantan Ketua MPR-RI itu. Amien mendesak Presiden SBY segera menuntaskan kasus mantan Presiden Soeharto agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di mata masyarakat.

"Sekarang memang kasusnya dilematik. Kalau Pak Harto sampai meninggal dunia, padahal kasusnya tidak pernah diselesaikan secara hukum, maka itu buruk buat Pak Harto dan buruk juga buat keluarganya, karena ia akan selalu menjadi beban sejarah. Karenanya, kasusnya harus segera dituntaskan."

Relevan dengan pandangan Amien adalah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Yusril Ihza Mahendra. Yusril melempar sinyal bahwa sikap pemerintah adalah menghentikan proses peradilan Soeharto.

Yusril mengaku sudah menyerahkan dokumen dan bahan yang dibutuhkan untuk melengkapi pengambilan keputusan Presiden SBY.

Diingatkan oleh Yusril, proses peradilan terhadap Soeharto sudah dihentikan melalui SKP3. "Presiden sudah menerima surat ketetapan penghentian penuntutan perkara itu serta pencabutan pencekalan Soeharto dari Jaksa Agung," ujar Mensesneg.

Mantan Wakil Presiden RI, yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz, menilai pengampunan kepada HM Soeharto sebaiknya dilakukan setelah ada kepastian pada proses hukumnya.

"Kalau mau memberi pengampunan, berikanlah setelah ada kepastian hukum," ucap Hamzah.

Agak senafas dengan Hamzah Haz, Ketua Fraksi PPP di DPR, Endin AJ Soefihara, meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menyatakan proses pengadilan HM Soeharto tidak mungkin dilanjutkan.

Alasannya, kata Endin, kondisi kesehatan HM Soeharto tidak memungkinkan untuk menjalani pengadilan. Solusinya, "Mahkamah Agung seharusnya bersidang kembali untuk menyatakan pengadilan tidak mungkin dilanjutkan karena kondisi Pak Harto yang sedang sakit," ucap politikus muda PPP itu, usai menjenguk HM Soeharto di RSPP, Jakarta, (22/5).

Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, (9/5), mengingatkan bangsa Indonesia akan jasa dan prestasi Pak Harto

Presiden SBY setelah menjenguk Pak Harto di RS Pertamina

siden

Ketua DPR Agung Laksono

bagi negeri ini. Untuk itu, dia meminta pemerintah menghentikan proses hukumnya.

"Jangan lupa, Pak Harto sangat berjasa bagi negeri ini. Saya minta pemerintah menghentikan proses hukum," kata Hasyim Muzadi.

Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir, mengajak masyarakat Indonesia untuk memaafkan Pak Harto karena sekarang kondisi kesehatannya sudah kritis. Ajakan itu dilontarkan Soetrisno ketika melantik pengurus DPW dan DPD PAN se-Provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu.

Sebagai partai reformis, katanya, proses hukum terhadap Pak Harto dia serahkan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, sebagai pribadi, di setiap kesempatan, dia mengaku selalu mengajak masyarakat Indonesia memaafkan Pak Harto. "Apapun kesalahan Pak Harto, tetap saja jasanya sangat besar kepada bangsa ini," kata Soetrisno.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, juga mengimbau hal serupa. Ketua DPR-RI Agung Laksono juga berpendapat sama. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, masyarakat Indonesia harus menyikapi masalah yang menimpa mantan Presiden Kedua RI itu dengan ketulusan dan tanpa rasa dendam. "Saya mengajak masyarakat untuk menyikapi masalah Pak Harto dengan arif dan bijaksana. Tidak secara emosional," imbau Agung.

Terobosan Politik

Direktur Eksekutif LSI, yang juga pengamat politik, Denny JA, berpendapat, Presiden SBY dan DPR harus secepatnya menentukan status hukum Pak Harto. Selanjutnya, SBY dengan pertimbangan DPR memberikan abolisi kepada Pak Harto sebagai solusinya.

Dalam hemat Denny, status Pak Harto perlu segera ditentukan mengingat jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Di lain pihak, proses peradilan terhadap mantan presiden itu mustahil dilaksanakan karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan.

Denny mengingatkan, MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan (Tap) atau mencabut Tap yang sudah ada. Untuk itu, sebagai solusi paling realistik untuk kondisi saat ini, dia mengimbau agar Presiden dan DPR dapat mengambil terobosan politik. Terobosan dimaksud, antara lain, dengan pemberian abolisi oleh Presiden.

"Menurut saya, putusan politik yang memungkinkan diambil dalam waktu singkat adalah pemberian abolisi. Meski itu pilihan sulit, namun Presiden dan DPR perlu segera mengambil putusan politik mengenai kejelasan status Soeharto," ucapnya.

Meski akan menuai pro-kontra, paling tidak, kata Denny, terobosan politik tersebut bisa menghentikan polemik yang ada, menyusul pernyataan Presiden SBY dan dikeluarkannya SKP3 oleh Jaksa Agung.

Denny mengaku lembaga yang dia pimpin sejauh ini belum melakukan survei tentang pendapat masyarakat jika abolisi diberikan kepada Pak Harto. Namun, sekadar gambaran, dia menunjuk hasil survei kepada kalangan buruh yang menyimpulkan, buruh merasa lebih terlindungi di zaman pemerintahan H.M. Soeharto dibandingkan di era presiden-presiden lainnya.

"Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa masyarakat merasakan perekonomian dan keamanannya lebih terlindungi di era pemerintahan Soeharto," papar Denny JA.

Kembali ke Amien Rais, dia berpandangan, kasus dugaan korupsi Pak Harto harus dituntaskan secara hukum. Sebab, jika sampai dia meninggal dunia sementara kasusnya masih terkatung-katung, kondisi itu akan buruk buat Pak Harto dan keluarganya karena akan menjadi beban sejarah.

Sebelum Presiden SBY memberikan amnesti setelah mendengarkan pertimbangan DPR-RI, seluruh harta yang pernah dikumpulkannya secara tidak sah harus dikembalikan dahulu ke negara.

"Jalan tengahnya begitu, dan rakyat bisa menerima itu. Jadi, harus ditegakkan dahulu hukum dan harta-harta yang diperoleh secara tidak sah oleh Pak Harto disita negara. Baru kemudian dia diampuni," katanya memberikan solusi.

Pencabutan Tap MPR

Pernyataan Presiden SBY untuk mengedepankan persoalan disampaikan setelah mengadakan forum konsultasi dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk meminta masukan soal kasus Pak Harto.

Di Semarang, esok harinya, Ketua MPR-RI, Hidayat Nurwahid, menuturkan bahwa dalam pertemuan itu sempat mengemuka sejumlah pendapat, yang antara lain, mengatakan Tap MPR No. 11 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang memberi amanat langkah pengusutan atas kasus KKN Pak Harto sudah tidak berlaku. Alasannya, Tap MPR tersebut tidak memiliki landasan undang-undang.

Pendapat agak senada mengusulkan agar MPR mencabut Tap MPR tersebut. Namun, ditegaskan oleh Hidayat, MPR tidak memiliki wewenang konstitusional untuk melakukan hal itu.

"Sepanjang Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 masih ada, ketentuan itu harus ditaati. Ketentuan tersebut juga masih dikuatkan dengan Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003," katanya.

Jadi harus ada kemauan politik untuk melakukan terobosan hukum dan politik dengan memperhatikan etika dan moral. Terobosan hukumnya, dibuat undang-undang (UU) yang dibuat secara khusus, yang menyatakan menghentikan perkara hukum Pak Harto.

Pemberian amnesti atau abolisi harus dilakukan setelah ada solusi terkait dengan TAP MPR itu. Dia mengisyaratkan, wewenang membuat keputusan pengampunan kepada Pak Harto berada di DPR dan Presiden melalui UU tersebut. Perlu inisiatif dari DPR dan/atau Presiden karena dua lembaga negara itu yang memiliki kekuasaan membentuk UU.

Agaknya, agar energi bangsa ini tidak habis percuma, sementara banyak lagi masalah menghadang, dibutuhkan kemauan politis Presiden SBY untuk menentukan sikap dan keberanian seorang negarawan untuk menanggung segenap risikonya. ■ AF

Mengembalikan Kehormatan Bangsa

Sejumlah media massa sudah mempersiapkan obituari mantan Presiden Soeharto, yang akan dirilis manakala beliau mangkat.

Setelah hasil perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta tak juga memberikan harapan pemulihan kesehatan fisik ke kondisi sedia kala, keluarga besar Pak Harto sudah melakukan bersih-bersih di komplek pemakaman keluarga Astana Giribangun, Desa Karang Bangun, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah.

Astana Giribangun tempat Ibu Tien Soeharto berbaring untuk selama-lamanya, adalah lokasi yang juga dipilih oleh Pak Harto untuk pemakamannya jika suatu saat meninggal dunia. Komplek ini merupakan makam keluarga kerabat trah Mangkunegara, luasnya 2,5 hektare, dipugar tahun 1974 dan diresmikan oleh Pak Harto pada 1976.

Dan terbuktilah kemudian, di hari Jumat (19/5) politisi dan anggota DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso usai besuk Pak Harto menyebutkan, keluarga besar Cendana sudah ikhlas jika bekas orang kuat ini harus pergi untuk selamanya.

"Dari pembicaraan dengan Mbak Tutut dan Titiek, kesan saya mereka siap jika Pak Harto sewaktu-waktu dipanggil," kesan Priyo, setelah bercakap-cakap dengan dua putri Pak Harto itu.

Namun persiapan rutin berbeda dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat lain, yang selalu mengemas nama besar mantan pemimpin bangsa ini sebagai komoditas politik yang bebas diperlakukan sesuka hati sebagai apa saja. Bagi mereka kasus Pak Harto harus selalu berupa bola panas yang berada di ujung tanduk, bukan cerita kisah kenegaraan-bangsa di buku sejarah Indonesia yang siap diwariskan ke setiap generasi.

Pemunculan Terakhir

"Jenguk-Kangen" mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, yang bersama istri Siti Hasmah binti Haji Mohd Ali melakukan kunjungan persahabatan kepada "Saudara Tua" mantan Presiden Soeharto selama 30 menit pada hari Rabu (3/5) sejak pukul 10.30 WIB di Jalan Cendana, merupakan pemunculan terakhir Pak Harto di hadapan khalayak ramai dalam keadaan sehat walafiat secara fisik. Kendati, karena faktor usia tua beliau sudah mengalami gangguan kerusakan syaraf otak secara permanen.

Setelah dua tahun tak bertemu, kedua bekas pemimpin khususnya Pak Harto terus saja mengembangkan senyum khasnya pada wajahnya yang tampak segar. Keduanya lalu melambaikan tangan kepada para wartawan yang meliput. Pada masanya, bersama PM Singapura Lee Kuan Yew mereka dikenal sebagai trio pemimpin berkarakter kuat yang berhasil menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

HM Soeharto

Namun tanpa dinyana segar-bugarnya wajah *"The Smiling General"* di hadapan Mahathir berubah menjadi amunisi baru bagi sekelompok orang. Mereka tetap ngotot menginginkan Pak Harto harus menjalani proses hukum terkait dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi di sejumlah yayasan yang pernah didirikan Pak Harto.

Siapa pula yang menyangka kalau kedatangan Mahathir ke Jakarta, yang sesungguhnya hanya dimaksudkan untuk memberikan ceramah di sebuah kuliah umum, telah memicu terangkatnya sejumlah agenda penting untuk dibicarakan ke permukaan. Yakni, bagaimana menempatkan setiap mantan pemimpin bangsa di tempat yang sangat layak dan terhormat.

Sejumlah pemimpin yang sedang berkuasa khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla tiba pada kesimpulan akhir, untuk menjaga kehormatan bangsa dengan cara mengembalikan kehormatan para mantan pemimpin bangsanya sendiri. Baik itu Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, hingga Megawati.

Tak Ada Lagi Celah Hukum

Secara politis Presiden menempuh kebijakan mengendapkan persoalan Pak Harto. Namun secara hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menelurkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Pak Harto, ditandatangi oleh Kajari Jaksel Iskamto pada hari Kamis (11/5).

Ini berarti tidak ada lagi celah hukum pidana bagi Pak Harto. Posisi ini dapat memberinya ketenangan menghadapi masa-masa terpenting dalam hidup terlebih saat akan mangkat dalam waktu dekat atau kapan-kapan.

Media massa pun sudah sangat paham akan keadaan ini. Sehingga, arah amunisi-amunisi serangan belakangan mulai digeser ke bekas orang-orang dekat Pak Harto.

Majalah *Tempo*, misalnya, dalam dua edisi berturut-turut menurunkan laporan utama tentang Pak Harto yang sudah bergeser substansi. Seperti, "Membongkar 7 Yayasan: Harta Soeharto" (edisi 22-28 Mei 2006), dan "Kasus Soeharto: Siapa Tersangka Baru" (edisi 4 Juli 2006).

Padahal sebagaimana dimaklumi bersama pada masanya semua tokoh pernah menjadi orang dekat Pak Harto. Kecuali mereka yang nyata-nyata menyatakan diri berseberangan seperti Kelompok Petisi 50. Mereka inipun, seperti Bang Ali Sadikin sudah berbaik sangka terhadap orang yang dahulu mengangkatnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan membuatnya sebagai gubernur terpopuler sepanjang sejarah kota Jakarta.

Kerentaan usia membuat Pak Harto secara medis mustahil dapat dibawa hadir ke persidangan. Kepastian ini membuat pembicaraan ramai di luar. Baik oleh mereka yang ingin mengembalikan kehormatan bangsa maupun yang ingin merusaknya. ■ HT

Kontroversi Tak Kunjung Padam

Fisiknya terlihat lunglai. Isu mengenai dirinya bergulir. Nama besar Pak Harto bak "bola panas" yang ditaruh di ujung tanduk.

Secara medis terbukti mustahil menghadirkan tubuh lemas Pak Harto ke sidang pengadilan. Sejumlah tokoh nasional yang berkesempatan membesuk membenarkan kondisi Pak Harto yang sudah tua renta itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataannya Rabu (10/5), menyebutkan akan mengendapkan kasus Pak Harto. Wapres Jusuf Kalla tegas menyebutkan buat apa berpikir proses hukum kepada bekas presiden yang sudah dalam keadaan sakit. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Jumat (12/5) mengumumkan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Zaenal Ma'arif, pada hari Senin (8/5) di kertas surat berkop Wakil Ketua DPR RI mengirim surat pribadi kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Isinya agar membebaskan Pak Harto dari berbagai tuntutan pidana.

Ia memberi dua alasan. *Pertama,* sangat kecil kemungkinan pulihnya kesehatan Pak Harto menjelang usia 85 tahun bahkan berpotensi akan menderita penyakit lain.

Kedua, akhir-akhir ini beberapa tokoh dunia sudah mengunjungi dan memberikan doa yang merupakan penghargaan buat Pak Harto.

"Atas dasar kemanusiaan serta untuk menghormati dan menghargai jasanya terhadap bangsa dan negara, terlepas adanya kekurangan sebagai manusia biasa, kami minta Jaksa Agung membebaskan Soeharto dari berbagai tuntutan," seru Zaenal.

Muladi menyerukan hal senada dalam irama yang lebih keras. Gubernur Lemhannas ini meminta Jaksa Agung berani memutuskan pengabaian hukum *(deponeering)* atas Pak Harto.

"Jangan sampai beliau meninggal dalam status tersangka," ujar Muladi. Mantan Rektor Undip Semarang ini membandingkan Pak Harto yang begitu berjasa kepada negara, berbeda dengan maling-maling BLBI yang diberi ampun.

Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi mengatakan semua kasus Pak Harto begitu ditutup maka selesailah. Hasyim menyebut Pak Harto sangat berjasa bagi negeri ini, karenanya dimintanya pemerintah agar menghentikan proses hukum.

Bahkan Mochtar Biki, adik Amir Biki salah seorang korban kekerasan Tanjung Priok juga mengatakan mengampuni itu baik. Tuhan saja mau memberi maaf masa kita tidak mau. Bagi Amir, Pak Harto belum terbukti bersalah atau tidak sehingga menjadi pertanyaan apa urusannya memberikan maaf.

HM Soeharto

Ketua Fraksi PPP DPR Endin A.J. Soefihara usai besuk Senin (22/5) mengatakan kondisi kesehatan Pak Harto tidak memungkinkan untuk menjalani pengadilan. Karena itu, kata Endin, Mahkamah Agung seharusnya bersidang kembali untuk menyatakan pengadilan tidak mungkin dilanjutkan karena kondisi Pak Harto yang sedang sakit.

Tinggal Catatan Sejarah

Rudy Satrio, pengajar ilmu hukum dari Universitas Indonesia mengatakan bila pengusutan hukum terhadap Pak Harto dihentikan maka kroni Soeharto yang terlibat kasus hukum akan mudah berkelit. "Mereka akan mudah berdalih bahwa yang mereka lakukan adalah perintah Soeharto," kata Rudy.

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengatakan, keputusan menghentikan penuntutan terhadap Pak Harto membuktikan ada pihak yang bisa berdiri di atas hukum. "Hukum pilih kasih," ujar Amien khawatir.

"Siapa pun presidennya (kalau berbuat salah pada masa berkuasa) tidak akan diproses karena sudah ada contohnya," ungkapnya.

Amien menyerukan Presiden seharusnya bisa bersikap tegas menyelesaikan masalah sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan di mata masyarakat.

Arief Budiman, budayawan mengatakan Pak Harto perlu diadili untuk menegakkan tradisi bahwa orang yang bersalah harus dihukum.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan sejumlah kesalahan Pak Harto selama berkuasa, seperti pemerintahan yang represif dan korupsi harus diungkapkan kepada publik agar menjadi catatan sejarah bagi anak bangsa.

Usman Hamid, Koordinator Kontras mengatakan korban penindasanlah yang berhak menentukan apakah Pak Harto dimaafkan atau tidak. Pembebasan Pak Harto akan membuat seluruh kejahatan kemanusiaan di masa lalu menjadi tanpa arti.

Hakim Agung Artidjo Alkotsar mengatakan proses hukum tidak bisa dihentikan karena alasan usia dan jasa seseorang.

Hendardi, pendiri PBHI mengatakan, demi alasan kemanusiaan untuk tidak mengadili Pak Harto justru merupakan pelanggaran terhadap pemberantasan kejahatan kemanusiaan.

Budiman Sudjatmiko mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengatakan terlalu pagi memberi maaf kepada Pak Harto. Katanya, kebijakan pemerintah untuk memberi maaf itu salah.

Hidayat Nur Wahid Ketua MPR RI menyebut penyelesaian status hukum mantan Presiden Soeharto tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Permintaan maaf tetap perlu namun pengembalian aset yang pernah dikelola mantan penguasa Orba itu kepada negara juga penting. Lebih bagus jika setelah permintaan maaf ada semacam inisiatif secara terbuka menyerahkan aset-aset yang dipermasalahkan untuk dikelola sepenuhnya oleh negara.

Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden mengatakan kalau mau memberikan pengampunan kepada Pak Harto berikanlah setelah ada kepastian hukum. ■ HT

Biarkan Keadilan Bicara

Pemerintah dan masyarakat menghabiskan energi mengurusi kasus mantan Presiden Soeharto. Sementara kasus besar lainnya terabaikan, misalnya kasus yang melibatkan para konglomerat yang korup.

Kala begitu ramainya desakan untuk menyidangkan Pak Harto, sambil geleng-geleng kepala, pakar hukum pidana Prof. Loebby Loqman pernah berkata, "Sebaiknya kita alihkan perhatian kita, bukan semata-mata pada Soeharto. Cobalah dicari dan diadili para koruptor lainnya."

Persidangan Pak Harto memang menimbulkan wacana yang ramai. Hampir enam tahun yang lalu, 31 Agustus 2000, ruang Balai Pertemuan Departemen Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi saksi sejarah sebagai tempat berlangsungnya persidangan perkara pidana atas terdakwa H. Muhammad Soeharto. Baru pertama kali itulah seorang mantan presiden di negeri ini dijadikan terdakwa.

Ketika itu, Pak Harto yang sedang sakit tak bisa dihadirkan dalam persidangan.

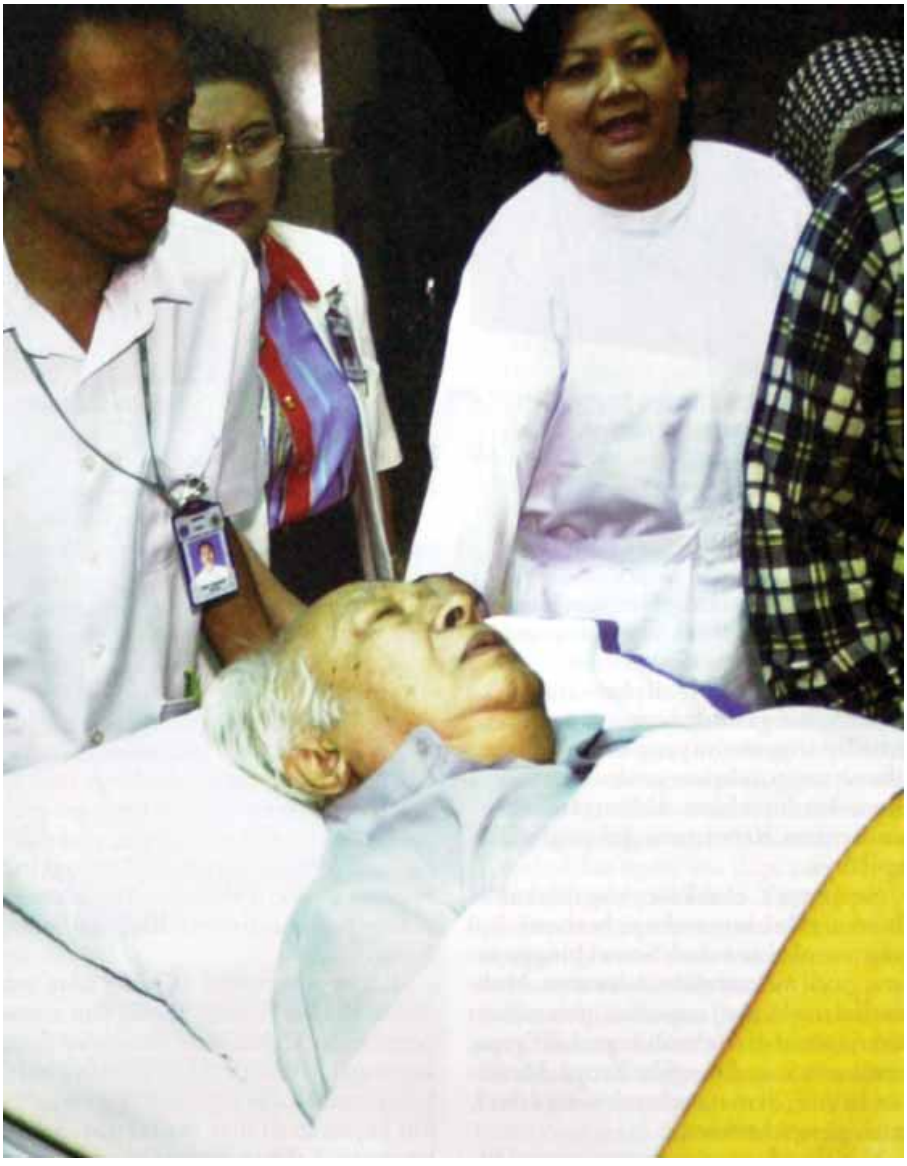

Kasusnya kental oleh aroma politik

Tim pengacaranya membawa surat keterangan dokter, hasil pemeriksaan oleh Tim Dokter RSCM. Namun, terjadi adu argumentasi antara tim pengacara dengan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mengusulkan perlunya ada tim dokter independen sebagai *second opinion*. Sangkaan bahwa jaksa penuntut umum masih belum paham tentang *second opinion* menjadi bisa dimaklumi. Sebab sebelumnya, pada tanggal 24 Februari 2000, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan penjelasan tentang surat keterangan dokter yang ditandatangani ketua umumnya, dr. Merdias Almatsier dan sekretaris jenderalnya, Dr. dr. Hasbullah Thabrany, MPA.

Pertama, seorang dokter mempunyai kewenangan untuk membuat surat keterangan tentang keadaan kesehatan fisik/mental seorang pasien dengan memperhatikan standar profesi dan etika kedokteran.

Kedua, bahwa menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, surat keterangan sehat/sakit yang dikeluarkan oleh seorang dokter merupakan keterangan kondisi kesehatan seorang pasien yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Ketiga, dalam hal surat keterangan dokter dibutuhkan untuk pemeriksaan seseorang dalam suatu perkara, aparat penegak hukum dapat meminta kepada sebuah tim dokter penilai guna menilai kondisi kesehatannya apakah ia mampu untuk menjalani pemeriksaan suatu perkara. Pemeriksaan oleh tim tersebut bukanlah suatu pemeriksaan dalam rangka *second opinion*, melainkan suatu pemeriksaan kesehatan khusus untuk kepentingan pemeriksaan suatu perkara.

Melalui tanya jawab yang melibatkan majelis hakim, tim jaksa yang diketuai Muchtar Arifin, dan tim pengacara yang dikoordinasikan Juan Felix Tampubolon, Ketua Majelis Hakim Lalu Mariyun memerintahkan jaksa penuntut umum membentuk tim dokter baru untuk memeriksa terdakwa.

Tim dokter baru itu terdiri atas unsur IDI, Depkes, FK-UI, FK-UGM, dan FK-Unair. Menurut Mariyun, tim dokter baru ini dibentuk, karena penekanannya kepada pemeriksaan mutakhir terhadap kesehatan terdakwa. Sebab, hasil pemeriksaan medis dari dokter pribadi maupun dokter RSCM itu untuk keperluan tahapan penyidikan.

Perintah majelis hakim tersebut menimbulkan kesan kekurangpercayaan atau keragu-raguan majelis hakim mengenai kredibilitas tim dokter HMS dan tim dokter RSCM.

Karuan saja hal itu dikomentari mantan Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro. Menurutnya, tim dokter baru tidak diperlukan lagi, karena keterangan dokter sebelumnya sudah cukup. Seharusnya majelis hakim memenuhi permintaan jaksa untuk bersama-sama tim pengacara mendatangi Pak Harto.

Sidang kedua

Persidangan kedua, 14 September 2000, yang ditunggu-tunggu banyak orang kembali berlangsung tanpa kehadiran Pak Harto. Dalam persidangan itu, dua tim dokter memaparkan hasil pemeriksaan medis mereka terhadap mantan Presiden RI tersebut.

Tim dokter pribadi Pak Harto, yang merawat Pak Harto sebagai pasiennya, memaparkan isi rekam medis (*medical record*).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/1989 tentang Rekam Medis, pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien, dibuat selengkap-lengkapnya dan sekurang-kurangnya memuat identitas, anamnesis, diagnosis, dan tindakan/pengobatan yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

Bagi seorang dokter, rekam medis ini merupakan kekuatan yang membuktikan bahwa dokter berusaha dengan teliti dan hati-hati dalam menyembuhkan pasien. Semakin lengkap suatu rekam medis semakin baik itikad dokter merawat pasien dan semakin kuat kedudukan hukum dari dokter.

Sementara itu, tim dokter RSCM kedudukannya adalah sebagai tim dokter penilai guna menilai kondisi kesehatan seseorang apakah ia mampu untuk menjalani pemeriksaan suatu perkara. Pemeriksaan oleh tim tersebut bukanlah suatu pemeriksaan dalam rangka *second opinion*, melainkan suatu pemeriksaan kesehatan khusus untuk kepentingan pemeriksaan suatu perkara. Sesuai dengan Hukum Kedokteran, pengertian *second opinion* adalah hak seorang pasien untuk mendapat keterangan lebih dari satu dokter mengenai penyakitnya.

Second opinion bukan wewenang institusi kejaksaan atau pengadilan, melainkan sepenuhnya hak pasien. Banyak yang keliru menangkap pengertian *second opinion*, termasuk penuntut umum sendiri dan beberapa pengamat hukum yang diwawancarai media.

Selain itu, tim dokter RSCM bukan melakukan penilaian akhir atas kondisi kesehatan Pak Harto. Sebab dalam Penjelasan Ikatan Dokter Indonesia disebutkan, bahwa keadaan kesehatan seorang pasien merupakan suatu keadaan yang dinamis, yang dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga oleh karena itu Surat Keterangan Dokter berlaku hanya untuk periode waktu tertentu sejak pasien tersebut diperiksa.

Presiden SBY bersama rombongan ketika menjenguk Pak Harto di RS Pertamina

Aroma politik

Di tengah hujatan yang mengidentikkan Pak Harto dengan Orde Baru, almarhum cendekiawan muslim Nurcholish Majid (Cak Nur) sempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan pendapat bahwa Pak Harto merupakan representasi Orde Baru. Menurut Cak Nur, yang disebut Orde Baru adalah sistem, bukan perorangan. Pak Harto hanya personifikasi sistem.

Sementara itu, mantan Jaksa Agung Ismail Saleh berpendapat, seandainya Pak Harto itu sehat dan kondisinya memungkinkan untuk hadir di persidangan, ia pasti akan tampil di persidangan. Menurutnya, Pak Harto bukan tipe pemimpin yang suka lari dari tanggung jawab.

Namun kelihatan jelas bahwa kasus Pak Harto telah dijadikan alat kepentingan politik oleh sebagian orang yang terkait. Lihat saja bagaimana Presiden BJ Habibie menyelesaikan perkara Pak Harto dalam rangka pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPR tahun 1999. Lihat juga Presiden Abdurrahman Wahid yang semula tidak ingin Pak Harto diseret-seret ke pengadilan, namun setelah ia menjadi presiden memerintahkan agar Pak Harto diadili lalu diampuni, asal kekayaannya diserahkan kepada negara.

Bahkan, Jaksa Agung Marzuki Darusman menggelindingkan perkara Pak Harto yang diawali dengan pencabutan SP3 lebih dahulu kemudian melimpahkan perkaranya ke pengadilan tanpa mengindahkan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia.

Karena kentalnya aroma politik itu, semua tim dokter yang dikerahkan untuk memeriksa kesehatan Pak Harto harus bekerja di bawah tekanan publik dan politik yang juga dibumbui ketidakpercayaan terhadap hasil kerja mereka. Sampai akhirnya, dibentuk tim dokter baru, yakni: "Tim Penilai Kesehatan untuk Kepentingan Pemeriksaan Terdakwa HM. Soeharto di Muka Persidangan," berdasarkan Surat Penugasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim tersebut dipimpin Prof. Dr. M. Djakaria, SpR dari FKUI sebagai ketua, Prof. Dr. dr Rusdi Lamsudin, SpS (K) dari FK UGM sebagai wakil ketua, dan dr. Budi Sampurna, SH dari PB IDI sebagai sekretaris.

Ketidakpercayaan terhadap tim dokter itu bukannya tidak menimbulkan kecaman. Prof. Dr. Mahar Mardjono dengan nada keras mengatakan kalau memang tidak percaya dengan tim dokter itu artinya semua pihak sudah tidak percaya satu sama lain. Jadi ia menyarankan untuk menutup saja semua fakultas kedokteran.

Masyarakat selama ini menganggap Pak Harto berpura-pura sakit untuk menghindarkan diri dari proses peradilan. Ternyata hasil Tim Penilai Kesehatan terutama di bidang Psikogeriatri menunjukkan tidak ada kepura-puraan pada diri Pak Harto. Tim Penilai Kesehatan berpendapat, bahwa HM Soeharto 'tidak laik secara permanen untuk disidangkan ditinjau dari segi medis baik fisik maupun mental'.

Atas hasil pemeriksaan Tim Penilai Kesehatan itu, maka pada 28 September 2000 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perkara pidana atas nama HM Soeharto tidak dapat diterima. Berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mencabut status tahanan kota atas nama HM Soeharto dan mencoret dari register perkara PN Jakarta Selatan. ■ RH

Selesaikan Tanpa Dendam

Gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto disiapkan Kejaksaan Agung. Ada beberapa solusi sebagai arah pelaksanaan legalitas penyelesaian kasus tersebut.

Mantan orang nomor satu di Indonesia yang dijuluki 'The Smiling General' itu memang sudah meninggalkan rumah sakit. Masa krisisnya berhasil dilewati, namun kondisinya masih dipantau ketat oleh tim dokter.

Beberapa waktu yang lalu di jalan-jalan, demonstrasi demi demonstrasi digelar. Bahkan di dekat rumahnya, di Jalan Cendana. Para demonstran itu menentang surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKP3) atas mantan Presiden Soeharto yang diterbitkan Kejaksaan Agung 11 Mei lalu.

Kritik dan protes keras atas terbitnya SKP3 itu kemudian dijawab Kejaksaan Agung dengan persiapan untuk memproses hukum mantan presiden Soeharto lewat jalur perdata. Menurut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, gugatan itu masih membidik Soeharto dengan tudingan penyelewengan dana yayasan yang dikelolanya.

Seperti dilaporkan harian *Republika*, 20 Mei 2006, Kejagung tampak yakin dalam soal yayasan itu, negara telah dirugikan sekitar 420 juta dolar AS dan Rp 1,3 triliun.

Niat Kejagung menggugat perdata ini menimbulkan berbagai reaksi. Mochtar Ngabalin, anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (Sulsel II), meminta agar demi kepentingan bangsa ke depan, penyelesaian kasus Soeharto tidak didasarkan pada rasa dendam. "Rezim Orde Baru memang meninggalkan banyak korban. Saya sendiri dipenjara empat bulan, tiga bulan, dan terakhir enam bulan karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Tetapi, sampai kapan bangsa ini besar kalau memelihara dendam," katanya.

Di sisi lain, SKP3 memunculkan berbagai opsi. Salah satu diantaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diberitakan *Gatra*, 27 Mei 2006, usai pertemuan Taufiequrrahman Ruki dengan Presiden Yudhoyono, bergulir wacana pengambilan alihan peran Kejagung oleh KPK dalam kasus tersebut.

HM Soeharto

Kala itu, Ruki menyitir Pasal 8 ayat (2) UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

Namun, beberapa hari kemudian, Ruki mengatakan KPK tidak berwenang mengambil alih kasus Pak Harto karena sudah masuk proses pemeriksaan pengadilan.

Solusi Hukum

Sangat menarik mencermati analisa pengamat hukum Indrijanto Seno Adji yang dimuat di *Kompas*, 24 Mei 2006. Menurutnya, ada dua persoalan yang menjadi atensi penerbitan SKP3, yaitu apakah penerbitan SKP3 menjadi kompetensi Kejagung dan SKP3 tidak menghendaki implementasi TAP MPR No XI.

Dalam pemahaman hukum, Pasal 4 TAP MPR No XI terhadap Soeharto telah dilaksanakan, artinya peradilan atas Soeharto telah berakhir. Pada proses sebelum sidang, prosedur yuridis kasus Soeharto dilaksanakan sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan telah ada proses peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung.

Bahkan, Ketua MA, 11 Desember 2001, memberi pendapat hukum karena Tim Dokter menyatakan, terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka terdakwa (Soeharto) tidak dapat diajukan ke persidangan. Hal ini dapat diartikan, amanat Pasal 4 TAP MPR No XI telah dilaksanakan oleh kekuasaan negara.

Mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengembalikan berkas Soeharto ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka berkas kasus ada di bidang penuntutan, juga tidak benar bila ada pendapat kompetensi penanganan ada di area yudikatif.

Berdasarkan pendekatan hukum, menurut Indrijanto, ada beberapa solusi sebagai arah pelaksanaan legalitas penyelesaian kasus Soeharto.

Pertama, mengingat berkas kasus Soeharto ada di Kejagung pada fase penuntutan, maka berdasar Pasal 14 Huruf h KUHAP dan Pasal 140 Ayat 2 Huruf a KUHAP Kejaksaan Agung/Penuntut

Kronologis Proses Hukum Pak Harto

1 September 1998	15 September 1998	29 September 1998	2 Desember 1998	9 Desember 1998	11 Juni 1999	11 Oktober 1999	6 Desember 1999
Tim Kejagung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto.	Jaksa Agung Andi M. Ghalib ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto.	Kejagung membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta Kekayaan Soeharto, yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Antonius Sujata.	Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 30/ 1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto.	Soeharto diperiksa oleh Tim 13 Kejagung selama 4 jam di gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta.	Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya, tidak menemukan simpanan uang Soeharto di bank Swiss dan Austria.	Pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tidak terbukti karena minimnya bukti.	Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali kasus Soeharto. Jaksa Agung Marzuki Darusman mencabut SP3 Soeharto.

Kritik bermunculan atas terbitnya SKP3

Umum menghentikan penuntutan dengan alasan perkara ditutup demi hukum (dituangkan lewat SKP3) dengan alasan medis yakni 'tidak ada kemampuan Soeharto untuk dihadapkan ke persidangan' atau *unfit to stand trial*.

Penghentian penuntutan umumnya berdasarkan alasan medis dan usia lanjut terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan inilah yang dilakukan Kejaksaan terhadap kasus Soeharto. Kasus ini ditutup demi hukum dengan menghentikan penuntutan berdasarkan alasan medis (kerusakan otak yang permanen) sehingga makna *unfit to stand trial* bisa diterapkan. Kejagung tidak pernah menghentikan penyidikan karena berkas kasus Soeharto ada di area penuntutan Kejaksaan. Para pengamat hukum sebenarnya memahami hal ini.

Kedua, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum (hak oportunitas). Jaksa Agung memiliki wewenang menyampingkan perkara Soeharto demi kepentingan umum, mengingat jasa-jasanya sebagai mantan Presiden, selain usia lanjut disertai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, makna "kepentingan umum" akan menimbulkan polemik multitafsir yang rancu di kalangan komunitas hukum, politik, dan masyarakat. Karena itu, arah Kejagung menerbitkan SKP3 sebagai solusi dibandingkan pemakaian hak oportunitas.

Ketiga, pendekatan politis dapat dilakukan melalui kebijakan negara. Hal ini yang kemudian menimbulkan istilah bagi Presiden Yudhoyono dengan pernyataan "endap" kasus Soeharto.

"Endap" harus diartikan kontekstual sebagai sikap politik, bukan menjadi polemik hukum yang finalisasinya melalui SKP3.

Sementara itu, menanggapi solusi mengenai rehabilitasi dan abolisi, Indrijanto berpendapat, keputusan presiden dapat memberi rehabilitasi kepada mantan presiden, selain alasan kemanusiaan usia lanjut disertai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan (hal serupa pernah disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno).

Namun pemberian abolisi (juga amnesti) akan menimbulkan perdebatan karena abolisi hanya diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang mampu dihadirkan ke persidangan (*fit to stand trial)* dengan alat bukti memadai. Sedangkan kasus Soeharto belum memasuki substansi koruptifnya, juga faktor ketidakmampuan dihadirkan ke persidangan.

Juga sesuai Pasal 14 Ayat 2 Perubahan Pertama UUD 1945, pemberian abolisi presiden hanya dibenarkan setelah memerhatikan pertimbangan DPR. Pemberian abolisi merupakan lingkup kekuasaan Pemerintahan Negara. Karena itu, keputusan pemberian abolisi adalah soal kebijakan negara yang menjadi hak eksklusif presiden dalam menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Sesuai pendekatan yuridis, Indrijanto berpendapat, SKP3 adalah solusi yang bisa diterima, sedang kebijakan "endap" Presiden Yudhoyono atas kasus Soeharto merupakan kebijakan dan pendekatan politis yang tidak menjadi area hukum.■ RH

31 Maret 2000	13 April 2000	29 Mei 2000	31 Agustus 2000	12 September 2000	14 September 2000	12 Mei 2006	12 Mei 2006	19 Mei 2006
Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang yayasan sosial yang dipimpinnya.	Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota.	Soeharto dikenai tahanan rumah.	Soeharto tidak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya.	Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan perkara pidana atas nama HM Soeharto tidak dapat diterima.	Soeharto kembali tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah mengendapkan kasus mantan Presiden Soeharto.	Kejaksaan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan untuk Soeharto.	Keluarga Soeharto meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Rekomendasi Akibat Buntu

Kejagung membentuk tim pemeriksa untuk mengusut keakuratan tudingan mantan Dirut Jamsostek kepada jaksa. Dua jaksa disinyalir terlibat.

Akhirnya, Komisi Yudisial (KY) mengeluarkan rekomendasinya atas kasus *walkout* tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). *Republika*, 20 Mei 2006, melaporkan soal rekomendasi tersebut.

Rekomendasi sanksi itu disampaikan ke MA pada Jum'at (19/5). Seperti diketahui, tiga hakim ad hoc dari non karier sepakat melakukan *walk-out* pada persidangan kasus penyuapan dengan terdakwa Harini Wijoso. *Walk-out* ini dilakukan karena ketua majelis hakim yang berasal dari kalangan hakim karier menolak permintaan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Ketua MA Bagir Manan sebagai saksi.

Dari tujuh anggota KY menyimpulkan Ketua Majelis Hakim perkara penyuapan dengan terdakwa Harini Wijoso, Kresna Menon, telah melakukan tindakan yang sangat merugikan kepentingan peradilan pada umumnya. Kresna dinilai tidak memanfaatkan kesempatan untuk musyawarah dalam perbedaan pendapat yang terjadi di antara majelis hakim.

Hakim ad hoc dari kalangan non karir, I Made Hendra Kusuma, Ahmad Linoh, dan Dudu Duswara, menginginkan Ketua MA Bagir Manan dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Namun, Ketua Majelis Kresna Menon dan anggota majelis Sutiono (keduanya dari hakim karir) menolaknya. Alasan penolakannya karena surat edaran MA (SEMA) nomor 2/1985. Dari pemeriksaan KY terungkap bahwa Kresna memang tidak mau melaksanakan musyawarah dengan tiga hakim lainnya.

KOMPAS

BAGIR MANAN: Datang ke KPK sebagai saksi dugaan penyuapan hakim MA.

Menurut KY, Kresna tidak mandiri atau tidak profesional dalam memimpin majelis sehingga kami nilai wajar untuk dikenakan rekomendasi sanksi pemberhentian sementara selama satu tahun.

Untuk Sutiono, KY menilai perilaku hakim itu tidak tegas dan tidak mandiri. Selama pemeriksaan di KY, prinsip nurani hakim tersebut sependapat dengan ketiga hakim ad hoc itu. Namun, pada kenyataannya, tindakan Sutiono tidak sejalan dengan nuraninya. Karena itu, hakim Sutiono juga direkomendasikan dijatuhkan sanksi teguran tertulis.

Terhadap tiga orang hakim ad hoc yang juga sempat diperiksa KY, komisi pengawas hakim ini menyatakan bahwa tindakan *walk-out* tersebut adalah untuk menghindarkan kebuntuan dalam majelis.

Minta Diganti

Sebelumnya, seperti diberitakan berbagai media massa ini, persidangan kasus dugaan penyuapan terhadap hakim MA yang dilakukan terdakwa Harini Wijoso itu terus menerus ditunda karena perbedaan pendapat kelima majelis hakim ad hoc.

Kompas, 18 Maret 2006, melaporkan bahwa ketiga hakim ad hoc non karir telah meminta agar ketua majelis diganti saja. Di sisi lain, kuasa hukum Harini merasa penundaan sidang sampai empat kali mulai mengganggu kepentingan kliennya.

Komisi Yudisial akhirnya memang berinisiatif memanggil kelima hakim ad hoc perkara itu untuk dimintai keterangan. Komisi beranggapan dalam menyidangkan kasus, patokan hakim adalah KUHAP, di mana hakim wajib memeriksa saksi yang diajukan jaksa. Menurut Busyro, kalau jaksa sudah mengajukan nama saksi-saksi, itu pasti sudah dengan pertimbangan dan sudah merujuk pada hukum pembuktian.

Patut disesalkan, ketua majelis hakim menolak dengan alasan tidak ada relevansinya. Apalagi dasarnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, yang tentu lebih rendah dari undang-undang.

Belakangan, ada tuntutan untuk membubarkan saja majelis kasus tersebut dan mengganti dengan anggota-anggota baru. Sementara menurut pendapat mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga yang dikutip majalah *Tempo*, 21 Mei 2006, dalam laporannya berjudul "Terbelah Soal Bagir Manan", Kresna Menon harusnya tunduk pada hasil voting ketika tiga orang anggota majelis setuju Bagir dihadirkan.

Namun, ia juga memaklumi mengapa Kresna dan Sutiyono yang notabene adalah hakim karir bersikap demikian. Mungkin lantaran takut karirnya terhambat.

Di sisi lain, Ketua MA Bagir Manan menegaskan soal rekomendasi itu, siapa saja bisa mengajukannya. Namun, dia kembali mengingatkan bahwa semua kewenangan itu ada di MA. ■ RH, DA

Para hakim yang diperiksa dan direkomendasikan Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung untuk dikenakan sanksi adalah:

A. Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diputuskan pada 16 Mei 2006 dan disampaikan ke MA pada 19 Mei 2006. Hakimnya adalah:
   1. **Kresna Menon** : sanksi pemberhentian sementara selama 1 tahun
   2. **Sutiono** : sanksi teguran tertulis
   3. **Dudu Duswara** : tak dikenakan sanksi
   4. **I Made Hendra Kusuma** : tak dikenakan sanksi
   5. **Ahmad Linoh** : tak dikenakan sanksi

B. Kasus Pengadilan Negeri Stabat (PN Stabat) yang mengadili Ahmad Azuar (Raju), diputuskan oleh KY pada 28 Maret 2006. Hakimnya adalah: **Tiurmaida H. Pardede** : sanksi teguran tertulis

C. Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) soal perkara Bank Mandiri, Neloe Cs. Diputuskan KY pada 11 Mei 2005 dan disampaikan ke MA pada 17 Mei 2006. Hakimnya adalah:
   1. **Gatot Suharnoto** : sanksi pemberhentian sementara selama 1,5 tahun
   2. **Mahmud Rahimi** : sanksi pemberhentian sementara selama 1 tahun
   3. **I Ketut Manika** : sanksi pemberhentian sementara selama 1 tahun.

Kasus Heli Harus Selesai

Tim Penyidik Koneksitas menargetkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Mi-17 oleh Departemen Pertahanan dapat selesai dalam waktu tiga bulan.

Cukupkah waktu tiga bulan untuk menuntaskan kasus yang telah bergulir sejak tahun 2004 itu? Tampaknya Tim Penyidik Koneksitas optimis hal itu bisa dicapai. "Dalam tiga bulan diharapkan sudah tuntas," kata Wakil Komandan Puspom TNI-AD Brigjen TNI Hendardji, salah seorang anggota penyidik.

Harian *Republika*, 21 Mei 2006, memberitakan Tim Penyidik Koneksitas itu diketuai Hendarman Supandji dengan 14 anggota dari Kejaksaan antara lain Soewandi, Arnold Angkow dan Ranu Mihardja, sedangkan dari militer di antaranya Brigjen TNI Hendardji dan Oditur Jenderal Brigjen TNI Heru Haryono.

Kasus pengadaan helikopter Mi-17 itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2004. Dalam kajian kasus ditemukan koneksitas antara keterlibatan pihak sipil dan militer. Dalam penyidikan dugaan korupsi yang disebut merugikan negara sebesar 3,24 juta dolar AS itu telah ditetapkan satu tersangka dari pihak sipil yaitu Direktur PT Inti Sarana Bina Sakti yang merupakan penghubung Swift Air Industrial Supplies (SAIS) dan PT Putra Pobiagan Mandiri (perusahaan yang disebut-sebut sebagai pemasok). Disinggung mengenai kemungkinan tersangka dari pihak militer, Hendardji mengatakan hal itu bisa saja benar.

"Dugaan itu ada, tetapi siapa orangnya kan belum karena penyidikan belum mulai. Nanti dalam penyidikan akan ada evaluasi dan penetapan tersangka," katanya. Setelah menyelesaikan berkas penuntutan, menurut Hendardji, perkara itu akan dilimpahkan dan diadili di Peradilan Umum.

Sementara itu, seperti dilaporkan *Suara Karya*, KSAD Jenderal Djoko Santoso sebelumnya juga telah mengutarakan dukungan TNI AD terhadap tim koneksitas dalam pengusutan kasus MI-17.

Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas itu sesuai dengan pasal 39 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur Jaksa Agung mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. ■ RH

KUITANSI YANG JANGGAL

Teka teki keterlibatan 'Trunojoyo I' dalam kasus penyuapan yang dilakukan tersangka kasus BNI semakin kabur.

Munculnya dua kuitansi yang ditandatangani salah satu terpidana kasus BNI, Adrian Herling Waworuntu menjadikan kasus ini semakin 'aneh'. Salinan dua kuitansi ini diperoleh wartawan dari Kabareskrim Komjen Pol Makbul Padmanagara saat acara rapat kerja Kapolri Jenderal Sutanto dengan anggota Komisi III DPR, Senin (15/5).

Harian *Kompas*, 20 Mei 2006, melaporkan, para wartawan sempat meragukan keabsahan dua kuintansi ini karena ada beberapa kejanggalan yakni bentuk huruf tulisan termasuk gaya coretan pena di dua kuitansi sama, padahal tanggal dua kuitansi selisih tiga bulan. Materai senilai Rp 6 ribu juga janggal karena transaksi nilai miliaran rupiah tidak cukup hanya satu materai tapi lebih dari lima materai.

Di dua kuitansi ini, Adrian yang membubuhkan tanda tangan sebagai penerima uang. Ini janggal karena seharusnya yang tanda tangan kuitansi adalah penerima uang yakni Mabes Polri. Padahal, yang terjadi adalah Adrian yang memberikan uang itu ke Mabes Polri.

Kuitansi pertama tertanggal 10 Desember 2003 menyebutkan 'PT Brocolin Internasional' menyerahkan uang Rp 8,5 miliar untuk biaya operasional dengan Kepolisian. Kuitansi bermaterai Rp 6 ribu itu ditandatangani oleh Adrian Waworuntu.

Kuitansi kedua tertanggal 6 Maret 2006 juga menyebutkan PT Brocolin Internasional menyerahkan uang Rp 7 miliar untuk biaya administrasi dengan Kepolisian dengan tanda tangan Adrian Waworuntu juga.

Dua kuitansi ini dikeluarkan PT Brocolin International untuk biaya 'operasional Kepolisian' saat Mabes Polri menyidik skandal kredit fiktif BNI Rp 1,7 triliun.

Dua kuitansi itu berbeda dengan keterangan saksi AKP Siti Kumalasari di PN Jaksel, (13/4) dengan terdakwa mantan Kepala Unit Perbankan Bareskrim Kombes Pol Irman Santosa. Kumalasari mengaku pernah melihat dua kuitansi senilai Rp 7 miliar untuk operasional di Bareskrim, dan Rp 8,5 miliar untuk operasional 'Trunojoyo I'.

Namun seperti diberitakan harian yang sama, 18 Mei 2006, Kumalasari belakangan menganulir kesaksiannya ketika ditanyai Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Anton Bachrul Alam.

Kumalasari kemudian dicopot dari tugasnya sebagai penyidik. Ia masih tetap di Bareskrim, namun hanya mengurusi administrasi. ■ RH

KOMPAS

ADRIAN WAWORUNTU: Diduga menyuap saat ditahan di Bareskrim.

Tanpa Monopoli Bisa

Perusahaan-perusaha asuransi milik negara tidak lagi identik dengan monopoli. Mereka berusaha mandiri dengan memenangkan persaingan.

Membangun kemandirian lebih nikmat. Itulah yang dirasakan saat ini oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang bernaung di bawah bendera Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertumbuhan industri asuransi, khususnya asuransi BUMN, gaungnya semakin menggema dan menjanjikan.

Pandangan dan paradigma mengenai asuransi mulai berubah. Masyarakat dianggap semakin penting untuk menjamin masa depan mereka. Di sisi lain perusahaan-perusahaan asuransi milik negara mulai membangun kemandirian, tidak lagi bernaung di balik tameng monopoli. Artinya perusahaan-perusahaan asuransi BUMN mulai mendapat kepercayaan masyarakat. Dalam bersaing, mereka tidak lagi membanting harga, tetapi meningkatkan pelayanan. Di dalam memenangkan persaingan, mereka berusaha transparan dan menjalin komunikasi yang inten dan baik dengan para pemegang polis. Dan yang paling penting, kemudahan dalam proses pencairan klaim.

Sekarang perusahaan-perusahaan asuransi milik pemerintah tidak lagi mengandalkan hak monopoli, seperti yang berlaku di era 1980-1990-an. Hak monopoli dilepas secara bertahap sembari membangun kemandirian. Hak itu tadinya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asuransi Tugu Pratama milik PT Pertamina, PT Askindo miliki BNI dan PT Asuransi Jasa Indonesia.

Memang praktik monopoli tidak hilang sama sekali. Tetapi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menapaki jejak-jejak monopoli, sehingga tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan asuransi tersebut berlindung di balik jubah pemerintah, memaksa mereka menjadi perusahaan yang kompetitif.

Masih banyak perusahaan asuransi yang mendapat amanat untuk melaksanakan misi pemerintah, misalnya, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Askes. Tetapi perusahaan asuransi, seperti Jasindo dan Tugu Pratama, berjuang keras untuk memburu posisi the best one (yang terbaik). Sebagai gambaran, tahun 2003 Tugu Pratama merebut posisi pertama, Jasindo di urutan kedua. Namun tahun berikutnya, 2004, Jasindo merebut urutan teratas, Tugu Pratama turun ke posisi kedua.

Seperti yang dijelaskan Bambang Hertanto, Direktur Pemasaran Korporasi Jasindo, kepada **Samsuri** dari Berita Indonesia asuransi jasa papan atas itu membukukan premi sebesar Rp 2,3 triliun tahun 2005, atau 135% dari target. "Tentu ini pencapaian yang cukup signifikan bagi Jasindo," kata Bambang.

Premi Rp 2,3 triliun ini diraih dari premi ritel Rp 452 miliar (20%); premi pupuk Rp 1,8 triliun (80%); premi penerbangan Rp 747 miliar; premi kebakaran Rp 677 miliar; premi minyak dan gas Rp 305 miliar; dan premi kendaraan ber-

JASINDO: Persaingan secara profesional.

motor Rp 242 miliar.

"Premi korporasi diperolah Jasindo dari hasil tender dan kontes kecantikan yang diselenggarakan perusahaan-perusahaan besar, antara lain perusahaan telekomunikasi, penerbangan, pupuk, semen, dan minyak," kata Bambang.

Sedangkan perolehan premi Jasindo sampai Februari 2006 mencapai Rp 604 miliar atau 26% dari target. Peraihan premi tersebut naik 19% dari periode yang sama, Februari 2005 yaitu sebesar Rp 507 miliar. Premi terbesar, Rp 239 miliar, diperolah dari asuransi kebakaran, dan Rp 184 miliar dari asuransi minyak mentah dan gas. "Kami optimis bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham," kata Bambang.

Menurut Herman Munir, Direktur Operasi Ritel, Jasindo tahun ini punya target untuk membukukan premi senilai Rp 2,2 triliun, meningkat 30% dibandingkan target premi tahun 2005 sebesar Rp 1,7 triliun. Kenaikan target tersebut mengingat pencapaian kinerja tahun 2005 yang cukup baik serta kondisi pertumbuhan pasar asuransi yang masih kondusif.

Dari target tersebut, tambah Herman, 24%-nya atau sebesar Rp 532 miliar, berasal dari premi ritel. Untuk mencapai target tersebut, strategi yang dipersiapkan, antara lain, diversifikasi produk, menambah jumlah agen penjualan dan kantor cabang.""Sampai saat ini kami sudah mempunyai 80 kantor cabang di seluruh Indoensia," kata Herman. Jasindo masih berencana membuka beberapa kantor cabang lagi di kota-kota besar.

Harus Profesional

Tak ada lagi monopoli yang bisa dinikmati oleh Jasindo, kecuali berjuang secara profesional, demikian menurut Kepala Humas Dewi Oedjiastuti. Dewi mengibaratkan Jasindo dengan ayam kampung yang disuruh cari makan sendiri. Artinya, meski selaku BUMN, Jasindo tidak mendapat fasilitas atau hak monopoli.

"Tidak seperti yang dituduhkan bahwa Jasindo memegang hak monopoli," kata Dewi. Diakui oleh Dewi bahwa sebagai BUMN Jasindo, di era 1990-an, pernah memperoleh fasilitas dari pemerintah, tetapi sifatnya sangat terbatas. Sekarang eranya sudah berbeda, Jasindo harus berjuang keras di dalam kompetisi, dan berusaha memenangkan persaingan baik sesama asuransi BUMN maupun dengan asuransi swasta. Ini dibuktikan oleh Jasindo, karena sejak 2001 sampai 2004 selalu meraih predikat the best, minimal di peringkat dua dari 10 besar asuransi di Indonesia.

Apa strategi yang dikembangkan Jasindo agar tetap survive? Kata Dewi, produk-produk asuransi Jasindo diupayakan dekat dan sesuai dengan keinginan nasabah. Asuransi semakin prospektif dan diminati masyarakat, semakin berkembang. "Tanpa monopoli, Jasindo mampu bersaing dan memenangkan persaingan itu," kata Dewi.■ RI, SH

Direktur Asuransi DJLK: Firdaus Djaelani

Lembaga Penjamin Untuk Bisnis Asuransi

Tidak hanya deposan bank yang butuh lembaga penjaminan, tetapi juga industri asuransi. Usaha ini juga rawan ancaman kebangkrutan. Karena itu, kata Firdaus, agar nasabah tidak menderita rugi perlu ada penjaminan, sehingga kepercayaan mereka tidak hilang pada industri dan bisnis asuransi.

Firdaus menyampaikan pandangannya tentang perlunya menumbuhkan industri asuransi demi menjamin masa depan. Berikut ini kutipan wawancaranya dengan Samsuri dari Berita Indonesia.

Sejauhmana Anda melihat bisnis asuransi saat ini?

Bisnis industri asuransi di Indonesia akan terus berkembang. Buktinya, ketika terjadi krisis pertengahan tahun 1997 sampai 2000-an, dan di saat industri lain, termasuk perbankan, terpuruk, industri asuransi tetap *survive*. Apalagi sekarang. Laju inflasi dan tingkat suku bunga cukup tinggi. Ini tentu akan menghambat ekspansi perbankan dan orang melirik asuransi. Tetapi, semua itu tidak seberat pada tahun 1998-1999, ketika nilai satu dolar AS bergerak dari Rp 2.000 sampai Rp15.000.

Tahun 2006 ini, peluang bisnis asuransi, khususnya asuransi jiwa, tetap terbuka. Cukup mengejutkan. Asuransi jiwa tumbuh sebagai the top premium, rata-rata 35% sampai 40%. Meskipun dengan laju inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi, asuransi tetap tumbuh, paling tidak sampai 25%.

Idealnya jumlah penduduk yang memiliki polis asuransi?

Itu tergantung dari kemajuan suatu negara. Kalau rasio pemegang polis di Jepang di atas 100%. Rata-rata setiap orang mungkin mempunyai polis lebih dari satu. Misalnya, penduduk Jepang sekarang 150 juta orang, mungkin pemegang polisnya sampai 200-300 juta. Untuk menuju seperti itu, kini kami sedang mempersiapkan bentuk asosiasi, seperti Biro Mediasi.

Bagi nasabah yang kurang puas dengan pelayanan asuransi terutama masalah klaimnya, bisa dibawa ke Biro Mediasi dan gratis. Artinya, kalau tertanggung kalah di Biro Mediasi, bisa maju ke arbitrase maupun ke pengadilan negeri. Namun, sekali Biro Mediasi memutuskan klaim harus dibayar, maka perusahaan asuransi harus membayar.

Apa sebenarnya fungsi Biro Mediasi?

Biro Mediasi ini dibuat sebagai mediator antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, manakala terjadi sengketa dalam hal mengenai klaim, misalnya. Jadi, dengan adanya Biro Mediasi ini diharapkan dapat menjembatani pemegang polis yang kecil yang tidak berani mengajukan kasusnya ke pengadilan karena keterbatasan biaya, dengan perusahaan asuransi yang bermasalah. Biro Mediasi semacam ini sudah ada di negara lain, seperti Jepang, Malaysia dan Amerika. Jadi, Biro Mediasi bukan hanya sebagai Lembaga Pengaduan Konsumen Asuransi saja. Melainkan, bisa menyelesaikan kasus yang terjadi.

Meskipun biro mediasi dibentuk oleh orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan, namun biro mediasi ini statusnya berada di dalam asosiasi. ■ RI, SH

◆ WIDI AGOES PRATIKTO

PENJAGA NEGERI BAHARI

Kekuatan laut tidak berarti tentara dan angkatan perang *an sich.* Penguasaan kegiatan ekonomi di wilayah laut dan pulau-pulau kecil lebih menentukan tetap tegak-utuhnya NKRI sebagai negeri bahari.

Sebagai Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Widi Agoes Pratikto, yang sejak tahun 2002 diangkat menjadi Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), pada Departemen Kelautan dan Perikanan RI, tak sekali-kali pun melupakan ciri khas utamanya sebagai ilmuwan sekaliber profesor.

Pria kelahiran Surakarta, 16 Agustus 1953 yang sejak 1 September 1999 sudah menjadi Guru Besar, ini tetap rajin menulis artikel, bahan presentasi, diktat kuliah, buku, dan memberikan ceramah di berbagai seminar, semua dalam balutan gaya hidup yang bersahaja.

Ciri utama lain, sebagaimana tujuan terpenting dari seorang kaum cerdik cendekia, Widi, yang beruntung memperoleh kesempatan pencerahan secara akademis hingga jenjang tertinggi, bertekad untuk mengangkat harkat hidup dan martabat masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil supaya menjadi lebih baik.

Kejujuran dan ketulusan ciri yang juga *inheren* dalam diri setiap ilmuwan, turut memberi inspirasi kepada Mahasiswa Teladan ITS Tahun 1977 ini untuk membulatkan pilihan filosofi hidup. Bahwa, ketika tangan kanan melakukan perbuatan yang baik maka tangan kiri jangan sampai sekali-kali turut mengetahui.

Sarjana Teknik Perkapalan yang begitu lulus tahun 1979 dari ITS segera mengabdi sebagai dosen di alamater, karena memiliki filosofi hidup sederhana tak mudah menemukan literatur tentangnya di media massa, maupun di situs internet dalam dan luar negeri yang menceritakan keberhasilan berikut kisah suksesnya sebagai birokrat. Termasuk menemukan biografi atau biodata singkat tentangnya.

Nama para direktur sebagai anak buahnya justru lebih sering terangkat ke permukaan, dan menjadi nara sumber tetap di sejumlah media massa. Padahal sebagai Dirjen, anggota sejumlah organisasi profesi bertaraf nasional dan internasional ini lebih bertanggungjawab dalam banyak hal. Dia bahkan telah berbuat banyak untuk mengangkat harkat hidup dan martabat masyarakat pesisir, serta mereka yang bermukim di pulau-pulau kecil terlebih pulau yang posisinya terluar.

Pernah, sekali waktu, seorang anak buah terdekatnya, Khairul S. Harahap terheran-heran sehingga dengan singkat jujur mengatakan *"Tumben,* Pak Widi mau diwawancara," tatkala majalah *Berita Indonesia* berhasil memasuki ruangan dan mewawancarai peraih gelar *Master of Science (M.Sc) in Civil Engineering (Ocean/Coastal Engineering),* dari The George Washington University (1983), dan gelar *Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering (Ocean/Coastal Engineering),* dari North Carolina University Raleigh, NC (1992), keduanya di Amerika Serikat.

Widi memang lebih suka mempromosikan anak buah sementara dia sibuk berkutat dengan sejumlah pemikiran besar. Ia sangat tak ingin menonjol-nonjolkan diri. "Sebab, kalau saya yang berbicara kepada wartawan pastilah akan mengatakan kecap nomor satu melulu. Biarlah masyarakat yang menilai apa-apa yang saya kerjakan. Saya lebih baik bekerja daripada berbicara," ujar peraih dua kali penghargaan Dosen Teladan FTK ITS (tahun 1984 dan 1986) ini. Ia memang sangat ingin menyumbangkan kandungan ilmu yang dimiliki, hanya untuk menyejahterakan masyarakat banyak.

Tanggungjawab Bertambah

Sepanjang ini, Widi, sesungguhnya, telah melakukan tugas-tugasnya selaku birokrat secara bertanggung jawab. Bahkan, belum lama ini tanggung jawab itu mengalami perluasan setelah keluar Perpres No. 78/2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Presiden tersebut memberikan payung hukum yang efektif bagi Widi untuk mengubahkan wajah pulau-pulau yang selama ini kusam, dan tak tersentuh oleh mesin-mesin ekonomi, industri dan pariwisata menjadi pulau-pulau yang menjanjikan bagi penghuni sekaligus menjamin tetap tegak-utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

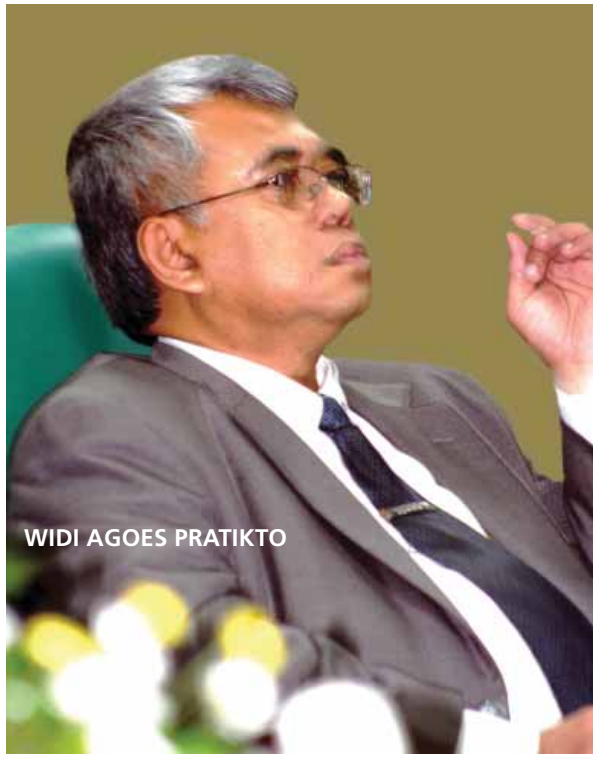
WIDI AGOES PRATIKTO

Kepada ke-92 pulau yang dikategorikan sebagai terluar Widi, selaku Ketua Tim Kerja I Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, bertanggungjawab mengisi pulau-pulau dengan berbagai aktivitas manusia sehingga layak disebut sebagai milik abadi Indonesia.

Indonesia yang pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan di tahun 2002, telah membuat rasa nasionalisme Widi bangkit, sehingga dengan sekuat

tenaga berupaya untuk bisa menyatukan negara kepulauan Indonesia melalui sebuah rencana induk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Di tingkat pusat Widi sudah berhasil memperjuangkan disetujuinya program-program pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, tentu berikut anggaran pelaksanaannya, yang untuk permulaan tahun 2007 ditaksir mencapai hampir satu triliun rupiah.

Widi, dalam rencana besarnya akan mendelegasikan sejumlah kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ke para aparat di pusat secara horisontal seperti ke para direktur dan pejabat eselon di bawahnya, serta secara vertikal ke para pejabat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kotamadya. Aparat itulah yang bertugas menjalankan program-program sesuai desain besar yang sudah digariskan. Tim Kerja I yang dipimpin Widi akan melibatkan 20 departemen dan lembaga di tingkat pusat, ditambah 20 pemerintahan provinsi dan 38 pemerintahan kabupaten/kotamadya.

Berdayakan Masyarakat Pesisir

Jika untuk mengelola 92 pulau kecil terluar Widi sudah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga dapat dengan lincah dan elegan bertindak cepat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di sana, khusus untuk pengelolaan wilayah pesisir masih menunggu selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (RUU-PWP).

Namun tanpa UU itu pun sebelum ini Widi sudah berbuat banyak menyejahterakan masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir selama ini seolah-olah hidup sangat tertutup dari dunia luar. Dunia daratan khususnya perkotaan dan pegunungan sepertinya hal yang aneh buat masyarakat pesisir. Demikian pula sebaliknya, masyarakat pesisir hanya sesekali disentuh oleh masyarakat perkotaan tatkala datang melancong mengeksploitasi pasir, pantai, karang, laut dan pulau.

Bagi Widi, menjual wilayah pesisir memerlukan keindahan dan keberaturan. Pemeliharaan, preservasi, konservasi dan perbaikan kualitas ekosistem termasuk mitigasi bencana merupakan langkah operasional pengejawantahan program terpadu. Demikian pula penyadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye, seperti bersih pantai dan laut akan menuai hasil positif dalam pengembangan konservasi laut di daerah.

Transplantasi karang adalah cara lain Widi memberdayakan masyarakat pesisir untuk wisata bahari yang sekaligus bagian dari pengembangan konservasi laut daerah. Suatu ketika di bulan April, misalnya, Pemda Provinsi Bali pernah mengundang Widi untuk turut hadir ke "Pulau Dewata" melakukan transplantasi karang. Kontan Widi menawarkan untuk sekalian saja mengundang Pak Menteri.

BIODATA

Nama : Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D
NIP : 130816210
Karpeg : C 014 2958
Lahir : Surakarta, 16 Agustus 1953
Pangkat : Guru Besar ITS Bidang Teknik Kelautan

Jabatan Fungsional: Guru Besar Fakultas Teknik Kelautan ITS Surabaya

Jabatan Struktural: Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan RI

Terbitan buku: Sembilan (9) judul

Pendidikan:
- S-3 (Ph.D), North Carolina State University, AS, 1992
- S-2 (M.Sc), The George Washington University, AS, 1983
- S-1 (Ir), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, 1979
- SMAN I Magelang, 1972
- SMPN II Magelang, 1969
- SD PERSIT I Magelang, 1966

Penghargaan:
- Mahasiswa Teladan ITS, 1997
- Dosen Teladan FTK-ITS, 1984
- Dosen Teladan FTK-ITS, 1986
- 20 Tahun Mengabdi ITS, 2001

Alamat Kantor: Direktorat Jenderal KP3K, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110

Maka jadilah Freddy Numberi turut terbang ke Bali di akhir pekan itu, melakukan transplantasi karang bersama-sama nelayan dan masyarakat pesisir di Pantai Sanur. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang ramah lingkungan belakangan ini semakin gencar digalakkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan supaya kelestariannya dapat terjaga.

Widi melakukan pemberdayaan komunitas nelayan dengan berangkat pada kultur setempat *(local content).* Titik beratnya pada peningkatan kesadaran akan masalah dan potensi di dalam dan sekitar komunitas. Dukungan dari luar komunitas akan menjadi stimulan peningkatan kesadaran nelayan.

Pada aspek sosial dan budaya Widi telah berhasil mendobrak lemahnya akses modal dan tiadanya kultur kewirausahaan masyarakat nelayan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pun digelar. Misalnya, dia menginisiasi Program Mitra Bahari *(sea partnership program)*, meniru model North Carolina Sea Grant Program yang dilakukan almamaternya North Carolina State University, serta Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM), dimana program ini memfokuskan upaya perbaikan lingkungan permukiman nelayan.

Kemudian, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang khusus untuk mendistribusikan bahan bakar solar (BBM) bersubsidi, banyak didirikan di lingkungan masyarakat nelayan. Sampai-sampai harus keluar Keppres untuk memberi kepastian nelayan memperoleh BBM dengan harga khusus. Saat ini, kapal-kapal nelayan kecil sedang dalam proses sertifikasi oleh Surveyor Indonesia (SI) untuk memperoleh kelayakan untuk diagunkan guna memperoleh modal usaha untuk melaut.

Widi sangat paham laut Indonesia adalah harta karun yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Laut Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati, berisikan 2.000 jenis spesies ikan dan baru 400 spesies yang sudah dimanfaatkan secara ekonomis. Laut Indonesia juga mengandung jenis *crustacean* lebih 1.502 spesies, termasuk 83 jenis udang suku *penaidae* (jenis untuk konsumsi).

Sebanyak 17% genus karang dunia berada di perairan Indonesia, 18% terumbu karang, 30% mangrove, dan padang lamun *(sea grass)* terluas serta jumlah kimia *(giant clam)* terbanyak. Sebanyak 70% produksi minyak dan gas Indonesia dihasilkan dari keberadaan 40 cekungan minyak dan gas total jumlahnya 106,2 miliar barrel, 57,3 miliar barrel diantaranya di lepas pantai dan 32,8 miliar barrel di laut dalam.

Keberadaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dan maraknya transportasi laut dunia merupakan konsekuensi lain dari posisi strategis Indonesia, yang semuanya dapat dimanfaatkan secara ekonomis.

BMKT merupakan benda-benda berharga yang berasal dari semua kapal yang tenggelam di wilayah teritorial Indonesia, yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi yang tinggi sehingga perlu dikelola secara terpadu. Terdapat ribuan kapal yang pernah tenggelam di Indonesia, berasal dari abad-X hingga abad-XIX, tersebar di 463 titik lokasi dan baru 46 titik yang sudah dimanfaatkan.

Widi A. Pratikto sejak tahun 2005 adalah Sekretaris Panitia Nasional (Pannas) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam. Widi ingin Indonesia dapat membangun kekuatan ekonomi di laut demi menjaga "Negeri Bahari" Indonesia.■ HT

Bankir Pelat Merah Tak Usah Takut

Sektor perbankan mendominasi pemberitaan rubrik ekonomi di sejumlah media massa selama Mei 2006.

Hal itu dipicu oleh dua hal. *Pertama,* terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para bankir yang sedang berkumpul dalam Kongres XVI Perbanas, di Jakarta. Dan *kedua,* penurunan suku bunga Bank Indonesia *(BI rate)* 25 basis poin menjadi 12,50% yang menimbulkan optimisme menuju ke arah *single digit*.

Presiden, pada Selasa (9/5) tegas-tegas berpesan agar para bankir membebaskan diri dari intervensi serta tidak mendengarkan pihak-pihak lain yang ingin mencampuri keputusan yang keluar dari logika bisnis.

Kata Presiden, sebagaimana ditulis *Bisnis Indonesia* (10/5), pengambilan keputusan dalam bisnis yang diawali dengan penilaian bisnis adalah bagian dari kewajiban profesional bankir. Apabila meleset jangan serta merta dianggap sebagai korupsi yang harus diadili. Presiden juga memastikan tidak semua kredit macet terindikasi korupsi.

Pernyataan bernada pembelaan terhadap sepakterjang para bankir kontan disambut tepuk tangan meriah oleh para praktisi perbankan yang hadir. Sebab, sangat melegakan terutama bagi bankir pelat merah milik pemerintah. Mengingat kasus yang pernah menimpa mantan Dirut Bank Mandiri, E. C. W. neloe. Mereka menilai kredit macet adalah sebuah risiko bisnis yang pasti dialami semua bank.

Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardoyo, misalnya, menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah kredit macet. Salah satunya kondisi makro ekonomi yang menyebabkan sektor usaha secara keseluruhan mandek. Akibatnya kemampuan membayar cicilan kredit tersendat.

E. C. W. Neloe

"Pernyataan Presiden ini melegakan kami dari ketakutan karena generalisasi tindakan korupsi dalam pencairan kredit. Saya rasa pernyataan ini juga penting untuk memberi kepastian perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya," kata Agus kepada *Media Indonesia*.

Gottfried Tampubolon

Ditanggapi Beragam

Bank Indonesia lima bulan lalu menerapkan suku bunga tinggi 12,75% sebelum akhirnya turun sedikit 25 basis poin. Penurunan ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak.

Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, menyebut penurunan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ia mengidealkan suku bunga BI pada kisaran satu digit supaya sektor riil bisa bergairah dan perbankan bisa mengucurkan kredit.

"Penurunan ini tidak signifikan sebab bunga perbankan masih tetap tinggi. Idealnya suku bunga cukup satu digit agar sektor riil bisa bergairah kembali," kata Fahmi, kepada *Bisnis Indonesia* (11/5).

Sejumlah praktisi perbankan yang dihubungi *Investor Daily* (11/5) sepakat *BI rate* masih bisa diselonjorkan turun lagi 2,5-3,5 persen hingga tiba di level ideal 9-10%. Mereka beralasan selisih suku bunga antara bank sentral AS *(The Fed)* dengan *BI rate* yang saat ini 7,5%, bisa dikurangi hingga 4-5% tanpa perlu khawatir terjadi pelarian modal.

Para narasumber yang dihubungi, Kepala Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa, Head of Preferred Banking Bank Permata Fendi Susiyanto, Chief Economist Bank International Indonesia (BII) Ferry Latuhilin, Kepala Riset Bank BNI Mangasa Sipahutar, serta Direktur Treasury Bank Lippo Tbk Gottfried Tampubolon.

Mereka memastikan dana-dana asing yang masuk Indonesia tidak lagi sensitif terhadap penurunan suku bunga. Bahkan, komposisi dana-dana asing dalam portofolio investasi di Indonesia sangat bagus banyak yang diarahkan ke instrumen jangka panjang.

Terkait penurunan *BI rate* Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengisyaratkan pula menurunkan suku bunga penjaminan 50 basis poin, menjadi 12%. Suku bunga LPS adalah acuan bagi perbankan dalam menentukan suku bunga simpanan.

Saat ini bunga penjaminan dalam rupiah 12,5%, dalam dollar AS 4,75%. Para bankir papan atas memastikan jika suku bunga penjaminan turun ke level 12%, mereka akan segera me-*review* suku bunga simpanan maupun kreditnya. Mereka, antara lain Kepala Eksekutif LPS Krisna Wijaya, Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani, Dirut Bank Lippo Jos Luhukay, Presdir Bank Mega Yungki Setiawan, Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, dan Presdir Bank Niaga Peter B Stok mengungkapkan kepada *Investor Daily*. Saat ini bunga deposito bank-bank besar berkisar 8-10% sementara bunga kredit berkisar 17-19%. ■ HT/AM

Prospek Ekonomi Dalam Sorotan

Indonesia optimis perekonomian nasional memasuki tahun 2007 akan mulai menguat. Kondisi ekonomi global diperkirakan turut memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kinerja neraca pembayaran.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Optimisme itu diiringi dua langkah fiskal yang akan pemerintah lakukan. Yakni, pengendalian defisit APBN dan penurunan secara bertahap rasio utang terhadap PDB.

Perkiraan prospek ekonomi nasional itu mendapat sorotan saat berlangsung rapat kerja Komisi IX DPR RI Senin (15/5), dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Menneg PPN/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Kepala BPS Choiril Maksum, di Jakarta.

Menko Perekonomian Boediono

Menkeu menyebutkan sejumlah asumsi perekonomian nasional pada 2007 versi pemerintah, antara lain ekonomi tumbuh 6,2-6,4%, tingkat inflasi 5-7%, nilai tukar rupiah Rp 9.000-9.200 per dollar AS, suku bunga SBI tiga bulan 8-9%, harga minyak 55-58 dollar AS per barrel, jumlah minyak yang dikapalkan 1,0 juta barrel per hari, dan produksi minyak 1,045 juta barrel per hari.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono usai sidang kabinet Senin (8/5) malam mengumumkan disepakatinya Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2007 untuk diajukan ke DPR. Isinya, proyeksi pertumbuhan ekonomi makro tahun 2007 sebesar 6,4%.

Boediono menyebutkan, patokan pertumbuhan ekonomi didorong oleh faktor kenaikan BBM tahun 2005 dan penerapan kebijakan moneter yang sangat longgar pada semester kedua 2006 yang akan membantu stimulus fiskal.

"Eskpor tiga bulan terakhir meningkat lebih dari 10-15%. Saya mengharapkan 2007 investasi riil akan masuk dan bukan lagi portofolio sehingga kondisi lebih baik," papar Boediono, seperti ditulis koran *Bisnis Indonesia* (9/5).

Kepada harian *Republika* (12/5) Boediono mengakui pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2006 belum beranjak naik meski, bila dibandingkan periode sama tahun lalu sudah ada peningkatan. "Triwulan pertama tahun ini ekonomi tumbuh 4,5-4,7 persen," kutip *Republika*.

Boediono menyebutkan sesungguhnya asumsi semester pertama 2006 ekonomi tumbuh 6,2 persen. Karena ada keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah dan hambatan di sektor riil asumsi harus direvisi menjadi 5,9 persen. Ia optimis, pertumbuhan ekonomi akan bangkit saat memulai triwulan kedua 2006, dan akan semakin kencang di semester kedua.

Ada sejumlah kondisi kondusif yang mendukung optimisme itu. Seperti, penurunan suku bunga secara bertahap, percepatan pengeluaran fiskal, dan kinerja ekspor yang akan tumbuh hingga 13 persen.

Fenomena De-Industrialisasi

Boediono berpesan, Indonesia harus memberikan perhatian khusus terhadap defisit lapangan kerja yang mencapai 500.000 orang pertahun. Ia mengatakan, tambahan lapangan kerja yang tersedia hanya untuk 1,3 juta hingga 1,4 juta orang.

Padahal pertambahan tenaga kerja mencapai 1,8 juta hingga 1,9 juta orang pertahun atau defisit 500.000. Defisit ini mengindikasikan stok pengangguran bertambah terus dari waktu ke waktu dan harus segera diatasi.

Sebagaimana ditulis *Investor Daily* (12/5), kalau kondisi tersebut tetap terjadi, orang tidak percaya kepada eksperimen demokrasi yang selama ini dilakukan. Namun harus diingat juga bahwa demokrasi tidak bisa berjalan sendiri. "Kita sendirilah yang harus menjalankan," papar Boediono.

Boediono cukup terbuka menanggapi kecenderungan deindustrialisasi yang kian memburuk. Fenomena ini berakibat penurunan kontribusi sektor industri terhadap penerimaan domestik bruto (PDB), penurunan investasi di sektor industri, dan anjloknya impor bahan baku dan bahan penolong.

Boediono berjanji pemerintah akan menerbitkan paket insentif untuk membangkitkan kembali sektor industri ini. Isinya, antara lain penghapusan pungutan liar dan peraturan daerah yang kontraproduktif. Pemerintah juga menggarap paket sektor keuangan yang akan memperlancar aspek pembiayaan bisnis dan investasi yang ada di industri. ■ HT/AM

Oleh: Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang*

Syaykh Al-Zaytun

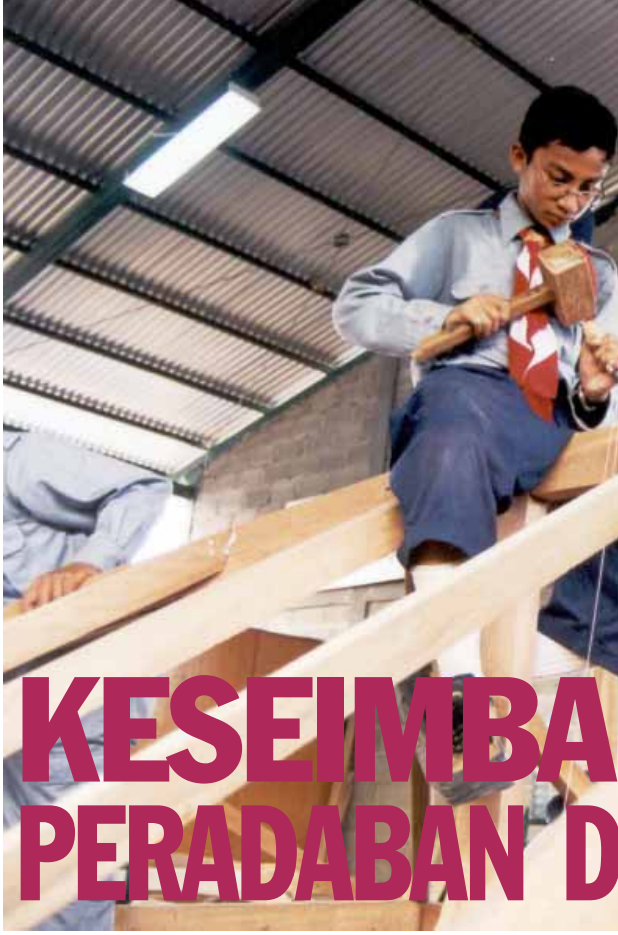

KESEIMBA PERADABAN D

Membangun adalah menciptakan. Maknanya penyingkapan kosmologi sepanjang waktu, untuk menciptakan kemajuan pada level personal maupun sosial, membangun personal-personal yang kuat dan masyarakat yang kuat, menjadi bangsa yang kuat.

Diawali dengan penyingkapan suatu budaya dan merealisasikan budaya itu. Dan karena umat manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, jika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka mereka bukan manusia (makhluk hidup).

Karenanya pembangunan adalah pemenuhan (pemuasan) progresif kebutuhan-kebutuhan alam manusia dan non manusia, dimulai dengan mereka yang paling membutuhkan. Pada makna yang lain pula pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, yang seharusnya tanpa mengorbankan siapapun. Sehingga tercipta perdamaian sebagai kondisi dalam ruang untuk pembangunan tanpa kekerasan.

Maka *setting* pembangunan adalah membangun suatu budaya. Budaya ingin maju, ingin kuat secara individual, masyarakat, dan bangsa, dilandasi oleh budaya dan peradaban yang kokoh masuk ke dalam realisasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehidupan untuk umat manusia dan makhluk hidup lainnya yang non manusia, yang karenanya terciptalah pertumbuhan ekonomi yang merata dalam tataran individual, masyarakat maupun bangsa bahkan bangsa-bangsa di dunia, yang dapat memancarkan perdamaian internal dan eksternal dalam ruang pembangunan tanpa kekerasan.

Indonesia Membangun dari Masa ke Masa

Bangsa Indonesia dari masa ke masa telah masuk ke dalam ruang pembangunan baik secara sadar maupun tidak sadar. Pembangunan secara modern telah diperkenalkan kepada rakyat. *Cultuurstelsel* sejak abad ke-19 (1830) telah diperkenalkan kepada rakyat, dengan regulasi yang sangat ringan dan menjanjikan, namun dalam pelaksanaannya menjadi penyengsaraan rakyat. *Setting* pembangunan dalam *Cultuurstelsel* tidak seperti yang diuraikan dalam pembukaan tadi yakni tidak dilandasi pembangunan budaya rakyat yang ingin maju, ingin kuat secara individual maupun masyarakat, dan bangsa, yang pada gilirannya memancarkan perdamaian dalam ruang pembangunan tanpa kekerasan, namun pembangunannya dilandasi keserakahan dan eksploitasi umat manusia terhadap sesamanya dan penuh kekerasan yang paripurna.

Dilihat dengan menggunakan kacamata pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sangat berhasil, karena pemerintah kolonial ketika itu dapat mengumpulkan devisa ribuan juta gulden sejak pelaksanaan *Cultuurstelsel* (1830-1877) dan Indonesia menjadi negara eksportir kelas 1 untuk hasil-hasil tropis.

Namun, jika dilihat dengan kacamata pembangunan untuk menciptakan kemajuan pada level personal dan sosial, pembangunan dalam konteks *Cultuurstelsel* menciptakan kesengsaraan rakyat secara massal yang tak terlukiskan dalam sejarah Indonesia, apalagi jika ditinjau dari segi hak-hak asasi manusia, pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk *Cultuurstelsel* itu merupakan potret pelanggaran hak asasi yang tiada taranya, tercermin dalam berbagai pemaksaan dan kekerasan fisik dan non fisik dalam bentuk struktural maupun non struktural.

Hal itu terjadi karena orientasi dan filosofi pembangunan yang dianut pemerintah ketika itu adalah terfokus kepada pembangunan yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi *an sich*. Resminya pembangunan gaya *Cultuurstelsel* ini dihentikan, sekalipun dalam praktek masih terus berlanjut sampai dengan awal abad ke-20.

Selanjutnya, memasuki abad ke-20, tahun 1901 haluan politik baru berlaku di Indonesia sebagai tanah jajahan Belanda. Pemerintah (penjajah) merasa wajib untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi penduduk pribumi. Tujuan pokok politik baru ini adalah memperhatikan kemajuan dan perkembangan penduduk serta memperhatikan pengolahan tanah. Dengan demikian, secara teoritis merupakan koreksi terhadap perjalanan pembangunan masa lalu. "Sistem eksploitasi

ANGAN HIDUP DAN PERDAMAIAN

digantikan dengan politik pengajaran yang maju". Orientasi baru ini terkenal dengan *politik etis*.

Haluan politik baru ini akan menentukan arah pembangunan baru. Tumbuhnya haluan baru ini adalah akibat dari pergolakan politik dan perlawanan terhadap penerapan politik kolonial konservatif di Indonesia (Hindia Belanda), sekalipun perlawanan ini datangnya bukan dari anak negeri Indonesia, karena mereka belum mengenal bentuk pendidikan yang maju, namun perlawanan dan pergolakan tersebut dilakukan oleh bangsa penjajah yang memiliki kesadaran etik, oleh kaum intelektual yang merasa bertanggung jawab memperingatkan orang-orang sebangsanya akan bahaya-bahaya dehumanisasi di negara jajahan yang ada hubungannya dengan eksploitasi dan kapitalisme yang mereka lakukan khususnya *Cultuurstelsel.*

Orde Politik Etik ini membagi arah pembangunan kepada dua bagian yaitu segi ekonomi dan segi sosial budaya. Dalam segi ekonomi, arahnya tidak beda dengan politik liberal. Bahwa modal swasta tetap diberi kesempatan luas untuk bergerak di negeri jajahan sedangkan pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman dengan menggunakan pasukan-pasukan dan birokrasinya.

Adapun segi sosial budaya mengarah kepada peningkatan sosial budaya penduduk jajahan sejajar dengan peningkatan budaya orang Eropa. Dimana pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan nilai-nilai budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya Eropa (barat). Trilogi pembangunan di dalam orde ini adalah meliputi bidang irigasi, transmigrasi, dan edukasi.

Pembangunan dalam politik etis ini sangat mempengaruhi perkembangan rakyat dan masyarakat Indonesia dalam memasuki abad ke-20. Tindakan-tindakan pembangunan yang berakibat jauh dalam perkembangan masyarakat Indonesia adalah sistem pendidikan yang diciptakan pemerintah (penjajah). Sistem pendidikan ini mengakibatkan terciptanya suatu golongan baru dalam masyarakat, suatu golongan yang terampil, karena dididik di sekolah-sekolah kejuruan, untuk menjalankan fungsi- fungsi baru yang diciptakan pada awal abad ke-20, dalam bentuk pegawai negeri dalam dinas-dinas seperti pendidikan, pertanian, kehutanan, kesihatan, bank kredit, dan lain-lain, yang diusahakan untuk kemakmuran penduduk. Tindakan dalam politik etis pada awal dekade abad ke-20 ini sangat membawa arti dan lebih banyak nilainya daripada dalam masa 300 tahun sebelumnya.

Pembangunan yang dilakukan dalam politik etis berarti politik penjajahan untuk menghilangkan jurang perbedaan antara penjajah dan rakyat jajahan. Walau akhirnya justru karena kebijaksanaan politik etis ini banyak penduduk pribumi yang berkenalan dengan kebudayaan barat yang justru dipergunakan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah (penjajah).

Pemerintah dengan politik etis sepanjang kekuasaannya selama 42 tahun, menghantarkan Indonesia dan bangsanya mengenal kehidupan ekonomi dan pendidikan modern gaya Eropa, yang selanjutnya menjadi basis perkembangan pembangunan poleksosbud rakyat dan bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaannya di tahun 1945.

Pembangunan selanjutnya adalah pembangunan di masa pendudukan Jepang, sejak Maret 1942 sampai Agustus 1945. Pemerintah pendudukan Jepang menganut pola pembangunan satu ruang yaitu pembangunan kemiliteran, sedangkan yang lain-lainnya melulu merupakan eksploitasi dan kekerasan maupun kekejaman. Dari Jepang bangsa Indonesia mengenal kemiliteran dan kedisiplinannya, yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan kemiliteran Indonesia di masa kemerdekaan.

Datangnya era kemerdekaan Indonesia tidak serta merta membawa bangsa ini masuk ke dalam situasi dan kondisi sejahtera. Mengingat seluruh perjalanan pembangunan yang terselenggara sebelumnya (Belanda maupun Jepang) tidak dilandasi oleh suatu budaya ingin memajukan, menguatkan secara individual, masyarakat dan bangsa Indonesia.

Di samping itu, selama perjuangan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara pemerintah penjajah dan rakyat terjajah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan ketika itu.

Kekerasan, kekejaman, mendapatkan perlawanan dari rakyat dalam bentuk yang sama, di samping pula pendidikan rakyat yang belum merata, mengakibatkan sebagian besar hasil pembangunan yang dilakukan oleh Belanda selaku penjajah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal pada era kemerdekaan.

Euforia kemerdekaan berakibat terciptanya berbagai sikap yang tidak kondusif terhadap perkembangan Poleksosbud. Di bidang pemerintahan terjadi berbagai pergantian kabinet dengan masa kerja yang sangat singkat, dengan hanya hitungan bulan, diakibatkan oleh wujudnya multi partai yang selalu bersengketa. Di bidang ekonomi terjadi nasionalisasi berbagai industri dan perusahaan bekas penjajah tanpa dukungan tenaga yang mampu di bidangnya, yang pada gilirannya membawa akibat mandeknya produksi (paling tidak merosot produktivitasnya).

Dan Indonesia merdeka, mulai membangun kembali di atas sisa-sisa peninggalan Belanda. Di bawah Presiden Soekarno, memulai pembangunan karakter bangsa. Dengan mengedepankan aspek politik sebagai panglima pembangunannya membangun keutuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Meskipun, dengan slogan pembangunan semesta berencana, namun pembangunan selama 20 tahun di bawah Presiden

Soekarno belum menyeimbangkan pembangunan perekonomian rakyat, yang sejajar dengan pembangunan politik.

Politik yang dibangun pada periode ini belum sampai kepada cita-cita dan kehendak rakyat mencapai kehidupan politik yang demokratis, bahkan banyak rakyat Indonesia yang menyikapi Soekarno sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Kesejahteraan rakyat yang disimbolkan dengan pemerataan kesempatan pendidikan, kesihatan, dan kemampuan daya beli, juga belum dikerjakan dengan baik dalam periode pembangunan 1945 -1967 ini.

Periode pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam pemerintahan Soeharto selama kurang lebih 30 tahun itu arah pembangunan menjurus kepada pembangunan ekonomi, dengan dukungan utama dari negara-negara donor yang menganut paham kapitalis yaitu negara-negara Barat. Sepanjang perjalanan pemerintahan Soeharto negara-negara donor tak henti-hentinya memberikan dukungan dana (berupa hutang) bagi pelaksanaan pembangunan yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi secara ketat.

Mazab pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Soeharto sama persis kehendak negara-negara donor Barat, bedanya dalam pelaksanaannya, masyarakat Barat telah terdidik dengan kebiasaan itu, sedangkan rakyat dan masyarakat Indonesia belum memiliki pengalaman dan pendidikan ke arah pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh Barat.

Pembangunan ekonomi yang berjalan sekian panjang dan dengan modal multi milyar dolar itu, justru gagal total pada saat tahapan pembangunan sudah mencapai target waktu yang ditetapkan yaitu pada tahapan yang diistilahkan tinggal landas, yang semestinya menjadi lebih baik karena dasar-dasar tatanan ekonomi telah tersusun dan dilaksanakan mengikut tahapan-tahapan yang telah dibuat. Cita-cita membangun demi kesejahteraan menjadi kocar-kacir bahkan membuahkan krisis dahsyat yang hampir menjadi "dilema".

Pembangunan Indonesia yang orientasinya menjurus kepada pertumbuhan ekonomi dengan waktu panjang itu justru tidak membawa lompatan besar dalam kemajuan ekonomi, namun membuahkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin serta antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan sosial ekonomi itu telah menimbulkan frustrasi, keresahan, bahkan kerusuhan sosial. Indonesia diguncang oleh kerusuhan di berbagai tempat, bahkan ancaman disintegrasi di berbagai wilayah.

Membangun Indonesia selama lebih dari 30 tahun itu justru menyuburkan mental korup pejabat birokrasi pemerintahan maupun pelaksana pembangunan dari segala lapisan. Pemerintah pusat belum berusaha maksimal memberantas korupsi, praktek korupsi terus merebak dengan cara yang canggih maupun asal-asalan yang terselubung di balik sistem birokrasi yang rumit dan tidak terbuka.

Presiden Soeharto selama pemerintahannya telah menetapkan program pembangunan dan melaksanakannya, semua langkah berlabel pambangunan, kabinet dan kementeriannya bernama Kabinet Pembangunan. Namun karena ruang pembangunan yang dilaksanakan hanya terfokus kepada pertumbuhan ekonomi dengan kontrol ketat dan pendekatan *security approach* dan kegagalan pembangunan selama periode pemerintahannyapun penyebabnya adalah mazab pembangunan yang dianutnya, yaitu pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi *an sich*.

Kini, masa dan periode pembangunan yang dilaksanakan

oleh Presiden Soeharto telah selesai dan digantikan oleh presiden-presiden penerusnya. Kita berharap, pengalaman pahit membangun Indonesia yang selama ini dilaksanakan sesungguhnya tidak harus terulang kembali melalui jalan kegagalan yang sama.

Enam tahun setelah pemerintahan Presiden Soeharto usai, Indonesia telah menampilkan 4 orang presiden. Kalau kita amati dengan cermat, tampak jelas, semangat reformasi yang menghantarkan tampilnya para presiden setelah Soeharto, belum masuk kepada reformasi mazab pembangunan Indonesia yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Soeharto yang gagal. Justru para presiden setelah Soeharto cenderung masih mempertahankan mazab pembangunan yang membawa kegagalan itu, yakni mazab pertumbuhan ekonomi.

Membangun Kembali di Masa Krisis

Pembangunan pada prinsipnya merupakan sebuah pendekatan holistik terhadap kondisi manusia, dan pendekatan dinamis, dengan selalu memperhatikan ruang alam, tempat bagi pembangunan itu sendiri, atau setidaknya merupakan keseimbangan yang menjadi landasan kondisi manusia. Juga memperhatikan ruang manusia yang merupakan inti dari pembangunan mental/spiritual. Serta aspek-aspek lain dari ruang sosial dan seluruh ruang dunia.

Pembangunan secara holistik dan dinamis mencakup berbagai ruang interaksi: alam, manusia, sosial, dan dunia, sebagai perubahan-perubahan menuju perbaikan kondisi umat manusia dan kehidupan lainnya. Karenanya holisme dan dinamisme harus menjadi kerangka dasar visi pembangunan.

Interaksi dengan ruang alam maknanya, pembangunan harus mampu mewujudkan aliran keseimbangan ekologi.

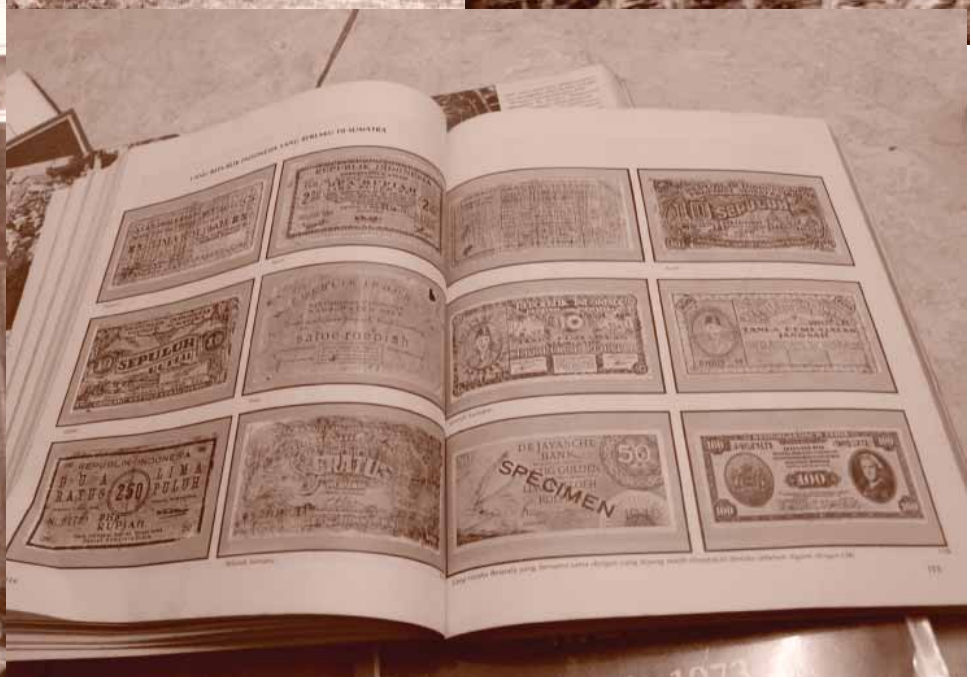

Alam telah ada jauh lebih lama daripada manusia. Alam sebagai sumber pelajaran mengenai holisme, dinamisme, dan keberlanjutan.

Membangun dalam keadaan krisis lingkungan/alam seperti hari ini harus mengalokasikan program-program untuk menata kembali, paling tidak berusaha untuk menyeimbangkan keberadaan alam dengan kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya, agar tercipta aliran keseimbangan ekologi dan keberlanjutannya.

Membangun berakibat wujudnya aktivitas dinamis itu, harus mempunyai budaya pantang: Berpantang dari aksi yang berlawanan dengan alam, artinya juga berpantang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan watak (*sibghah*) segala sesuatu. Karenanya interaksi dengan alam terdapat dua jenis, aktivitas-aktivitas yang selaras dengan alam (*eco-action*) dan ada aktivitas-aktivitas yang berlawanan dengan arus alam (*ego-action*).

Semestinya pembangunan mengalokasikan program penyeimbangan alam itu sehingga menjadi suatu nikmat, dan bukan bencana. Sehingga makhluk hidup tatkala aktivitas alam (dalam hal ini air) datang, umat manusia dapat berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah menurunkan rizki, kami makhluk hidup ini dapat menikmati panen air tahun ini.

Sebaliknya tatkala siklus pergerakan alam sampai kepada aktivitasnya yang mengakibatkan cuaca panas, banyak makhluk hidup terlanda kekeringan, merana, kehausan, kelaparan, paceklik, wabah penyakit, dan lain-lain.

Mestinya pelaku pembangunan mengalokasikan berbagai program untuk menyeimbangkan cuaca panas itu agar tidak menjadi bencana. Musim hujan yang ditunggu-tunggu justru menjadi bencana, dan musim panas yang diharap-harap juga menjadi bencana. Datangnya dua musim itu sudah dapat diketahui, ilmu dan teknologi untuk berinteraksi dengan alam telah ada, kiranya dinamika suara jiwa yang belum tumbuh dalam batin pelaku pembangunan.

Modal yang hangus akibat kekeringan dan busuk oleh rendaman banjir, jauh lebih besar daripada menciptakan jalan keluar dari akibat aktivitas alam tersebut. Menghijaukan lingkungan, bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, namun tidak banyak yang konsisten melakukannya, membuat cekungan-cekungan untuk penyimpanan air bukan sesuatu yang repot untuk dilakukan, namun tidak banyak yang mau memikirkan untuk itu, apalagi melakukannya.

Pembangunan mencakup ruang interaksi manusia, untuk ini ada tradisi medis yang menfokuskan pada kesihatan somatik dan kesihatan mental dan seluruh tradisi religius yang menfokuskan kepada kesihatan dan penyelamatan spiritual. Ruang manusia mencakup tubuh pikiran dan jiwa. Pikiran sebagai pusat emosi, kemauan, dan kognisi, jiwa sebagai pusat refleksi diri, refleksi tentang banyak hal, di antaranya refleksi diri, refleksi tentang kemampuan diri sendiri untuk melakukan refleksi (filosofi), kompleksitas inilah yang akan membentuk kepribadian.

Pembangunan mencakup ruang interaksi manusia maknanya: usaha tanpa henti secara holistik dan dinamis membentuk kepribadian menyangkut dengan individu-individu, masyarakat-masyarakat, bangsa, dan negara. Menyangkut dengan Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seorang bangsa Indonesia yang membedakannya dari orang atau bangsa lain.

Karenanya aktivitas dalam ruang ini adalah aktivitas pendidikan untuk mewujudkan kepribadian individu-individu, masyarakat-masyarakat bangsa Indonesia yang kuat dan sihat, sihat somatik, mental dan spiritual, cerdas, bajik dan bijak, menguasai sains teknologi, cinta bangsa dan negaranya dan mampu bergaul antar bangsa dengan baik.

Kepribadian yang terbentuk melalui pendidikan seperti itulah yang akan dapat menghantarkan individu-individu, masyarakat-masyarakat dan bangsa berkemampuan merawat sistem dalam bentuk aktivitas yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan.

Mudah dilihat betapa bergantungnya semua ini kepada alam. Alam adalah ruang di mana kita istirahat dan aktif. Alam memasok sebagian besar input yang sangat diperlukan, dan menerima (dan mengubah) sebagian output kita. Untuk dapat mengakomodasi, sebagai tuan rumah manusia, alam harus kuat (apalagi jika manusia bertindak sebagai parasit). Dan karena manusia adalah organisme biologis dengan kepribadian-kepribadian, manusia mempunyai kebutuhan lain selain kebutuhan bio. Kebutuhan spiritual manusia.

Di dalamnya mencakup kebutuhan identitas dan kebutuhan akan kebebasan. Dua jenis kebutuhan ini berkaitan secara dialektis. Kebutuhan identitas menuntut titik pasti, segala sesuatu yang di sekitarnya menyebabkan individu dapat membangun dan memperluas persekutuan-persekutuan di atas dirinya sebagai makhluk hidup. Sedangkan kebutuhan

akan kebebasan adalah kebutuhan akan ruang, akan mobilitas somatik, psikologis, dan spiritual akan pilihan, kebutuhan untuk berserikat dan tidak berserikat.

Untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk hidup, berupa kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan akan kesejahteraan hidup maka pembangunan mesti memasuki tataran penghormatan atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia, demokrasi, ekonomi, dan politik yang selalu mengedepankan perdamaian dengan jalan tanpa kekerasan.

Kaitan pelaksanaan hak asasi manusia dengan demokrasi selalu imbal balik, karena semakin banyak hak asasi manusia yang diberikan dan dihormati oleh bangsa, semakin banyak tugas-tugas kemanusiaan yang dapat diminta dari penduduk, seperti untuk pajak dan tugas-tugas pertahanan negara.

Begitu juga, biasanya, makin demokratis suatu negara makin banyak hak-hak asasi manusia diimplementasikan, dan makin banyak HAM diimplementasikan, makin banyak pula tugas kemanusiaan dapat ditunaikan. Membangun pelaksanaan HAM dan demokrasi adalah upaya melembagakan mekanismenya, dan eksistensinya tidak tergantung hanya kepada tingkah sesaat para pemimpin negara/masyarakat.

Membangun demokrasi Indonesia dalam hal ini adalah membangun kepribadian demokrasi Indonesia. Kita tidak harus khawatir dengan progresivitas dan dinamika demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini. Membangun kepribadian demokrasi Indonesia yang kita harapkan adalah membangun dan mewujudkan Indonesia yang demokratis dimana pembuatan keputusan-keputusan secara demokratis, dan semakin demokratis pembuatan keputusan, semakin jauh Indonesia dari sikap suka perang.

Demokrasi Indonesia yang kita harapkan bukanlah kekuatan demokrasi untuk memperbesar persaingan dalam negeri untuk saling merebut kekuasaan, karena semakin besar persaingan untuk merebut kekuasaan, makin besar godaan untuk memperoleh dukungan melalui agresi luar. Demokrasi Indonesia yang kita inginkan adalah Indonesia yang demokratis, yang karenanya Indonesia menjadi negara yang semakin surplus perdamaian dalam negeri, sehingga tersedia banyak kesempatan berdiplomasi antarbangsa. Kepribadian demokrasi Indonesia, bukan negara demokrasi yang para pemimpinnya/rakyatnya merasa benar sendiri, yang karena semakin merasa benar sendiri pemimpin/rakyat, makin suka berperanglah negara itu, bukan itu kepribadian demokrasi kita.

Membangun kepribadian demokrasi (Indonesia) memang bukan suatu pekerjaan sekali jadi, memerlukan ketekunan dan kesabaran, memerlukan perlembagaan mekanisme dan sistem yang terus menerus disempurnakan. Semakin dalam kita memasuki kepribadian demokrasi, semakin banyak kita temukan ragam, semakin banyak ragam yang berinteraksi, semakin kokoh wujud kepribadian demokrasi itu. Dalam hal kepribadian demokrasi (Indonesia) ini, kita dapat saksikan betapa cepat peningkatan sikap otonomi rakyat Indonesia dalam merespon makna demokrasi.

Kendali elit politik hampir-hampir tidak dapat mengekang gerak otonomi mereka, ini adalah modal besar bagi pembangunan kepribadian demokrasi (Indonesia) kini dan mendatang. Dinamika perwujudan kepribadian demokrasi (Indonesia) saat ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran sebagian orang, ada yang menganggap apa yang terjadi dalam kepribadian demokrasi (Indonesia) yang sedang berjalan ini dianggap menimbulkan kekalutan. Dan ia tiba kepada kesimpulan dan mengajak kembali saja ke UUD 1945 yang murni. Itu juga merupakan ragam berdemokrasi, sepertinya ajakan elit seperti itu adalah wajar di dalam ruang demokrasi, namun rakyat selaku pemegang keputusan semakin mengerti dan paham dalam memosisikan otonomi dirinya.

Pembangunan secara holistik dan dinamis tak dapat lepas dari pembangunan ekonomi. Namun pembangunan ekonomi ini tidak merupakan ukuran satu-satunya. Mestinya visi pembangunan ekonomi pada dewasa ini di negara kita tidak terlalu berkiblat pada pertumbuhan, namun lebih menitikberatkan kepada siklus otonomi lokal dengan melibatkan sebesar mungkin partisipasi rakyat yang semakin jelas sosok otonomi dirinya.

Berbasis dari otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi pemerintahan, maka ide dasar pembangunan ekonomi ini adalah mengandalkan pada kemampuan lokal, bahkan swadaya lokal, yang berarti konsumsi lokal atas apa yang diproduksi dan produksi lokal atas apa yang dikonsumsi, maka skalanya kecil, lebih horizontal, melibatkan dan mempersatukan banyak orang, mampu mewujudkan integrasi pekerjaan, rotasi pekerjaan dan rekonstruksi pekerjaan.

Produksi untuk laba atau pemenuhan rencana bukanlah tujuan dalam dirinya (masyarakat mandiri). Unit produksi tipikal menjadi sebuah koperasi yang dikelola sendiri dengan dialog dan keputusan bersama semua orang yang terlibat, termasuk konsumen, produksi pada dasarnya untuk digunakan, bukan dipertukarkan, hubungan dengan mitra dagang bersifat kooperatif, dan hubungan dengan alam menjadi sangat harmonis.

Pembangunan alternatif yang ditawarkan ini adalah sebagai jawaban untuk kehidupan masyarakat yang dilanda krisis, kiranya dalam perjalanannya ke depan, tatkala masyarakat Indonesia ini sudah mulai bangkit, rakyat sudah terlatih dalam kiprahnya sebagai pelaku pembangunan dan bukan sebagai penonton lagi. Kebudayaan umat manusia tidak pernah berhenti dalam sebuah titik besar, selamanya akan terus berkembang selaras dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.

Karenanya kita selaku bangsa besar, tidak boleh berhenti dalam sebuah metoda tanpa evaluasi, sekalipun metoda itu telah membawa kegagalan. Alternatif pembangunan ekonomi (masyarakat mandiri) yang kita uraikan dalam kesempatan ini adalah hasil aplikasi sebuah teori yang sedang kita jalankan dalam lingkungan masyarakat Al-Zaytun, yang mungkin dapat dikembangluaskan ke berbagai daerah, sebab selama masa krisis nasional Al-Zaytun tidak terkena imbas dari krisis itu.

Dan pembangunan seperti ini (masyarakat mandiri), sesungguhnya merupakan usaha memperkecil bahkan menghentikan segala utang luar negeri yang selama ini menyengsarakan dan menjadi beban rakyat yang menjadi penonton pembangunan.■

Menyoal Kebijakan Anggaran Pendidikan

Dr. Deding Ishak Ibnu Sudja

Visi para pendiri negara pada bidang pendidikan sangat ideal seperti tercermin dari salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Tujuan itu adalah mandat yang mesti dilaksanakan oleh penyelenggara negara, melalui pembangunan pendidikan.

Namun, sampai kini, bangsa ini belum menempatkan pendidikan sebagai panglima pembangunan nasional. Anggaran pendidikan yang memadai tidak terwujud karena ternyata para penyelenggara negara secara kolektif tidak meyakini akan manfaat yang dipetik dari pola investasi besar-besaran di dunia pendidikan.

Sektor pendidikan selalu tidak menjadi prioritas dalam setiap penganggaran baik APBN maupun APBD. Padahal, seperti ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bila dikaji dan ditafsirkan lebih mendalam kandungan UUD 1945 itu, ada dua sisi yang harus menjadi titik berat perhatian bangsa Indonesia. Pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Kedua, negara wajib menyukseskan bidang pendidikan melalui tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Bahkan, secara eksplisit ditegaskan, APBN dan APBD harus mengalokasikan anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan.

Dalam tataran implementatif, amanat UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Secara rinci, UU Sisdiknas, pasal 49 menyebutkan, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."

Sejatinya, keputusan politik bangsa ini sangat jelas yakni kemandirian dalam penyediaan SDM. Akan tetapi, keputusan politik ini tidak serta merta terwujudkan karena sebagian besar komponen dana dalam struktur APBN tidak dapat dialokasikan (*unallocated*), yaitu 34% untuk pembayaran utang dan 25% untuk dana perimbangan.

Kondisi ini memang tidak mudah bagi pemerintah karena pembagian alokasi APBN pada dasarnya *zero-sum*, naiknya anggaran pendidikan harus dipahami mengandung risiko berkurangnya anggaran untuk sektor lain.

Sampai saat ini kita berada pada *point of no return*. Pada tahun 2003 saja, anggaran pendidikan sesungguhnya sudah mencapai 17,9% atau 2,1% lagi untuk mewujudkan posisi perubahan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945. Persentase ini diperoleh dari besarnya anggaran Depdiknas plus anggaran pendidikan pada departemen/institusi lain, serta alokasi APBD untuk pendidikan.

Perhitungan angka-angka seperti ini cenderung telah kehilangan wawasan (*lose sight*) terkait dengan fungsi anggaran pendidikan dalam kerangka penguatan daya saing bangsa.

Kesimpulan

Alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 dan UU Sisdiknas adalah keniscayaan dalam kerangka penyiapan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Kemauan politik (*political will*) eksekutif dan legislatif untuk memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti dengan *political action* (tindakan politik) dengan merevisi APBN 2006 yang baru mencapai 9,1% alokasi anggaran pendidikan.

Komitmen alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN pada tahun 2006 perlu diikuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBD.

Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengalokasian anggaran pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan jajaran pengelola pendidikan untuk melaksanakan berbagai kebijakan teknis pendidikan yang berkeadilan, transparan, efektif dan efisien terhadap sasaran-sasaran yang akan dicapai melalui *blueprint* yang jelas dan terstruktur.

Karena itu, partisipasi dan pengawasan publik sangat penting untuk mempercepat pengawasan fungsional dan politis dari legislatif dalam mengelola anggaran pendidikan, sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi kebijakan.

Kita perlu menata kembali cara berpikir dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan sekadar sebagai kumpulan hitungan angka dan persentase, tetapi harus dipandang juga sebagai sarana ampuh mewujudkan kemakmuran bangsa di masa depan.

Membiayai pendidikan memang ibarat berinvestasi. Hasilnya baru bisa dilihat satu generasi yang akan datang. Untuk itu, bangsa ini membutuhkan sikap dan kemauan politik para penyelenggaran negara yang visioner.

Akhirnya, perlu digarisbawahi pula, berapapun besar kenaikan anggaran pendidikan tidak serta-merta menghasilkan peserta didik yang berkualitas apabila pengeloalaan pendidikan tidak profesional, terjadi kebocoran anggaran dan buruknya kinerja pelayanan dari pelaksana kebijakan.■

Dr. Deding Ishak Ibnu Sudja: Anggota DPR-RI Komisi VIII dari Jawa Barat, Ketua Umum PP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), dan Pengelola Lembaga Pendidikan.

SAMSURI

● MBAH MARIDJAN

Sang Buah Bibir di Bibir Merapi

Ia seorang juru kunci atau kuncen Gunung Merapi. Ia mendapat tugas dari (Alm) Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjaga Gunung Merapi dengan gelar Raden Ngabehi Surakso Hargo, karena dianggap lebih memahami seluk-beluk Merapi. Saking taatnya mengemban tugas, ia bahkan dianggap *mbalelo* atau membangkang, karena tidak mau mengungsi saat aktivitas vulkanik Gunung Merapi meningkat.

Minggu-minggu belakangan ini Mbah Maridjan menjadi sorotan dan buah bibir pembaca koran atau penonton televisi. Ada yang *geregetan,* geram, sebal dengan sikap dan alasannya tak mau menyingkir dan mengungsi. Namun, ada juga yang kagum dengan pendiriannya yang kukuh. Padahal tempat tinggalnya di Dusun Kinahrejo, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman hanya berjarak 3 KM dari puncak Gunung Merapi.

Karena sang juru kunci tidak bersedia mengungsi, seluruh Dusun Kinahrejo yang memiliki 77 keluarga dengan 300 jiwa itu juga tidak bersedia untuk mengungsi. Selama Mbah Maridjan belum turun, mereka tidak mau mengungsi. Padahal alasan Mbah Maridjan dinilai tidak kuat unsur logikanya dan keterangan mengenai situasi Merapi juga tidak begitu memuaskan. Ia pun juga membantah disebut paranormal, walaupun rata-rata penduduk desa taat padanya. "*Kulo niki sanes paranormal, kulo niki pikanthuk tugas Kanjeng Sultan ngruwat Merapi* (Saya bukan paranormal, saya mendapat tugas dari Kanjeng Sultan untuk menjaga Merapi) ," tegasnya.

Untuk itulah, ketika merapi 'sedang hajatan' kata Mbah Maridjan harus tetap berada di tempat. Bukan hanya polisi yang berupaya membujuk Mbah Maridjan agar segera mengungsi. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sudah membujuknya, tapi Mbah Maridjan tetap setia pada tugasnya. Ia tetap menolak untuk mengungsi. Alasan Mbah Maridjan adalah karena mendapat amanat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Alm) untuk menjaga Gunung Merapi, melanjutkan tugas ayahnya Mbah Turgo. Ia baru bersedia meninggalkan Merapi jika mendapat perintah dari Sri Sultan HB IX, melalui wangsit, mimpi atau tanda-tanda gaib lainnya. Maka, perintah mengungsi dari Sri Sultan HB X pun tidak diindahkannya.

Tetapi tidak seperti abdi dalem lainnya,

Mbah Maridjan jarang *sebo* (menghadap) ke keraton. Ia berkeyakinan, tugasnya sebagai penjaga Merapi mengharuskannya tidak boleh meninggalkan gunung itu karena akan dianggap menelantarkannya. Apalagi, saat merapi punya hajatan, seperti saat ini.

Sikap abdi dalem berusia 79 tahun ini bukan pertama kali. Saat Merapi 'bergolak' pada tahun 1994 yang menewaskan 43 orang karena awan panas *(wedhus gembel),* ia juga menolak mengungsi. Nyatanya ia dan dusunnya memang selamat dari amukan *wedhus gembel* itu.

Sebagai juru kunci Merapi, pada hari-hari biasa rumah kediaman Mbah Maridjan di Dusun Kinahrejo selalu ramai oleh pengunjung. Rata-rata mereka adalah para pendaki gunung dan pencinta alam. Namun, ada juga yang secara khusus melakukan ritual pendakian. Bahkan jika ada yang dinyatakan hilang saat mendaki, Mbah Maridjan dijadikan petunjuk untuk pencarian.

Rumah juru kunci ini bagai pos tempat pemberhentian. Setiap hari, terlebih hari Sabtu dan Minggu selalu penuh dikunjungi orang. Mereka bebas makan, tidur di pendopo Mbah Maridjan, dengan bekal makanan dan minuman yang mereka bawa sendiri.

Merapi Hajatan

Berbagai bujukan aparat dan pemerintah agar dirinya segera 'turun gunung' tak diindahkannya. Ia yakin tidak akan terjadi sesuatu dengan desanya. Karena sejak tahun 1960-an arah letusan Merapi selalu tertuju ke arah Barat, atau ke Kali Krasak di perbatasan Magelang.

"Ada beberapa alasan kenapa saya enggan mengungsi. Pertama, saya tidak ingin tamu-tamu kesulitan mencari saya di pengungsian. Tamu saya banyak," ujar laki-laki dengan 11 cucu ini. Namun, alasan yang paling penting adalah karena dirinya mendapat tugas untuk tidak menelantarkan Merapi.

'Bahasa' Merapi ditangkapnya dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, ia tidak mau menyebutkan *'Merapi Meletus'* atau *'wedhus gembel'.* Situasi Merapi sekarang ini dikatakannya sebagai Merapi sedang *ewuh,* sedang hajatan, yaitu membangun diri. "Kalau Merapi"*mbangun* maka kita semua harus *mbangun* kesabaran. Hatinya suci, *mbangun* mental dan mengurangi macam-macam," katanya seperti dikutip *Kompas.*

Untuk itu, ia tidak mau meninggalkan Merapi di saat sedang hajatan. Ia membantu, memelihara dengan berdoa pada Yang Maha Pencipta. Ia menjalankan *lelaku* spiritualnya. Mbah Maridjan tetap setia, berada di tempatnya, sambil terus berpuasa mutih tiap hari, yaitu puasa minum air tawar dan hanya makan sekepal nasi dan singkong tanpa garam atau gula. Tiap sore hari, ia selalu wiridan dan malam harinya dilanjutkan laku dengan mengelilingi desa. "Kami selalu berdoa memohon keselamatan untuk semua orang," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa yang penting hendaknya semua orang berdoa dan jangan sampai mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Mbah Maridjan mengingatkan hendaknya orang jangan terus mengisyaratkan atau mengatakan Merapi akan meletus. Jika selalu didengung-dengungkan, maka hal ini akan menjadi kenyataan. Ia juga meminta untuk tidak menyebut awan panas dengan istilah *wedhus gembel,* karena istilah itu sangat jelek. "Jadi, semua harus pasrah kepada Allah," lanjutnya.

Abdi Yang Taat

Keteguhan Mbah Maridjan untuk tidak meninggalkan desanya sempat membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X geram. Gubernur DI Yogyakarta itu menegaskan lagi bahwa dirinya tidak akan menggunakan statusnya sebagai raja Keraton Yogyakarta untuk memerintahkan evakuasi warga lereng Merapi. Selaku Gubernur, ia sudah mengeluarkan perintah evakuasi. "Mbah Maridjan dan warga yang tidak mau dievakuasi itu mau menunggu wangsit apa lagi?"*Wong* sudah jelas itu membahayakan. Makanya, saya sarankan warga jangan mendengarkan penyataan-pernyaan seperti itu," kata Sultan bernada tinggi.

"Sebagai juru kunci, tidak selalu harus menunggu di rumahnya. Sekali pun pergi ke Jakarta, atau ke Amerika, tetap akan disebut juru kunci. Saya minta Mbah Maridjan tunduk pada pemerintah," ujar Sultan. Tapi, tetap Mbah Maridjan tak bergeming. Bahkan ketika mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid mencoba membujuknya via telepon, Mbah Maridjan menjawab, "*Mboten wonten nopo nopo. Kulo tetep mboten ngungsi* (Tidak ada apa-apa. Saya tetap tidak mengungsi)," katanya.

Dengan sikap itu Mbah Maridjan dianggap sebagai orang yang membangkang dan tidak tunduk pada pemerintah. Namun, sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr. Riswandha Himawan menilai bahwa keteguhan Mbah Maridjan adalah bentuk ketaatan sebagai seorang prajurit yang menjalankan perintah Sri Sultan HB IX. Mbah Maridjan diminta Sri Sultan HB IX untuk menjaga Merapi guna keselamatan warga Yogya. "Jadi, jangan dipandang sebagai seorang yang *mbalelo,*" katanya.

Lanjut Riswandha, jika saat ini Mbah Maridjan melakukan wiridan dan laku malam ketika Merapi sedang naik aktivitasnya, maka ini dipahaminya sebagai cara menyelamatkan orang-orang dari 'amukan' Merapi. "Kalau ia mengungsi, pengertiannya adalah kalah, menyerah tak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit yang diperintahkan menjaga Merapi," ungkap Riswandha yang dikutip *Sinar Harapan.*

Sementara itu, jika ada warga yang tidak mau diungsikan, itu semata-mata karena mereka tidak mau jauh dari tempat biasa mereka mencari mata pencaharian. Dalam pemikiran para penduduk itu, menurut Riswandha, saat ini Merapi sedang bersih-bersih. Nah, ketika bersih-bersih itu memberikan rezeki pada warga sekitar lereng Merapi. Yakni berupa pasir yang jumlahnya bisa ribuan ton.

Setiap aktivitas Merapi meningkat, selalu terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang tinggal di lereng Merapi. Pertentangan ini akan terus berulang, maka menurut Riswandha untuk menyelesaikannya perlu memakai pendekatan kearifan budaya lokal. Ya, fenomena Mbah Maridjan adalah fenomena Merapi itu sendiri. Ia telah menjadi *spirit of Merapi* dan *The Man of The Mount.* ■ AD

B • I • O • D • A • T • A

Nama	:	Mbah Maridjan
Umur	:	79 tahun
Gelar	:	Raden Ngabehi Surakso Hargo
Jabatan	:	Juru Kunci Merapi sejak 1974 yang diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Alm)
Anak	:	4 anak dengan 11 cucu
Alamat	:	Dusun Kinahreja, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman

Tantangan di Tengah Minimnya Anggaran

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kepentingan nasional Indonesia sangat dominan berada di laut. Untuk itu membutuhkan biaya besar dan teknologi tinggi. Sementara kebijakan anggaran pembangunan aspek kelautan masih relatif kecil. TNI AL perlu dukungan yang sebanding dengan beban tugasnya.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia, dengan ribuan gugusan pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis ini membuat kepentingan nasional Indonesia lebih dominan berada di laut. Namun demikian untuk mengamankan dan memanfaatkan sumber daya di laut membutuhkan biaya besar dan teknologi tinggi. Sementara kebijakan anggaran pembangunan aspek kelautan masih relatif sangat kecil.

Dalam kondisi yang serba terbatas tersebut TNI AL sebagai pengawal utama di laut dituntut mampu mengamankan dan menggali potensi yang ada guna menunjang perekonomian nasional. Namun dengan keterbatasan yang dimilikinya, TNI AL merasa belum optimal untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Slamet Soebijanto pada Seminar dan Workshop tentang Keamanan Nasional, Rabu (17/5) di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur.

Seminar yang berlangsung selama dua hari itu bertemakan *"Penegakan Kedaulatan di Perairan Indonesia Untuk Mewujudkan Keamanan Nasional Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Nasional di dan atau Lewat Laut"*. Acara tersebut diikuti 110 peserta yang terdiri dari Komisi I DPR RI 3 orang, TNI AL 44 orang, TNI AD 1 orang, TNI AU 1 orang, BAIS 1 orang, Instansi Sipil/Pemerintah 34 orang dan 20 orang dari Perguruan Tinggi. Seminar ini bertujuan untuk menyusun masukan naskah kajian yang akan menjadi bahan masukan kepada Departemen Pertahanan dalam penyempurnaan RUU Keamanan Nasional.

Menurut Kasal, ada beberapa kegiatan atau tindakan yang dapat mengganggu kepentingan nasional bangsa Indonesia di laut. Diantaranya tindak pidana perompakan/pembajakan, tindak pidana perikanan, tindak pidana benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di dasar laut (benda cagar budaya), tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pelayaran, tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana pasir laut, tindak pidana di ZEEI, tindak pidana terorisme dan pelanggaran wilayah.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis akhir-akhir ini, penegakan keamanan menjadi semakin rumit dengan meningkatnya kualitas kejahatan yang tidak lagi mengenal batas wilayah negara atau *trans-nasional organised crime* (TOC). "Dari delapan kategori kejahatan lintas negara, lima diantaranya terjadi di dan lewat laut. Seperti peredaran obat terlarang, penyelundupan/perdagangan manusia, perompakan, penyelundupan senjata dan terorisme. Sedangkan tiga kategori lainnya adalah pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan *cyber crime*," kata Laksamana TNI Slamet Soebijanto.

Dikatakannya TNI AL sendiri memiliki persepsi bahwa laut harus aman dari empat aspek ancaman, yaitu ancaman kekerasan, bahaya navigasi, ancaman sumber daya laut, dan pelanggaran hukum. "Mengacu kepada persepsi tersebut menjadi jelas bahwa untuk menciptakan keamanan nasional, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integral serta menyangkut upaya dan usaha multisektoral yang melibatkan banyak instansi," sambungnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM A.A Oka Mahendra, SH mengungkapkan, TNI AL dipandang perlu melakukan pemantapan kelembagaan dan peningkatan kapasitasnya dalam rangka melaksanakan peran sebagai pengawal keamanan nasional di laut. Dalam rangka memantapkan peran TNI AL di bidang pemeliharaan keamanan di laut, perlu dilakukan peningkatan perannya di bidang penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional secara proporsional, di samping perannya di bidang matra laut. Untuk itu kelembagaan TNI AL perlu disesuaikan dengan semakin berat dan luasnya bidang tugas yang dihadapi serta kompleksitas permasalahannya. Selain itu peningkatan kapabilitas TNI AL di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional hendaknya mendapat prioritas.

"Dalam kaitan ini peningkatan profesionalisme dan integritas TNI AL, didukung oleh sarana dan prasarana pelaksanaan tugas yang lebih memadai serta kesejahteraan TNI AL perlu mendapat perhatian yang lebih serius, mengingat beratnya tugas yang diemban," lanjut Oka. ■ SB

Dankormar Resmikan Puslatpur Antralina

SEBUAH bangunan baru berdiri megah di atas tanah seluas 1.250 meter persegi. Di pintu gerbangnya tertulis 'Puslatput Korps Marinir'. Letaknya di Jampang Tengah Sukabumi Jawa Barat, di kawasan seluas 125 hektar itulah para prajurit marini kelak dilatih dan ditempa kemampuan tempurnya untuk menjadi kuat, professional dan dicintai rakyat.

Dalam sejarah marinir sebelum Gatot Kaca terlahir sebagai ksatria gagah perkasa, dia digodok terlebih dahulu di Kawah Candradimuka, kepadanya dibekalkan berbagai kesaktian dan jiwa ksatria. Saat dia terlahir maka kemampuannya yang handal telah siap digunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan Adipati Karno pun merasa gemas karena sulit mengalahkannya, sampai terpaksa menggunakan senjata tanpa tandingnya yaitu Panah Pasopati, yang semestinya akan dia gunakan untuk melawan Arjuna dalam Barata Yudha nanti, akhirnya Gatot Kaca gugur. Namun berkat jasanya maka hilanglah senjata pamungkas Adipati Karno, sehingga dia bisa dikalahkan Arjuna.

Korps Marinir memerlukan'"Kawah Candradimuka" untuk menggodok prajurit-prajuritnya agar memiliki tingkat "kesaktian" yang handal sebagai prajurit Amfibi yang harus mampu bertempur dimana saja seperti Gatot Kaca. Oleh karena itu diperlukan adanya Pusat Latihan Pertempuran (PLP) untuk menajamkan naluri tempur Prajurit Korps Marinir.

Di wilayah Jakarta, sangat sulit mencari daerah latihan yang memadai, akibatnya Korps Marinir kekurangan tempat latihan. Komandan Korps Marinir, Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin, S.IP. pada tanggal 1 Juni 2006 meresmikan Pusat Latihan Pertempuran Antralina di Sukabumi menjadi tempat latihan prajurit Korps Marinir wilayah Jakarta agar kegiatan berlatih prajurit Korps Marinir tetap bisa berjalan sehingga "kesaktian" prajurit Korps Marinir tetap terjaga dan siap selalu untuk tugas apapun dan dimanapun.

Sebelumnya Dankormar juga membuka Latihan Pemantapan Regu Pandu Tempur Korps Marinir, yang diikuti ratusan prajurit yang akan berlangsung selama 45 hari.

"Ywa Naryana Puspita" yang berarti Kami adalah Pahlawan yang membawa keharuman bangsa, adalah semboyan yang tertulis di Tunggul PLP Antralina.

Dengan demikian diharapkan prajurit Korps Marinir yang dilatih di PLP ini senantiasa harus siap untuk mengharumkan bangsa. *"Berlatih berlatih dan berlatih, Sekali Marinir Tetap Marinir, Jalesu Bhumyamca Jayamahe"*.■ SB

Panglima TNI Menerima Kunjungan Dubes Inggris

PADA saat menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia beberapa waktu lalu, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto (8/5), mengatakan, sampai saat ini TNI telah dan akan terus melanjutkan reformasi internal. Dalam melaksanakan reformasi ini tidak ada tekanan dari luar tetapi reformasi ini berlangsung karena kesadaran internal TNI dan sesuai dengan kehendak rakyat. Saat ini TNI berada pada jalur yang benar. Arah reformasi TNI telah diakui dan didukung oleh negara lain.

Selanjutnya Panglima TNI mengatakan bahwa TNI juga melaksanakan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan tugas sesuai tuntutan perkembangan yang ada. Dalam menghadapi berbagai persoalan sosial TNI lebih mengedepankan Operasi Militer selain perang yaitu dengan melaksanakan Bhakti Kemanusiaan.

Kunjungan Duta Besar Inggis untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama kedua negara khususnya dalam bidang Hankam dan sekaligus akan mengundang Panglima TNI ke Inggris untuk menghadiri Pameran Kedirgantaraan Farnborough.

Peningkatan kerja sama di bidang Hankam diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan latihan, Counter Terorisme dan pengamanan perairan. Minggu lalu telah diberangkatkan 1 Tim dari Inggris dan 1 Tim dari Indonesia untuk pertukaran dalam bidang latihan dan juga persiapan pendidikan di Lemhannas Inggris.■ SB, WL

Lokakarya Pulau-pulau Terluar

DENGAN senyum ceria Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo secara resmi melepas pemberangkatan peserta lokakarya Pulau-pulau Terluar. Pelepasan itu ditandai dengan melepas tali tros KRI Tanjung Nusanive-973 Minggu Sore (21/5) dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan instansi terkait dan TNI Angkatan Laut. Berlangsung dari 21 sampai 25 Mei 2006. Menteri Dalam Negeri Mochamad Maruf, Minggu (21/5), secara resmi membuka acara tersebut dan sekaligus memberikan pembekalan kepada para peserta.

Hadir pula antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto, Sesmenko Polhukam Laksamana Madya TNI Djoko Sumaryono, Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Adi Prabawa, S.IP, MM dan pejabat departemen terkait lainnya.

Lokakarya tersebut mengambil tema *Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar Melalui Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air*. Latar belakang lokakarya itu antara lain kenyataan bahwa pulau kecil terluar memegang peranan penting dalam menunjukkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Juga terbatasnya pemahaman penduduk pulau-pulau terluar tentang pemerintahan dan pembangunan Indonesia.■ SB

Curhat Mencari Jatidiri Bangsa

Dua peristiwa menonjol menandai peringatan 61 tahun Hari Lahir Pancasila (1 Juni 1945-1 Juni 2006).

Pertama, Pidato Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Ke-61 Hari Lahir Pancasila di Jakarta Con vention Center, Kamis (1/6/2006). Situs internet Tokoh Indonesia (www.tokohindonesia.com) memaknai pidato berjudul "Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila" ini sebagai Pandangan Presiden SBY tentang Pancasila.

Pancasila yang dimaksud Presiden adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi terbuka, bukan dogma statis yang menakutkan. Presiden, yang mengajak penyelenggara negara menata kembali kerangka kehidupan berbangsa, berpandangan, Pancasila masih tetap relevan dan juga masih tetap menjadi kerangka dan sumber inspirasi dan solusi menghadapi permasalahan kebangsaan dewasa ini.

Presiden mengatakan, kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena, bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis.

Sebelum pidato Presiden advokat senior Todung Mulya Lubis membacakan Maklumat Keindonesiaan hasil deklarasi 17 tokoh. Dalam Maklumat Keindonesiaan disebutkan, Pancasila bukanlah wahyu dari langit. Ia lahir dari jerih payah dalam sejarah. Ia tumbuh dari benturan kepentingan, sumbang-menyumbang gagasan, saling mendengar dalam bersaing dan berembuk. Ia mengakui perbedaan manusia dan ketidaksempurnaannya. Ia tidak menganggap diri doktrin mahabenar. Tetapi justru itulah sebabnya kita menegakkannya, sebab kita telah belajar untuk tidak jadi manusia yang menganggap diri mahabenar.

Gumilar R Soemantri, Ketua Panitia menyebutkan peringatan ke-61 lahirnya Pancasila dilakukan atas dasar kerisauan akan tanggalnya visi bangsa ke depan dan menipisnya rasa"'kekitaan" sebagai Indonesia yang majemuk, berbeda tetapi tetap satu.

Curhat Budaya

Peristiwa *kedua* "Curhat Budaya & Karnaval Budaya Pancasila Rumah Kita", diselenggarakan oleh Aliansi Bhineka Tunggal Ika, berlangsung di Hotel Nikko, Jakarta 1-2 Juni. Sejumlah tokoh turut dilibatkan memberikan curahan isi hatinya (curhat) untuk menjadikan Pancasila "rumah kita" yang menyejukkan.

Acara dilanjutkan pada hari Sabtu 3 Juni pawai karnaval budaya bermula dari lapangan parkir Taman IRTI Monas, menuju Semanggi, lalu berputar arah dan diakhiri acara puncak di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Aliansi Bhineka Tunggal Ika mengusung bendera "Menolak Penyeragaman Budaya." Namun Ketua Panitia Ratna Sarumpaet menyebut acara curhat tak dimaksudkan untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).

Akan tetapi tercetus juga pernyataan isi hati Ratna, saat menanggapi curahan hati seorang peserta, bahwa banyak pihak yang menolak RUU APP tak memahami apa isi dan substansi RUU yang sesungguhnya. Demikian pula mereka yang mendukung, belum mengerti penuh dan membaca pasal demi pasal.

Ratna menyebutkan wajar setiap gejala perilaku yang diperkirakan akan merusak perlu segera dilindungi dengan membuat undang-undang. Namun ada dua pasal dalam RUU APP yang membuat rasa kemanusiaan Ratna tergores, yakni bunyi pasal yang menyebut larangan menyetubuhi mayat dan binatang.

Ratna bertanya, sudah sedemikian parahkah kecenderungan perilaku masyarakat Indonesia, hingga bunyi larangan itu harus dimunculkan. Ratna menyerukan semua peserta untuk ramai-ramai menyurati lembaga DPR RI, sebagai bahan pertimbangan apakah akan mengesahkan atau menolak RUU APP.

Budayawan Toety Herati saat curhat menyebut sudah pas menempatkan ideologi Pancasila sebagai 'rumah kita'. Pancasila tak perlu disakralkan, dan Pancasila bukan telah gagal dalam pelaksanaan tetapi kita semualah yang telah gagal mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan berbentuk materiil tetapi imajinasi kita untuk membentuk wawasan dalam memandang cita-cita sebagai sebuah bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara, kata Toety merupakan pusat orientasi budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman budaya. Itulah keunikan bangsa kita bila dibandingkan dengan negara lain, yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dari keanekaragaman, agama, budaya, bahasa, suku atau adat istiadat.

Kepada Amron Ritonga dari *Berita Indonesia* Toety menyebutkan, dirinya sangat mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan atas keberagaman budaya bangsa Indonesia ini. ■ HT/AM

Prioritaskan RUU Administrasi Pemerintahan

Hambatan antrean panjang pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI tak menyurutkan langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Taufiq Effendi, bersuara keras meminta agar pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan (AP) mendapat prioritas dari anggota Dewan.

Ia malah meminta dukungan masyarakat luas, termasuk pers supaya RUU AP dapat segera dibahas dan diundangkan. Alasannya, sebagai hukum materiil UU AP sangat mendasar menjamin kepentingan masyarakat dan menjamin tidak ada kesewenang-wenangan para pejabat.

Taufiq Effendi

Kata Taufiq, selama ini penetapan dan tindakan pejabat penyelenggara administrasi pemerintahan lebih didasari oleh kekuasaan yang melekat pada kewenangan yang bersangkutan sebagai pejabat pemerintahan.

Implikasinya, pejabat pemerintah lebih aman menggunakan diskresi dalam penetapan keputusan dan kebijakan, yang berakibat individu dan warga negara belum diperlakukan secara baik sesuai kedudukan sebagai pemilik kedaulatan.

Taufiq Effendi yang berbicara kepada pers di Habibie Center, Jakarta Selasa (12/5) mengatakan, RUU AP bila disahkan akan menjadi dasar hukum bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan dan tindakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

RUU AP juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersahabat, bersih dan berwibawa, mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan bersifat preventif sejak perencanaan penetapan keputusan pejabat administrasi pemerintahan.

Nomor Urut 75

Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai semua tindakan hukum dan tindakan materiil administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pejabat administrasi pemerintahan, serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUU AP memuat 10 bab dan 45 pasal. Bila sudah disahkan, UU AP membutuhkan tiga buah PP sebagai penjabaran yaitu PP tentang Diskresi, PP tentang *Standard Operating Procedure* (SOP), dan PP tentang Pengajuan Keberatan dan Upaya Administratif.

Oleh Baleg DPR RUU AP sudah diberi nomor urut pendaftaran 75. Kata Taufiq, bila dalam setahun DPR hanya bisa menyelesaikan 10 RUU berarti pembahasan hingga tahun 2009 belum rampung sebab membutuhkan waktu tujuh tahun.

Inilah yang membuat Taufiq gundah. "Ini membutuhkan betul-betul dorongan dari Habibie Center dan dari seluruh masyarakat agar *mbok* ini diprioritaskan, begitu juga para wartawan yang bisa membawa opini para masyarakat," ujar pria asal Kalimantan Selatan, yang menyebut RUU AP sangat ditunggu oleh rakyat. Kata Taufiq, RUU AP membutuhkan opini publik kalau memang kita memperhatikan rakyat, sebab kandungan isi dan tujuannya sangat membela rakyat.■ HT

Tujuh Tujuan RUU AP

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Menciptakan kepastian hukum.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
4. Menjamin akuntabilitas pejabat administrasi pemerintahan atau badan.
5. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah.
6. Menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Taufiq Ciptakan *Best Practices*

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi mengatakan, orang bisa dengan serta merta mengatakan reformasi birokratisasi belum jalan, dan tidak ada langkah-langkah apapun yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Pelayanan publik masih sangat buruk padahal Indonesia merdeka sudah 60 tahun.

Kata Taufiq reformasi birokrasi memiliki dua hakekat. *Pertama* perubahan *mindset,* dari mengutamakan wewenang menjadi mengutamakan peranan, mengubah sikap penguasa menjadi pelayan masyarakat dimana yang hanya ada di kepala seorang pelayan adalah menyenangkan hati majikannya dalam hal ini masyarakat, dan tidak hanya berpikir *output* tetapi lebih mengutamakan *outcome*. Hakekat *kedua*, membangun tata pemerintahan yang transparan *(clean government)* berbasiskan kinerja.

Selama menjabat Menteri, kata Taufiq, ia tidak melakukan pembenahan secara sektoral A B C D E F atau kelembagaan dan personil sebab pasti tidak akan sampai. Tetapi justru menerapkan filosofi pendiri Habibie Center, yakni Prof. Dr. Ing- B.J. Habibie saat membangun kamandirian penguasaan teknologi pesawat terbang 'Bermula dari Akhir dan Berakhir dari Mula".

Taufiq membangun yang namanya *best practices* sebagai tempat percontohan reformasi birokratisasi seperti di Solok, Parepare, Donggala, Sragen, Sidoarjo dan Jembrana.

Di Sragen, misalnya, sekarang pajak naik 250 persen, PAD naik 600 persen, investasi tahun 2005 Rp 996 miliar kemudian tahun 2006 Rp 400 miliar. Di sana penyuluh pertanian bekerja dari pagi sampai pagi lagi, rumah sakit juga demikian. Sebagai percontohan Kabupaten Sragen sudah dikunjungi 232 kabupaten. Bahkan 12 kabupaten di wilayah Jawa Tengah sudah meniru Sragen. Di Jawa Timur lebih dari 100 tempat pelayanan publik menggunakan ISO 9000.

Hasil lain reformasi birokratisasi, bila tahun 2004 pembayar pajak menurut fiskal hanya 2.000.800 orang, sekarang sudah lebih dari 11 juta. ■ HT

Duka Nestapa di Yogya

Indonesia kembali berduka. Ribuan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat tertimpa reruntuhan rumah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengantisipasi terjadinya gempa.

Sabtu (27/5) pagi pukul 05.53 WIB bencana melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter itu tak mengenal ampun. Hanya dalam hitungan detik, ribuan rumah roboh, rata dengan tanah. Menimbun penghuninya yang sebagian besar masih tidur lelap. Tak pelak, musibah itu merenggut ribuan jiwa dan menyebabkan ribuan orang lainnya cedera.

Walijo (33 tahun) terbaring lemah di RSUD Jebungan, Bantul. Warga Desa Patalan, Kecamatan Jetis ini berhasil diselamatkan dari bongkahan tembok dan genting yang menimpa dirinya. Pria ini dirawat karena mengalami patah tulang dan luka-luka. Namun lebih dari itu, dia harus merasakan duka nestapa yang berkepanjangan. Sebab empat anggota keluarganya tewas akibat gempa dahsyat. Yakni isterinya, Legiyem (30), kedua anaknya, Adi (8) dan Novi (5) serta ibunya, Ny.Karti (70) tewas tertimbun reruntuhan rumahnya yang nyaris rata dengan tanah. Keluarga ini merupakan bagian dari ribuan warga yang menjadi korban gempa di Yogyakarta. (*Indo Pos,* 29/5).

Kepanikan warga akibat gempa semakin menjadi dengan munculnya isu tsunami. Mereka berhamburan berlari menyelamatkan diri. Tak peduli lagi dengan warga yang terluka, sekarat dan memerlukan pertolongan.

"Saya takut, kabarnya ada air yang mau datang ke sini," ujar seorang kakek warga Krangkungam Condongcatur yang ikut berlari dengan napas tersengal-sengal. Kepanikan warga masyarakat ini akhirnya berhasil ditenangkan aparat. Melalui pengeras suara, berulang-ulang diumumkan bahwa tidak benar terjadi tsunami.

Berdasarkan pemantauan Stasiun Geofisika Badan Metreologi dan Geofisika Yogyakarta, gempa tektonik ini berpusat di lepas pantai Samudra Hindia. Posisi episentrum pada koordinat 8,26 Lintang Selatan dan 110,33 Bujur Timur, atau pada jarak 38 km selatan Yogyakarta pada kedalaman 33 km.

Seperti diberitakan *Kompas* (28/5), gempa di Yogyakarta ini merupakan bencana alam terbesar setelah gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 lalu yang menewaskan 170.000 orang. Kabupaten Bantul merupakan daerah yang paling parah. Lebih dari tiga ribu penduduknya tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Sebagian besar rumah di sini roboh dan hampir rata dengan tanah. Sementara di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah korban tewas mencapai 1.672 orang dan 1.800 orang cedera dan dirawat di rumah sakit. Korban terbanyak ditemukan di Kecamatan Gantiwarno, Wedi dan Pram-

banan.

Menurut *Media Indonesia* (1/6), data yang diterima Departemen Sosial, sampai hari kelima (31/5) menyebutkan, korban tewas mencapai 5.846 orang. Dengan rincian Kabupaten Bantul 3.580 orang, Sleman 326 orang, Gunungkidul 69 orang, Kota Yogyakarta 165 orang, Kulon Progo 26 orang, Klaten 1668 orang, Boyolali 3 orang, Magelang 3 orang Purworejo 5 orang dan Sukoharjo satu orang. Sedangkan korban yang luka berat 17.515 orang dan luka ringan 5.216 orang.

Bencana ini juga mengakibatkan 48.873 rumah penduduk rusak total dan nyaris rata dengan tanah serta 56.559

rumah lainnya mengalami kerusakan. Selain itu 36 bangunan rumah ibadah, 23 unit sekolah dan 31 bangunan milik pemerintah juga rusak. Menurut Satkorlak Penanggulanan Bencana Yogyakarta, jumlah korban dan kerusakan kemungkinan masih bertambah.

Selain rumah penduduk, beberapa situs juga mengalami kerusakan. Seperti Bangsal Traju Mas di Kraton atapnya roboh, Taman Sari yang pernah direhab dindingnya retak-retak. Demikian pula Candi Brahma di komplek Candi Prambanan, Klaten mengalami kerusakan serius.

Bencana gempa ini membuat Yogya bagaikan kota mati. Kegiatan ekonomi lumpuh total. Kerusakan juga menimpa infrastruktur listrik, telekomunikasi dan berbagai fasilitas umum lainnya. Praktis

sepanjang hari Sabtu dan Minggu lalu pusat pertokoan seperti kawasan Malioboro dan sekitarnya tutup total. Bandara Adisutjipto juga mengalami kerusakan. Terminal domestik roboh dan menewaskan dua orang. Bandara ini dinyatakan tertutup bagi penerbangan komersial dan dialihkan ke Adisumarmo, Solo atau ke Bandara A. Yani, Semarang. Bandara Adisutjipto hanya digunakan untuk pesawat yang akan memberi bantuan dan terbatas pada jenis pesawat Hercules.

Rumah Sakit Kewalahan

Banyaknya korban menyebabkan rumah sakit kewalahan menerima pasien. Mereka terpaksa dibaringkan di lorong dan selasar rumah sakit. Bahkan di tenda-tenda di halaman rumah sakit yang sengaja didirikan untuk menampung dan merawat para korban. Beberapa rumah sakit mengaku kewalahan. Tidak saja karena keterbatasan tenaga medis tetapi juga stok obat-obatan yang menipis. Keluhan akan kurangnya obat-obatan ini antara lain disampaikan pihak RS Panti Rapih, Bethesda, dan PKU Muhammadiyah.

Koordinator Unit Gawat Darurat RSUP Sardjito, Dr Widodo mengatakan sampai hari Minggu (28/5) belum ada bantuan obat-obatan. Padahal pasien yang datang tidak berkurang jumlahnya. Belum lagi banyak pasien yang membutuhkan operasi dengan segera *(Republika, 29/5)*. Kebutuhan obat-obatan yang paling mendesak adalah botol infus, gipsum, suntikan anti tetanus, pena kateter dan obat pengurang rasa sakit.

Setelah bencana ini, RSUP Sardjito melakukan operasi besar terhadap 126 pasien. Kebanyakan adalah operasi bedah tulang, bedah perut dan dada.

Bencana ini menggugah nurani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama isteri, Ny. Ani Yudhoyono, dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Presiden menjenguk para korban yang

dirawat di rumah sakit. Berbicara kepada mereka, menyampaikan empati dan ikut prihatin serta meneguhkan semangat mereka untuk tetap tabah dan bersabar menghadapi cobaan ini.

Presiden juga memerintahkan menteri terkait segera melakukan tanggap darurat. Mengevakuasi para korban dan membantu mengatasi kehidupan mereka. "Utamakan perawatan dan pengobatan yang luka, evakuasi dan pemakaman bagi jenazah yang meninggal. Menteri harus pastikan rumah sakit dan penampungan punya fasilitas cukup, penerangan operasi, obat-obatan, dokter, termasuk makanan dokter," kata Presiden.

Yudhoyono bahkan untuk sementara memindahkan kantornya dari Jakarta ke Gedung Agung, Yogyakarta. Karena Presiden ingin melihat sendiri bagaimana koordinasi penanganan bencana serta sinergi yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat TNI. "Presiden ingin memastikan sendiri kalau sistem itu bekerja," ujar jurubicara Presiden, Andi Malarangeng.

Wapres Jusuf Kalla selaku Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) menggelar rapat di kediamannya. Diputuskan, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa. Pada tiga bulan pertama akan dikucurkan dana tanggap darurat sebesar Rp 75 miliar. Dana tersebut diambil dari pos APBN 2006 dan bantuan asing untuk kebutuhan pemulihan wilayah terkena gempa selama satu tahun.

Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto pun segera memerintahkan prajurit TNI termasuk para Taruna Akademi Militer Magelang membantu para korban. Bersama para relawan mereka bergotong royong bahu membahu mencari dan mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan.

Yang memprihatinkan, sampai hari kedua masih ada korban yang belum mendapat bantuan. Seperti warga desa Jetis mengaku tak ada bantuan. Dia bersama isteri dan anak serta cucunya terpaksa berteduh dari guyuran hujan hanya dengan mantel plastik seadanya. Sementara perut mereka hanya diisi dengan rebusan singkong dan daun singkong yang diperoleh dari halaman rumah. Kedengarannya ini agak ironis dan seakan tak masuk akal, karena lokasi ini hanya berjarak sekitar 6 km dari kota Yogyakarta.

Terhadap adanya keluhan warga tersebut, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengaku bantuan sudah dikirim sampai di kecamatan. Dia berjanji akan mengecek langsung penyaluran bantuan tersebut.

Bencana gempa ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa. Tapi juga menyisakan penderitaan bagi warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Puluhan ribu rumah harus dibangun. Sementara sebagian besar masyarakat dalam kondisi ekonomi yang lemah.

Bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan bahkan dari luar negeri memang sudah mulai berdatangan. Namun ke depan yang perlu mendapat perhatian adalah agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak dan membutuhkan. Terutama bagi warga masyarakat yang praktis tidak memiliki rumah lagi.

Da'i kondang, AA Gymnastiar dalam khotbahnya yang disiarkan langsung *RCTI* Minggu (28/5) juga menyinggung bencana gempa yang terjadi di Yogyakarta. Menurutnya, sebagai negeri yang sebagian wilayahnya rawan gempa, Pemerintah seyogyanya menyosialisasi kepada masyarakat bagaimana mengantisipasi bencana tersebut. Bagaimana cara menyelamatkan diri bila terjadi gempa. Termasuk pula bagaimana membangun rumah yang tahan gempa.

Dia juga berpendapat, pemerintah perlu belajar dari Jepang, negara yang juga rawan terhadap gempa. Sehingga berdasarkan pengalaman mereka, bisa diperoleh masukan-masukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan terjadinya gempa di waktu-waktu mendatang. ■ SP

Argentina Incar Gelar Ketiga

Dengan talenta berlimpah, Argentina dijagokan bisa merebut gelar juara dunia untuk kali ketiga. Namun, kegagalan kerap menyergap tim Tango justru ketika dijagokan. Korea-Jepang 2002 menjadi trauma terdekat Albiceleste, julukan Timnas Argentina.

Tim Argentina di kancah sepakbola dunia sudah melegenda. Tim itu pernah meraih gelar juara dunia pada tahun 1978 di Argentina dan tahun 1986 di Meksiko. Dalam meraih dua gelar terdahulu Argentina melahirkan dua bintangnya masing-masing Mario Kempes pada tahun 1978, dan Diego Maradona pada tahun 1986 di Meksiko. Keduanya bersinar di dua era yang berbeda.

Namun, bagaimana dengan Argentina kini? "Saya tidak merasa bisa yakin atau pesimistis pada Argentina setelah apa yang terjadi pada 2002," ucap legenda hidup Argentina, Diego Maradona. Dia malah menjagokan Brasil sebagai kandidat utama juara di Jerman 2006 mendatang.

Dalam catatan sejarah Piala Dunia, secara kualitas Tango mampu merajai Amerika Selatan dengan menjadi juara 14 kali Copa Amerika. Itu tidak usah diragukan lagi. Bahkan mereka langsung merasakan final pada Piala Dunia perdana, 1930.

Tango memang sempat mengalami prestasi yang pasang surut. Mereka sempat tenggelam setelah torehan *runner-up* pada 1930. Argentina menunggu cukup lama untuk menjadi juara dunia yaitu pada tahun 1978 di depan publiknya sendiri. Mario Kempes ketika itu menjadi bintangnya.

Pada Piala Dunia Spanyol 1982, tim Tango kandas di babak ke-II. Barulah empat tahun kemudian mereka tampil sebagai juara di Meksiko 1986. Ketika itu dipimpin gelandang menyerang ajaib plus kontroversial, Maradona. Tango pun menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Argentina kemudian selalu dipandang sebagai calon juara. Namun, empat tahun lalu, juara dunia dua kali ini tersingkir di penyisihan grup.

Cari Format Ideal

Meski pada kualifikasi Piala Dunia 2006 Zona Conmebol, Argentina sempat naik turun, namun tim Putih-Biru Laut itu akhirnya tetap mapan di Amerika Selatan. Mereka hanya kalah dari Brasil pada klasemen akhir. Di Jerman 2006, tim Tango lagi-lagi diangkat menjadi calon juara.

Kesempatan terbuka lebar untuk Argentina. Nyaris di semua lini tim Tango punya kemampuan merata. Posisi yang dinilai lemah praktis hanya ada di bawah mistar. Mereka punya nama-nama dengan kemampuan mumpuni yang berpengalaman segudang di kancah Eropa.

Hanya saja, Jose Pekerman tampak belum mendapatkan perpaduan yang ideal untuk meracik pasukannya. Pelatih yang mampu mengangkat timnas junior ini juga belum mampu menerapkan sistem yang diinginkannya.

"Saya ingin menularkan apa yang saya pelajari di masa lalu ke dalam tim. Kami ingin menjadi salah satu tim yang berjuang untuk memenangi trofi," ucap Pakerman.

Namun, kekalahan telak 1-4 dari rival berat Brasil di final Piala Konfederasi 2005 kembali memunculkan keheranan. "Kami seharusnya tidak lupa tengah bermain di turnamen besar," ucap Pekerman.

Ya, bila Argentina tetap terbebani status unggulan dan lupa berada di perhelatan terakbar, terhentinya tarian Tango di babak-babak awal seperti di Korea-Jepang 2002 bisa kembali terjadi.

Jika di babak sebelumnya nama Mario Kempes dan Maradona bersinar, maka Piala dunia 2006 ini ada nama Lionel Messi yang bakal tampil sebagai mutiara baru. Membandingkan Messi dengan Diego Maradona mungkin sesuatu yang berlebihan. Namun, Leo punya peluang dan kemampuan untuk mengikuti jejak Diego. Beberapa kesamaan terlihat pada diri keduanya, seperti mencuat di usia muda dan *dribel* kaki kiri luar biasa.

Puja-puji cepat diterima pemuda kelahiran 24 Januari 1987 ini dengan kesuksesan di klub Barcelona. Pada 1 Mei 2005, Messi menjadi pencetak gol termuda Barca pada usia 17 tahun, 10 bulan, dan 7 hari. Anugerah pemain muda terbaik yang diberikan koran Italia, Tuttosport, menambah sorotan.(*Diolah dari berbagai sumber*). ■ SB

SKUAD ARGENTINA

Pelatih : Jose Pakerman

Kiper	
Roberto Abbondanzieri	: Boca Juniors
Leonardo Franco	: Atletico (Spa)
Bek	
Roberto Ayala	: Valencia (Spa)
Fabricio Coloccini	: La Coruna (Spa)
Gabriel Heinze	: Man. United (Ing)
Gabriel Milito	: Zaragoza (Spa)
Walter Samuel	: Inter (Ita)
Javier Zanetti	: Inter (Ita)
Gonzalo Rodriguez	: Villarreal (Spa)
Juan Sorin	: Villarreal (Spa)
Gelandang	
Roman Riquelme	: Villarreal (Spa)
Esteban Cambiasso	: Inter (Ita)
Pablo Aimar	: Valencia (Spa)
Maxi Rodriguez	: Atletico (Spa)
Martin Demichelis	: Muenchen (Jer)
Javier Mascherano	: Corinthians (Bra)
Penyerang	
Hernan Crespo	: Chelsea (Ing)
Carlos Tevez	: Corinthians (Bra)
Lionel Messi	: Barcelona (Spa)
Luciano Galletti	: Atletico (Spa)
Javier Saviola	: Sevilla (Spa)

Formasi Ideal (4-4-2)	
Kiper	: Abbondanzieri
Bek kanan	: Coloccini
Bek tengah	: Ayala & Samuel
Bek kiri	: Sorin
Gelandang kanan	: Zanetti
Gelandang tengah	: Demichelis & Aimar
Gelandang kiri	: Riquelme
Penyerang	: Messi & Crespo

Berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini, dan kinerja pemerintahan SBY-JK dua tahun terakhir, sejumlah tokoh menggalang gerakan membangun kemandirian, martabat, dan masa depan bangsa.

Gedung Juang 45, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2005. Berbagai elemen masyarakat seperti budayawan, politisi, aktivis prodemokrasi, dan mahasiswa tumplek di gedung bersejarah itu.

Tampak pula beberapa tokoh nasional, antara lain, mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, wartawan senior Rosihan Anwar, dan budayawan Emha Ainun Nadjib.

Mereka semua berbaur mengikuti acara Sarasehan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2006 itu bertajuk "Membangun Kemandirian Martabat dan Masa Depan Bangsa".

Acara itu diprakarsai oleh Kelompok Sembilan, yakni sembilan tokoh yang sejak awal dikenal sangat keras menentang kebijakan pemerintah menunjuk ExxonMobil sebagai operator ladang minyak Blok Cepu.

Mereka adalah, Amien Rais, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Menhankam/Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim, Marwan Batubara (Anggota DPD asal DKI Jakarta), Dradjad H. Wibowo (anggota DPR dari Fraksi PAN), Alvin Lie (anggota DPR dari Fraksi PAN), Ismet Hasan Putro (Ketua Masyarakat Profesional Madani), dan Chandra T. Wijaya (pengusaha).

Gerakan itu digagas setelah para tokoh nasional ini gagal bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipandu oleh Amien Rais, dengan gaya bicara yang khas penuh nada-nada kritis terbungkus kelakar, acara berlangsung meriah dan hidup. Amien mengatakan, acara tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan pemerintah SBY-JK bahwa negara-negara lain mengedepankan nasib rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang bermartabat.

Dalam konteks itu, mantan Ketua Umum DPP PAN ini mengeritik, antara lain, kebijakan pemerintah SBY-JK di bidang pertambangan. Dia menunjuk kasus Freeport, Papua, dan ladang minyak Blok Cepu, Blora, yang pengelolaannya dikuasai perusahaan asing.

"Warning" dari Gedung Ju

Politikus PDI Perjuangan Kwik Kian Gie, menilai kepemimpinan SBY-JK terlalu lembek ketika menetapkan ExxonMobil sebagai pengelola Blok Cepu. "Presiden sangat mudah ditekan kepentingan asing terutama Amerika," ujar mantan Kepala Bappenas di era Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri itu.

"Rakyat menangis," ujar Cak Nun, panggilan akrab Emha Ainun Nadjib, menyampaikan pandangan kritisnya seputar kinerja pemerintah yang cenderung lebih berpihak kepada kepentingan asing ketimbang nasib anak bangsa.

Praktis, acara tersebut berisi kritik tajam kepada kebijakan pemerintahan SBY-JK, selama dua tahun terakhir, yang dianggap abai terhadap kepentingan bangsa dan nasib rakyat Indonesia.

Sebagai wujud kerisauannya yang dalam terhadap pemerintahan saat ini, Alvin Lie, misalnya, membacakan sepucuk puisi yang isinya merupakan penafsiran dan pemaknaan terhadap huruf demi huruf dari tiga kata yang menjadi nama SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

Eggi Sujana, salah seorang peserta, sempat mempertanyakan kepada forum –khususnya Amien Rais selaku motor utama— akan dibawa ke mana hasil acara sarasehan tersebut. Menurutnya, jangan sampai kegiatan semacam itu hanya menghabiskan energi secara intelektual.

"Tindakan politik konkret apa yang akan dilakukan setelah acara ini?" tanya Eggi dengan nada penuh tekanan.

"Kita ikhlas dan kita dukung Mas Amien Rais untuk memimpin bangsa ini."

"Wah, Mas Eggy agaknya sudah *kebelet* aksi," ucap Amien sambil tersenyum menanggapi tantangan Eggy.

Aktivis politik lainnya, M. Jumhur Hidayat, bahkan menyerukan kepada seluruh kaum intelektual dan kaum marjinal Indonesia untuk saling bersatu padu.

"Terima kasih Mas Jumhur atas pandangannya, yang tampaknya sudah ingin buat revolusi," celoteh Amien merespon ajakan Jumhur.

Seorang aktivis BEM dari Universitas Trisakti Jakarta pun meminta agar acara tersebut ada *follow up*-nya, seraya mengingatkan kepada para penggagas acara untuk mengajak elemen gerakan mahasiswa dalam berjuang. "Karena kondisi saat ini diwarnai begitu banyak faksi, maka harus dilakukan banyak pencerahan," tukas si mahasiswa.

Marwan Batubara, yang juga Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu, menggalang tanda tangan di atas surat bermeterai kepada semua hadirin untuk menggugat pemerintah soal nasib Blok Cepu.

Beberapa poin masukan yang disampaikan kelompok sembilan kepada Presiden SBY antara lain mempersoalkan ditunjuknya ExxonMobile sebagai operator Blok Cepu dan persoalan pertambangan lainnya yang melibatkan perusahaan asing seperti Freeport McMoran di Tembagapura, Papua.

Sebelum mengakhiri acara, Amien Rais menggarisbawahi bahwa gerakan "Membangun Kemandirian, Martabat, dan Masa Depan Bangsa" tidak akan berhenti. Gerakan itu akan terus kita gulirkan sampai ke daerah-daerah di penjuru tanah air, dengan lebih banyak lagi jaringan.

Di ujung kalimatnya, Amien sempat melontarkan nada sindiran kepada kalangan intelijen negara agar tidak salah dalam menyimpulkan kegiatan hari itu.

"Kepada teman-teman BIN dan sebagainya silahkan acara ini direkam tapi jangan disimpulkan. Tolong dibuat yang rapi, rasional, dan jujurlah. Mari kita saling mengisi dan meluruskan, jangan nanti disebut bahwa Amien Rais memprovokasi orang," ucap Amien. Pernyataan Amien seketika langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Dradjat Wibowo yang ditunjuk sebagai notulen memaparkan sembilan poin imbauan yang akan disampaikan kepada Presiden SBY, Wapres JK, termasuk kepada pimpinan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, BPK, dsb. ■ SB, AF

Sembilan Imbauan kepada SBY-JK

1. Menggelorakan semangat nasionalisme.
2. Menjadikan kemajemukan sebagai modal bangsa.
3. Mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan asing dan golongan.
4. Konsisten terhadap amanat UUD 1945.
5. Menjamin tidak lagi menyengsarakan rakyat.
6. Membebaskan rakyat dari jeratan utang.
7. Memaksimalkan kekayaan alam dan mengembalikan aset dari tangan asing, seperti pengambilalihan saham Indosat dan bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8. Tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.
9. Memaafkan mantan Presiden Soeharto dengan tetap menjalankan proses hukum terhadap tindak pidana yang sudah dilakukannya.

MARWAN BATUBARA, Anggota DPD dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta dan Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC)

"Kita Pesuruh di Rumah Sendiri!"

Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat, menyangkut pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, menuai kritik tajam dari sejumlah tokoh nasional. Bergabung dalam Kelompok Sembilan, mereka menggagas, menggalang, dan menyuarakan Gerakan "Kemandirian, Martabat, dan Masa Depan Bangsa". Sembilan orang tokoh tersebut adalah Mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Menhankam/Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim, Marwan Batubara (Anggota DPD asal DKI Jakarta), Dradjad H. Wibowo (anggota DPR dari Fraksi PAN), Alvin Lie (anggota DPR dari Fraksi PAN), Ismet Hasan Putro (Ketua Masyarakat Profesional Madani), dan Chandra T. Wijaya (pengusaha).

Marwan Batubara, anggota DPD dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta dan Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC), di sebuah kesempatan wawancara khusus dengan Anis Fuadi, wartawan *Berita Indonesia*, di ruang kerjanya, Gedung DPD-RI, Senayan, Jakarta, akhir Mei 2006, memaparkan pandangannya tentang gerakan Kelompok Sembilan. Berikut petikannya:

Bisa Anda ceritakan tentang kegiatan sarasehan Kebangkitan Nasional di Gedung Juang '45?

Kegiatan itu hanyalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Sepanjang apa yang menjadi visi dan keinginan kami, bahwa kebijakan pemerintah telah sesuai dengan konstitusi dan prokepentingan rakyat, belum tercapai, kami akan terus melakukan berbagai kegiatan, yang kita anggap memang harus disuarakan.

Karena lembaga-lembaga yang seharusnya menyuarakan dan memperjuangkan itu kelihatannya enggan untuk melakukannya, apakah itu di eksekutif, legislatif, ataukah yudikatif.

Apakah gerakan Kelompok Sembilan terkait dengan kegagalan bertemu dengan Presiden?

Isunya bukan sekadar ketemu Presiden. Bahwa dulu kita minta waktu, lalu tidak diterima, lantas kita berhenti. Bukan begitu. Saya kira isu utamanya adalah bagaimana membangun kemandirian bangsa. Bagaimana aset-aset negara, khususnya kandungan sumber daya alam, bisa dikelola dan dimanfaatkan sejalan dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Kita semua perlu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan arif dan bijaksana, dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang tersedia secara mandiri dan bermartabat, sehingga anak cucu kita dapat lebih terjamin masa depannya.

Dalam konteks kemandirian, martabat dan masa depan bangsa inilah, serta sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dimanfaatkan oleh bangsa ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sepanjang amanah UUD 1945 belum dijalankan pengambil kebijakan di negara ini, kami akan terus menyuarakan sikap. Menurut kami, bagaimana bangsa ini bisa disebut mandiri dan bermartabat manakala aset dan sumber daya alam yang dikelola secara dominan namun tidak transparan oleh pihak asing, dengan sistem bagi hasil yang tidak adil, dan menyebabkan kerusakan lingkungan? Lalu, kita diam saja? Itu persoalan yang paling pokok.

Contoh kebijakan pemerintah yang Anda dan rekan-rekan di Kelompok Sembilan kritisi?

Contohnya, ada aturan-aturan yang dibuat untuk meng-*entertain* atau memenuhi target-target dari eksekutif, kemudian dikeluarkan dengan menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.34 tahun 2005 tentang perubahan PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Marwan Batubara

PP 34/2005 diterbitkan pada 10 September 2005 dengan berbagai alasan, dengan tujuan memuluskan secara legal penunjukan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu. Bila yang dipakai PP 35/2004, maka *operatorship* ExxonMobil melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) masih terhambat oleh ketentuan-ketentuan pokok KKS yang terdapat di dalamnya.

Padahal, ada UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur bahwa Pertamina punya hak untuk mengelola wilayah kerja *Technical Assistance Contract (*TAC) yang sudah ditandatangani, sampai waktu perjanjian itu berakhir. Pertamina sudah mengemukakan keinginannya mengelola sendiri. Dan itu dijamin oleh Pasal 64 UU tersebut.

Tapi dengan PP itu, Pertamina harus menyerahkan dengan sukarela, lalu itu dihapuskan, kemudian pengelolaan Blok Cepu dilakukan bersama dengan ExxonMobil.

Artinya di sini yang diikuti adalah PP, yang lebih rendah kedudukan hukumnya

dibandingkan UU. Kenyataan bahwa PP telah menabrak UU dibiarkan begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa, karena memang itu dilakukan pemerintah dengan sengaja. Parahnya lagi, DPR juga tidak melakukan apa-apa.

Karena itulah, mengkritisi kondisi yang demikian dan tampaknya tidak akan ada perbaikan, kami akan terus menyuarakan sikap.

Diserahkannya *operatorship* Blok Cepu kepada ExxonMobil, yang perjanjianya ditandatangani pada 15 Maret 2006, membuktikan pemerintah telah takluk kepada asing dan tidak memiliki keberpihakan untuk membangun kemandirian bangsa pada sektor energi.

Tidakkah disadari oleh pemerintah, Blok Cepu adalah aset bangsa (dengan potensi cadangan minyak mencapai 2,6 miliar barel dan cadangan gas bumi sebesar 11 triliun kaki kubik) yang semestinya dikuasai oleh negara dan dikelola putra-putri Indonesia melalui Pertamina? Dengan begitu, Indonesia tidak perlu menjadi kuli di negeri sendiri.

Blok Cepu adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam Indonesia yang perlu kita kelola dalam konteks membangun kemandirian, martabat dan masa depan bangsa tersebut.

Kasus Blok Cepu ini hanyalah satu dari sekian contoh kasus yang menggambarkan betapa pemerintah telah takluk kepada kepentingan asing, di satu sisi, dan mengabaikan kepentingan rakyat, di lain sisi.

Kasus Blok Cepu menjadi salah satu latar belakang Kelompok Sembilan menyuarakan gerakan kemandirian bangsa?

Benar demikian. Salah satu latar belakang kami bersuara adalah kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber-sumber daya alam negara, terutama kasus Blok Cepu dan kasus Freeport. Dan tidak tertutup kemungkinan kami juga akan mengkritisi kebijakan soal Gas Natuna, Nemount, Inco, atau Caltex.

Konkretnya, kami akan minta supaya kontrak-kontrak karya direview untuk bisa lebih adil serta lebih menguntungkan negara dan rakyat, dibandingkan kondisi sekarang ini yang lebih memenuhi keinginan dan kepentingan investor-investor asing dan segelintir orang, yang dulu mengambil kebijakan.

Dan dari kebijakan itu, mereka mendapatkan *privilege* dari perusahaan asing, pada saat perpanjangan kontrak, misalnya pada kasus Freeport. Mentalitas dan budaya seperti ini masih akan terus berlangsung.

Sejauh mana Anda melihat kehirauan DPR terhadap kasus Blok Cepu?

Ada tapi kan kalah. Ada misalnya fraksi di DPR yang hanya mungkin dua. Tapi begitu pimpinan Parpol-parpol kemudian dipanggil oleh Presiden ke Istana, akhirnya prospek akan adanya angket Blok Cepu menjadi suram.

Itu kan ironis sekali karena eksekutif bisa mempengaruhi legislatif dengan jalur lobi yang tidak transparan, misalnya. Saya menilai legislatif seolah-olah tidak independen dan seolah-olah berada di bawah pengaruh eksekutif. Anehnya, mereka mau saja diperlakukan begitu.

Padahal, apa yang ada di depan mata mereka, bahwa ada satu aturan yang jelas-jelas menabrak aturan yang lebih tinggi, itukan sangat terkait dengan fungsi pengawasan yang mereka miliki.

Misalnya, Wapres mengatakan, jika DPR terlibat dalam pengambilan keputusan soal Blok Cepu, maka DPR tidak mengikuti UU. Karena, itu bukan wilayahnya legislatif, tapi wilayah eksekutif, katanya. Padahal, DPR itu punya fungsi pengawasan bagaimana UU dijalankan dengan semestinya.

Sekarang begini, seandainya UU Migas ternyata tidak dijalankan pemerintah dengan benar dan secara semestinya, apa DPR tidak boleh terlibat? Saya kira boleh dan itu dijamin oleh UUD.

Nah, dengan mencermati kondisi demikian, kami yang bersembilan orang dan pasti akan terus bertambah jumlahnya tidak akan berhenti untuk menyuarakan gerakan penyadaran ini.

Jadi, bukan hanya adanya aturan yang dilanggar para pengambil kebijakan nasional soal pengelolaan aset dan sumber daya alam negara, tapi juga karena kebijakan tersebut tidak prorakyat?

Ya...yang kami kritisi adalah adanya aturan yang dilanggar. Kami juga menyuarakan agar kebijakan negara memang untuk kepentingan bangsa, kemandirian bangsa, dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seoptimal mungkin.

Sekarang, kami melihat itu belum terwujud. Buktinya, proyek Freeport. Bertahun-tahun kita tidak tahu berapa hasil produksi sumber daya alam negara ini yang pihak asing ambil. Sistem bagi hasilnya juga tidak jelas.

Dikatakan tidak ada kesempatan untuk mereview kontrak kerjanya. Saya kira, itu harus dilakukan. Lagi pula, masalahnya tidak sederhana, misalnya dengan mereview bahwa pemerintah akhirnya memperoleh 20 persen saham. Saya kira bukan itu targetnya.

Tapi, bagaimana kontrak karya yang sudah ditandatangani itu dan penuh praktik KKN itu harus direview. Supaya bagi rakyat itu lebih adil. Belum lagi kalau kita bicara soal kompensasi atas berbagai kerusakan lingkungan sebagai dampak dari proyek tersebut. ■ AF

B • I • O • D • A • T • A

Nama : Ir. Marwan Batubara, M.Sc
Lahir : Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955
Agama : Islam
Istri : Cucu Hertruida
Menikah : Tahun 1981
Anak : Faisal Reza • Fahmi Irfan • Faris Ibrahim

Aktivitas/Pekerjaan: Anggota DPD dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta (2004-2009) • Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu

Pendidikan: Sekolah Dasar (SD) din Delitua, tahun 1967 • Sekolah Menengah Pertama (SMP di Delitua, tahunn 1970 • Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3, Medan, tahun 1973 • D-3, Sekolah Teknologi Telkom, Bandung, 1975-1977 • S-1, Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI), Jakarta, 1979-1984 • S-2, master din bidang computing dengan gelar M.Sc, dari Monash University, Melbourne, Australia, 1994-1995

Pengalaman Kerja: Tahun 1974, bekerja sebagai operator di radio swasta Alnora, Medan • Tahun1977-1981, Teknisi PT Telkom, Jakarta • Tahun 1981-1984, Teknisi Senior PT Indosat, Jakarta • Tahun 1995-2000, Manajer Pembangunan, PT Indosat, Jakarta • Tahun 2000-2004, General Manager (GM) Pembangunan Transmisi, GM Perlengkapan, dan GM Pelayanan Operasi, PT Indosat, Jakarta

Pengalaman Organisasi: Tahun 1994-1995, Sekjen IKAMAn (Ikatan Alumni Australia), Jakarta • Tahun 1992-1997, Pengurus ICMI Orsat Kebon Sirih, Jakarta • Tahun 1998-2001, Anggota Pengurus Yayasan Pengembangan Teknologi Elektro BKE PII, Jakarta • Tahun 2000-2003, Pendiri dan Ketua Serikat Pekerja (SP) PT. Indosat

Kegiatan Sosial: Penggagas pendirian Yayasan Ummat (Ummat Muslim Indosat), membantu memberikan pinjaman modal bagi pengusaha kecil, membantu pembangunan Sekolah Thariq bin Ziad di Bekasi, memberikan bantuan kepada beberapa yayasan pendidikan di Bandung dan Surabaya • Aktif sebagai Ketua Yayasan Tanmia, yang bersama-sama dengan Yayasan DSUQ mendirikan dan mengoperasikan klinik gratis di kawasan-kawasan kumuh seperti di Pulo Gadung, Cilincing, Ancol, Krukut, dan Grogol.

Karya Tulis Buku: "Stop Penjualan Asset Negara: Data dan Fakta Dibalik Divestasi Indosat", diterbitkan Badan Penyelamat Asset Bangsa, Jakarta, tahun 2004.

2006, Tahunnya Para Gamers

Tahun 2006 akan menjadi ajang pembuktian tiga besar produsen konsol game dunia. Pada Electronic Entertainment Expo (E3) 2006 yang berlangsung di Los Angeles pada pertengahan Mei lalu, PlayStation 3, Xbox 360 dan Nintendo Wii menyodorkan berbagai inovasi teknologi pada konsol game mereka.

Electronic Entertainment Expo (E3) selalu menjadi ajang pertarungan yang panas antarpemain industri *game* dunia. Pameran yang berakhir 12 Mei ini dijadikan etalase untuk memamerkan produk-produk yang akan menyerbu pasar sekaligus menjadi pemanasan sebelum memasuki 'perang' yang sebenarnya.

Pertarungan di antara ketiganya memang bukan baru kemarin terjadi. Tahun 2000 perhatian penggemar *game* beralih pada kehadiran PS2. Produk keluaran Sony itu tidak sekadar konsol *game* melainkan dapat berfungsi sebagai DVD player. Akibatnya, Microsoft yang sebelumnya hanya fokus pada perangkat komputer tak mau kalah. Dia ikut bertarung dengan mengeluarkan Xbox yang mengusung prosesor Intel Pentium III modifikasi 733 MHz. Xbox ketika itu memiliki kemampuan memproses yang paling cepat. Sebagai perbandingan, PS2 menggunakan prosesor 300 MHz.

Genderang persaingan semakin keras pada E3 2005. Namun, sejauh ini, baru Microsoft yang telah memasarkan konsol terbarunya, Xbox 360, pada November 2005. Dua pesaingnya, Sony PlayStation 3 (PS3) dan Nintendo Wii baru membuka sebagian rahasianya.

Dalam E3 2006 yang dihadiri kurang lebih 60.000 orang ini, Sony hadir dengan rilis terakhir tentang tanggal peluncuran dan harga PlayStation 3. Nintendo memamerkan Nintendo Wii yang memiliki alat kontrol (*controller*) unik. Sedangkan Microsoft lebih menyoroti aspek jaringan dari Xbox 360.

Sony memperkenalkan alat kontrol (*controller*) PS3 terbaru, menggantikan alat kontrol model bumerang. Pada alat kontrol terbaru ini, Sony menerapkan sensor enam poros yang lebih sensitif dan presisi dibandingkan dengan papan kontrol Dual Shock yang dipakai pada PS dan PS2. Menurut rencana, Sony PS3 baru akan dipasarkan pada 17 November 2006 serentak di seluruh dunia. Khusus untuk Jepang dan Eropa akan diluncurkan 11 November 2006. Sedangkan pasar Indonesia akan menerimanya awal tahun depan.

Ada dua versi PS3, yaitu berkapasitas hard disk drive 20 GB yang dibanderol US$ 499 (Rp 4,5 juta) dan versi 60 GB yang dibanderol US$ 599 (5,5 juta). Lebih mahal dibandingkan Xbox 360 yang berkisar US$ 299-399 (2,7-3,6 juta). Model 20 GB adalah versi 'murah' karena tidak dilengkapi dengan port ke televisi High Definition, slot kartu memori dan koneksi ke jaringan nirkabel Wi-Fi. Mereka yang menginginkan tampilan grafis High Definition jelas terpaksa harus memilih model 60 GB.

Dalam PS3 ditanam *graphics card* dengan teknologi dari Nvidia bernama RSX (Reality Synthesizer) Graphics Processor. *Graphics card* ini dipasang untuk menampilkan karakter-karakter dan latar belakang tiga dimensi yang terkesan lebih hidup. RSX ini memiliki 512 MB *graphics render memory*, 100 miliar *shader operations*, dan menampilkan 51 miliar *dot products* per detik. PS3 menggunakan prosesor sel dari IBM dengan kecepatan 3,2 GHz.

Dari sisi Microsoft, tidak banyak hal revolusioner yang disampaikannya pada ajang E3. Perusahaan milik Bill Gates itu hanya mengumumkan beberapa aksesori dan fitur terbaru Xbox Live bernama *Live Anywhere*. Dengan adanya fitur tersebut, sebuah *game* tidak hanya dapat dimainkan di Xbox 360 namun juga di komputer berbasis sistem operasi Windows Vista hingga di telepon seluler. Xbox 360 memiliki tiga prosesor chip IBM Power PC 3,2 GHz, dengan sebuah prosesor grafis ATI 500 MHz. Memori yang disediakan adalah sebesar 512 Mb dengan kapasitas hard disk 20 GB.

Peluncuran PlayStation 3 juga menandai babak baru persaingan Sony dan Microsoft, tidak hanya dari segi teknologi konsol *game* itu sendiri tetapi juga dari segi penggunaan standar DVD. Sony tetap bertahan dengan DVD *Blue-Ray,* sementara Microsoft Xbox 360 memakai DVD High Definition.

Sedangkan konsol Nintendo Wii – sebelumnya bernama Nintendo Revolution – berhasil menarik perhatian pengunjung karena memiliki alat kontrol unik, *Wii-mote*, yang lebih mirip *remote control* TV. Dengan speaker terintegrasi, Wii-mote membuat pengalaman bermain seperti di situasi aslinya. Nintendo juga mengumumkan peluncuran *Wii Connect*

Xbox 360

- Tersedia dalam dua bundel: Xbox 360 System dan Xbox 360 Core System. Harga berkisar US$ 299-399.
- Prosesor: Tiga prosesor chip IBM PowerPC 3.2GHz
- Dukungan Grafik: ATI Graphics Processor 500MHz dengan 10MB embedded DRAM
- Memori: 512MB GDDR3 RAM dan 700MHz DDR
- Hard Drive: 20GB plus Xbox 360 System.
- Media Input: USB 2.0 x 3, Wi-Fi adaptor slot, Ethernet
- Controller: Wireless (maksimum 4 controller)
- Media Disk: DVD
- Video Output: High Definition hingga 1080i
- Kompatibel dengan Game Lama: Terbatas (tidak semua game lama kompatibel) High Definition
- Fitur Lain: Xbox Live
- Website: http://www.microsoft.com/xbox/ dan http://www.xbox.com/
- Info Lengkap: http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360

Nilai Plus +

+ Tampilan/ wajah Xbox bisa diubah-ubah sesuai dengan dekorasi kamar atau sesuai komponen stereo.
+ Xbox Live akan melengkapi Xbox 360 dengan fitur komunitas yang banyak dan layanan *online* game yang lebih memuaskan.
+ Bisa di-upgrade
+ Memiliki USB 2.0 port. Bisa untuk menyambung kamera digital dan player MP3.

Nilai Minus -

- Tidak semua game lama kompatibel.
- Tanpa Wifi. Namun bisa ditambah dengan adaptor Wi-Fi terpisah untuk hubungan wireless-nya.

Sony PlayStation 3

- Tanggal Rilis: 17 November 2006
- Tersedia dalam dua bundel: Versi standar 20 GB. Harga US$499. Versi Lengkap (built-in 802.11b/g wireless, card slots dan HDMI output) 60 GB. Harga US$599.
- Prosesor: Cell Processor PowerPC-base Core 3.2GHz
- Dukungan Grafik: RSX (Reality Synthesizer) 550MHz
- Memori: 256MB XDR Main RAM 3.2GHz, 256MB GDDR3 VRAM 700MHz
- Hard Drive: 20GB dan 60GB
- Media Input: USB Front x 4, Rear x 2 (USB2.0). Untuk versi lengkap ditambah dengan Memory Stick standard/Duo, SD standard/mini, CompactFlash(Type I, II)
- Controller: Wireless (Bluetooth 2.0)
- Media Disk: Blue-Ray, DVD
- Video Output: HDMI (Versi Lengkap)
- Kompatibel dengan Game Lama: Ya (PS dan PS2)
- Berat: Kira-kira 5 kg
- Fitur Lain: Ethernet, AV Multi Out, Digital Out (optical) Website: http://www.playstation. com/products.html
- Info Lengkap: http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3

Nilai Plus +

+ Memiliki pilihan penyimpanan lain. Selain memiliki Memory Stick (Sony) yang bisa digunakan di PSP, sistem ini memiliki slot untuk memory card SD dan CompactFlash.
+ Mempunyai enam slot untuk USB. Bisa digunakan untuk USB keyboard, kamera digital, headset untuk komunikasi dan sebagainya.
+ Mendukung setiap media format High-Definition, mulai dari standar 480i sampai dengan standar HDTV 1080i bahkan sampi ke level tampilan sejernih kristal 1080p.
+ Koneksi Gigabit Ethernet PS3 10 kali lebih cepat daripada Xbox 360 single port.
+ Kompatibel dengan semua game PS1 dan PS2
+ Menggunakan Blue-Ray Disc Drive karena kapasitasnya 6 kali melebihi kapasitas DVD biasa. Bisa digunakan untuk DVD film dan sebagainya.

Nilai Minus -

- Sony berspekulasi dengan menganggap Blue-Ray Disc Drive akan menjadi standar DVD. Namun bila gagal menjadi standar DVD, harganya menjadi mahal dan pemasarannya akan sulit.
- Yang paling aneh (barangkali bukan kekurangan), Sony memutuskan untuk mengganti bentuk keseluruhan Dual Shock menjadi bentuk senjata Batman, yaitu Batarang.
- Memerlukan Hard Drive untuk penyimpanan tambahan. Sony belum memutuskan apakah hard drive ini langsung dalam satu paket atau tidak.

24, yakni layanan permanen Wii ke internet. Pengguna Wii dapat mengunduh *update* permainan dan informasi lainnya di saat mesin *stand-by*.

Selain itu, pengguna bisa melakukan sambungan melalui koneksi IEEE 802.11b/g atau USB 2.0 LAN adaptor. Wii juga bisa berkomunikasi dengan Nintendo DS secara *wireless* dan *browsing* internet melalui *web browser* Opera. Dan yang menjadi salah satu unggulan Wii adalah sebuah fitur bernama Virtual Console. Dari sini pengguna bisa men-download dan memainkan *game-game* untuk N64, Super Nintendo Entertainment System (SNES) bahkan Nintendo Entertainment System (NES) yang usianya kurang lebih 20 tahun. *Game* dari konsol lain juga bisa dimainkan antara lain Sega Genesis dan TurboGrafx.

Memorinya memanfaatkan flash memory internal 512 MB dan sebuah slot SD card untuk keperluan ekspansi. CPU-nya memakai PowerPC berkode Broadway yang dibuat dalam proses fabrikasi 90 nm dan dikembangkan serta diproduksi bersama-sama dengan IBM. Sedangkan GPU-nya dikembangkan oleh ATI. Fitur lainnya, disediakan empat port untuk *controller GameCube*, dua slot *memory card Game Cube*, port AV, dan S-video. Dari media yang dipakai, Wii akan menggunakan disk optik dual layer berdiameter 12 cm. Selain itu, bisa juga dimasukkan *disc GameCube* yang berdiameter 8 cm.

Wii tampaknya bakal menjadi yang paling telat muncul di pasar. Nintendo berencana memasarkan Wii tepat pada hari Thanksgiving, yaitu 23 November 2006. Berapa Wii akan dibanderol, masih belum bisa diketahui secara pasti. Namun dari berbagai rumor di internet, Wii akan dibanderol tidak lebih dari US$ 250. Jauh lebih murah dibanding PlayStation3 dan Xbox 360.

Sampai kini Sony masih menjadi pemimpin pasar di dunia dan sudah berhasil menjual 200 juta unit ke seluruh dunia. Di Amerika, Sony menguasai 56% pangsa pasar. Pesaing terdekatnya adalah Nintendo. Bahkan untuk mendongkrak tingkat penetrasi pasarnya, pertengahan April 2006 Sony mengumumkan sudah mendiskon harga PS2 mereka menjadi US$ 129,99. Di toko-toko online harganya jauh lebih murah, US$ 99.

Meski Sony memiliki basis penggemar terbesar yang loyal, namun Microsoft dan Xbox-nya diuntungkan dari sisi peluncuran produk yang lebih cepat. Di sisi lain, Nintendo Wii bisa saja menjadi kuda hitam apabila harganya lebih murah. Konsol manakah yang akan berhasil menguasai pasar *game* beberapa tahun ke depan? Ini masih sulit ditentukan. Satu hal yang pasti, *gamers* masa depan semakin dimanjakan dengan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan. MLP

Nintendo Wii

- Tanggal Rilis: Akhir November 2006
- Harga: US$ 200 sampai US$ 250
- Prosesor: IBM Power PC
- Dukungan Grafik: ATI graphics chip
- Memory: Flash memory internal 512 MB
- Media Input: USB 2.0 x 2.SD x 2 dan dukungan untuk akses internet Wi-Fi (built in).
- Controller: Wireless
- Media Disk: 12 cm optical disc
- Kompatibel dengan Game Lama: Ya (GameCube, NES, SNES dan Nintendo 64)
- Fitur Lain: Empat port controller GameCube, dua slot memory card GameCube, port AV, S-video dan Wii Connect 24.
- Website: http://wii.nintendo.com/
- Info Lengkap: http://en.wikipedia.org/wiki/Wii

Nilai Plus +

+ Memiliki dukungan USB dan SD
+ Sangat kompatibel dengan game lama.
+ Harga paling murah

Nilai Minus -

- Tidak memiliki colokan Ethernet yang standar, hanya untuk hubungan Wi-Fi.
- Alat kontrol (controller) yang 'aneh' dan berbeda dengan alat kontrol sebelumnya.

A Life Changing Bootcamp ke-36

Sebuah Pencerahan Jiwa

Setiap individu punya 'raksasa' yang sedang tidur di dalam dirinya. Namun ada beban tak kasat mata yang tersimpan di alam bawah sadarnya.

Ciloto, Selasa pagi yang sejuk dan berembun. Udara menyebarkan wangi tanah basah sehabis hujan malam sebelumnya. Seratus enam puluh tujuh orang memasuki aula dimana kursi-kursi telah disingkirkan ke dinding belakang. Senyum lebar mewarnai wajah para kru fasilitator yang sebelumnya begitu serius. Musik menghentak dengan nada-nada gembira. Hari itu, Selasa, 25 April 2006, menandai usainya Value Your Life – A Life Changing Bootcamp angkatan ke-36.

Wajah-wajah para peserta Bootcamp tak kalah ceria. Mereka telah berhasil melepaskan berbagai persoalan hidup, yang disadari ataupun tidak, tertanggung di pundak mereka selama ini.

"Saya jadi lebih percaya diri, berpikir positif, lebih *easy* menghadapi tantangan. Hidup terasa lebih indah dari sebelumnya," ujar Lista Sulistyawati, 31, salah seorang peserta Bootcamp dari Jakarta, kepada *Berita Indonesia*.

Banyak kisah menarik, yang mengharukan dan menimbulkan inspirasi, diperoleh di Bootcamp, ketika berbagai individu berinteraksi satu sama lain. Semua peserta yang datang dari berbagai daerah di tanah air itu bermaksud mencari jati diri, memperoleh pencerahan, mendapatkan kepercayaan diri dan hidup lebih positif.

Kenny, 27, salah seorang *crew* Bootcamp, mengaku banyak sekali melihat perubahan para peserta yang telah mengikuti program ini. "Saya melihat bahwa peserta yang datang adalah orang-orang yang mau melepaskan beban mereka, tapi tidak tahu caranya," ujarnya kepada koran ini.

Sebagian lagi malah mempunyai banyak masalah atau beban hidup yang tidak mereka sadari. Selama mengikuti Bootcamp, para peserta dibimbing untuk bisa melihat beban mereka, dan mengetahui cara melepaskan beban tersebut.

Para peserta banyak mendapatkan inspirasi dan motivasi dari mentor maupun dari sesama peserta. Sang mentor– di Bootcamp dipanggil Coach– adalah Onggy Hianata. Inspirator dan motivator yang sudah melanglang buana ke berbagai negara dan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan seminar di bidang pengembangan mental dan kepribadian. Ia yang menyusun berbagai materi simulasi yang membangkitkan semangat hidup bagi peserta A Life Changing Bootcamp.

Bootcamp sendiri merupakan sebuah program yang dirancang sedemikian rupa oleh Edunet International. Lembaga ini didirikan Onggy Hianata dan teman-temannya dan bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan potensi, mental dan kepribadian.

PERSAUDARAAN: Para peserta A Life Changing Bootcamp ke-36.

Perubahan positif

Selama tiga hari dua malam, peserta mengikuti berbagai simulasi yang sarat dengan makna dan filosofi. Program ini telah dilakukan sejak awal 2003, dan diselenggarakan di Ciloto, Bali, Medan, Palembang, Batam dan Surabaya.

Setelah mengikuti Bootcamp, salah satu alumni Bootcamp, Kenny juga mengakui banyak mengalami perubahan positif dan terinspirasi untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi.

Perubahan positif dalam menjalani hidup juga dirasakan Doddi Ferdinarta, 31, alumni Bootcamp ke-7, tahun 2003. Itu sebabnya, seperti halnya Kenny, ia dan isterinya Lisa Nasution yang juga alumni Bootcamp, dengan sukarela menyisihkan waktu dan tenaganya menjadi *crew* atau fasilitator bagi adik-adik angkatannya. Sebab mereka ingin ikut membantu orang lain untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih positif.

"Forgive and forget" adalah salah satu prinsip yang selalu ditekankan Onggy pada para peserta. Masa lalu yang pahit seringkali menjadi beban yang tak terlihat. Dengan memaafkan dan melupakan, hidup baru pun terbentang.

Peserta yang kecanduan rokok, minuman keras, judi, pornografi atau narkoba bisa melepaskan diri dari ketergantungannya. Banyak yang sembuh dari trauma dan *phobia*-nya, merasa lebih percaya diri, rajin beribadah dan rumah tangganya menjadi lebih harmonis.

Salah seorang peserta, Wildayani, 23, mengaku berhasil menghapuskan trauma dan rasa dendamnya atas pembunuhan ayahnya 20 tahun yang lalu. Di Bootcamp, staf sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh ini belajar memaafkan dan melupakan. "Saya sadar, dendam itu tidak akan membuat Papa saya hidup kembali. Dan dendam itu hanya akan menghambat saya untuk berkarir," ujarnya.

Para peserta Bootcamp yang datang dari Aceh sampai Papua kini telah kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka telah menemukan jati diri dan tujuan hidupnya. Siap menaklukkan tantangan dan meraih kesuksesan. Dan semuanya berpendapat sama: Bootcamp memang luar biasa! RH

Testimonial BC ke-36

Karena Hidup Itu Indah

Banyak yang tidak tahu cara melepas beban persoalan hidup dan memunculkan sisi positif dalam dirinya. Setelah ikut Bootcamp (BC), mereka menjalani hidup dengan lebih baik.

1. Doddi Ferdinarta, 31, Jakarta, *enterpreneur*

Saya adalah alumni BC angkatan VII, Agustus 2003. Karena Bootcamp, saya dan isteri saya, Lisa Nasution, makin saling memahami dan menghargai satu sama lain.

Karena banyak perubahan positif itulah maka saya dengan sukarela mendaftar sebagai kru Bootcamp. Saya rela menjadi kru setiap BC berlangsung, karena dapat ikut membantu saudara-saudara kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa Narkoba, pornografi, alkohol, judi. Dan yang jauh lebih penting, suatu hari lahir generasi baru penerus bangsa yang memimpin dengan hati nurani. Saya yakin Indonesia bangkit dengan menciptakan jiwa-jiwa bangsa yang mengerti arti kehidupan.

2. Widodo, 31, Magelang, *networker*.

Selama ini saya pernah mendapat *training* dari berbagai pembicara/motivator top di Indonesia, semua yang pernah saya dapatkan sifatnya lebih ke soal pekerjaan/karir, tetapi Training BC yang pernah saya ikuti sangat berbeda sekali karena saya disadarkan tentang arti hidup. Saya jadi lebih menghargai hidup yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan BC saya bisa mulai mengontrol kehidupan saya. Yang saya rasakan setelah ikut BC ataupun waktu jadi *crew* adalah, ternyata ada banyak keajaiban di sekitar kita, yang selama ini banyak orang tidak menyadarinya.

3. Burhannudin, 21, Bali, buruh bangunan

Setelah ikut BC, saya menjadi rajin beribadah, lebih percaya diri, lebih bersemangat dan selalu berpikir positif. Pokoknya BC luar biasa.

4. Asrinawati, 30, Banda Aceh, staf LSM

Sebelum ikut BC hidup saya serasa penuh beban, masalah kecil sering dibesar-besarkan. Saya juga sulit mengontrol emosi. Setelah BC, saya benar-benar merasa bahwa hidup itu indah. Saya mampu mengontrol emosi, lebih percaya diri. Hidup ini terasa ringan dan *enjoy*. Hubungan dengan suami dan anak-anak lebih harmonis. *I love my family*. Terima kasih pada Pak Onggy yang mengajarkan saya rendah hati, *forgive & forget*. Mempraktekkannya memang sulit, tetapi setelah berhasil dipraktekkan banyak keajaiban terjadi dalam hidup saya.

6. Terry Dharmawan, 47 tahun, Jakarta, ibu rumah tangga

Saya sudah merokok sejak umur 12 tahun. Setelah ikut BC, saya baru menyadari betapa berharga dan indahnya hidup ini. Saya berjanji pada Tuhan dan diri saya sendiri untuk hidup sehat (bebas rokok), karena masih banyak impian yang harus saya raih bersama keluarga saya. Kini, komunikasi antara saya dengan anak perempuan saya pun jadi lebih baik. Saya berharap makin banyak masyarakat ikut BC, agar bangsa Indonesia hidup lebih baik dan berguna bagi sesama manusia.

6. Sunny, 28, karyawati *finance & accounting*

Bootcamp dahsyat! Selama 3 hari 2 malam saya kurang tidur, namun tetap semangat. Saya melepaskan beban hidup yang tanpa disadari selama ini ada di pundak saya. Tidak lagi berpikiran negatif terhadap segala sesuatu, namun selalu bersikap positif karena hidup itu indah. Hubungan saya dengan kedua kakak, terutama dengan kakak lelaki saya, jauh lebih baik karena saya menyadari bahwa saya 'membunuh' dia dengan perlakuan saya selama ini, padahal saya sangat sayang dan peduli terhadap kakak. Saya menjadi manusia baru dengan semangat baru untuk membuat hidup ini jauh lebih indah dan berarti untuk orang-orang yang saya sayangi.

7.Leo Susantho, 26, Jakarta, karyawan

Setelah ikut BC, banyak sekali yang saya dapat. Saya jadi lebih percaya diri, lebih menghargai dan percaya pada orang lain, berpikiran positif, semangat hidup tinggi, berani mengakui kesalahan pada orang lain. Hidup itu ternyata indah! ■

Timor Leste Masih Bergolak

Ketidakpuasan meluas di negeri bekas provinsi Indonesia ini. Perlawanan tidak hanya dilakukan para tentara yang dipecat, tetapi juga kelompok masyarakat.

Bangkit dari kebisuan di puncak gejolak perlawanan bersenjata para tentara yang dipecat pemerintah, Presiden Xanana Gusmao, pekan lalu, memecat Menteri Pertahanan Roque Rodriguez dan Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato.

Seperti yang diungkap oleh juru bicaranya Agio Pereira, Presiden Xanana membebankan kerusuhan bersenjata yang berkepanjangan beberapa hari terakhir pada pundak kedua menteri tersebut. Mereka dianggap tidak berhasil meredam pemberontakan eks tentara yang merasa sakit hati atas pemecatan mereka, sehingga negara kecil bekas provinsi ke 27 Indonesia itu mendatangkan balabantuan tentara internasional.

Xanana mengambil keputusan untuk memecat kedua menteri tersebut setelah mengadakan konsultasi dengan PM Mari Alkatiri dan sejumlah menteri kabinetnya dalam pertemuan Senin (29/5) di Istana Kepresidenan. "Kebijakan darurat berlaku 30 hari, tetapi dapat diperpanjang jika masih diperlukan," kata Xanana usai sidang kabinet.

Para mantan tentara dan masyarakat yang melakukan perlawanan bersenjata diminta segera menyerahkan senjata-senjata kepada 2.000 tentara asing dari Australia, Selandia Baru, Portugal dan Malaysia yang bertugas mengamankan negeri tersebut. Tentara asing dikerahkan atas permintaan pemerintah Timor Leste. Xanana memberlakukan jam malam sampai pukul 20.00 untuk mengembalikan ketertiban di negeri yang berpenduduk kurang dari sejuta jiwa itu.

Sejauh ini kerusuhan tersebut telah menelan 27 jiwa. Pengumuman jam malam tersebut menyusul pembahasan khusus tentang konflik bersenjata tersebut. Sebelumnya Menlu Ramos Horta mengakui bahwa pemerintah telah gagal untuk mencegah pecahnya aksi ketidakpuasan tersebut. Dia menyalahkan PM Alkatiri atas berlarut-larutnya kerusuhan tersebut. Sebagaimana yang dikutip *Nine Network,* Australia, Horta menilai pemerintah gagal mendekati berbagai kelompok yang bertikai untuk mengakhiri pembangkangan mereka.

Bentrokan kembali terjadi hanya lebih kurang 100 meter dari Istana Kepresidenan Dili (30/5). Letusan sporadis bergema di seluruh kota, kedua kelompok barat dan timur berhadap-hadapan di dekat jalan raya utama yang menghubungkan kota dengan bandar udara. Sekelompok pemuda yang memakai topeng bersenjatakan pedang tradisional Timor Leste, parang dan tongkat besi membakar dan merampas bangunan pemerintah, termasuk kantor menteri kehakiman. Asap hitam tebal terlihat di seluruh kota akibat pembakaran yang dilakukan oleh kedua kelompok yang bertikai.

"Ke mana Australia? Mengapa mereka tidak ada di sini?" kata seorang pria ketika melihat rumahnya di pinggir kota, terbakar.

Pemerintah mengizinkan tentara asing untuk melucuti dan menahan para pelaku kerusuhan. Menteri Kehakiman Domingos Sarmento mengatakan 120 polisi paramiliter Portugal akan membantu tentara asing tersebut. Kedatangan pasukan Portugal tersebut dipercepat setelah melihat situasi terakhir.

Kendati situasi terus memburuk, lebih dari 100 warga Indonesia di Dili yang berprofesi sebagai pedagang belum bersedia dipulangkan. Mereka belum bersedia meninggalkan barang dagangan mereka yang bernilai ratusan juta rupiah.■ AFP-MI-SH

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad

GNB Dukung Nuklir Iran

Sebanyak 114 negara anggota Gerakan Non Blok mendukung hak Iran untuk memiliki teknologi nuklir, dan mengutuk Israel yang menduduki wilayah-wilayah Palestina secara brutal. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada akhir pertemuan dua hari di Malaysia, Ketua GNB saat ini.

GNB menegaskan semua negara berhak "tanpa diskriminasi" memiliki teknologi nuklir untuk penelitian dan sumber energi. Karena itu mereka mengecam setiap serangan terhadap fasilitas-fasilitas nuklir tujuan damai. "Setiap serangan atau ancaman terhadap fasilitas-fasilitas nuklir untuk tujuan damai—baik yang sudah beroperasi maupun dalam tahap pembangunan—merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan lingkungan serta pelanggaran hukum internasional," demikian sebagian isi komunike yang dikeluarkan pada akhir pertemuan para Menteri Luar Negeri GNB. ■ MI-SH

Bandung "Kota Sampah"

Tumpukan sampah di mana-mana. Presiden SBY pun disambut bau sampah. Walikota tak mampu mengatasi?

Ironis kedengarannya. Namun itulah realitanya. Kalau dulu kota Bandung dikenal sebagai *"Parijs van Java"* atau sebagai "*Kota Kembang",* kini julukan itu bertambah lagi. Yakni sebagai *"Kota Sampah".* Pasalnya, seperti diberitakan media massa, kian hari sampah di kota Bandung ini semakin menggunung.

Di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, seperti di Jl. Ambon dan Jl.Puter, selain menimbulkan bau menyengat, tumpukan sampah juga menyita sebagian badan jalan. Demikian pula di TPS Jl.Taman Sari, onggokan sampah terlihat meluber dan nyaris mencapai median jalan. Beberapa warga secara sinis meyebut "Bandung lautan sampah".

Seperti diberitakan *Kompas* (21/5), bau sampah yang menyengat itu dirasakan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ia dan rombongan berangkat lewat jalan darat dari Jakarta menuju Bandung, Sabtu (20/5) lalu. Presiden ke Bandung untuk mengikuti lomba lari 10 K yang diselenggarakan Gema Nusa pimpinan AA Gym. Begitu keluar dari pintu Tol Padalarang, SBY mengaku mulai mencium bau sampah saat di pinggir kota dan mulai berkurang setelah Cihampelas. Masyarakat yang berada di pinggir jalan juga menyambut dengan meneriakkan 'sampah...sampah'.

Kondisi yang memprihatinkan ini menggugah mahasiswa ITB melancarkan kritik. Dengan memakai masker, Jumat (19/5) mereka menggelar peragaan busana dan pemilihan "Miss Sampah 2006' dengan latar belakang TPS sampah di Tamansari.

Seorang warga di Jl.Taman Sari menyatakan, tumpukan sampah mulai terlihat di beberapa tempat sejak dua bulan terakhir ini. Alasannya, sampah itu tidak terangkut karena tidak ada tempat pembuangan akhir (TPA) setelah TPA Cicabe ditutup. Pemerintah Kota Bandung mengaku mengalami kesulitan mencari lahan baru TPA sampah pasca ditutupnya TPA Leuwigajah, April 2005 lalu. TPA itu ditutup menyusul musibah longsornya gunungan sampah yang menyebabkan sejumlah rumah warga tertimbun dan lebih dari seratus orang meninggal dunia.

KOMPAS

Miss Sampah

Banyaknya sampah di kota Bandung juga membuat galau Menristek Kusmayanto Kadiman saat mendampingi Menteri Pendidikan, Budaya dan Sains Belanda, Maria van der Hoven meninjau Observatorium Bosscha di Lembang *(Sinar Harapan, 8/5).*

Menristek yang mantan Rektor ITB dan lama tinggal di Bandung sangat kecewa dengan kondisi kebersihan kota ini. Menurutnya, Walikota Bandung Dada Rosada harus memperhatikan masalah ini secara serius. Kusmayanto juga menganggap tidak ada alasan jika Pemkot Bandung kesulitan mencari teknologi yang tepat untuk mengelola sampah. Karena teknologi itu telah banyak dibuat di berbagai perguruan tinggi.

M.Satori, seorang peneliti soal sampah dalam wawancara dengan *Metro TV* berpendapat langkah pemda Kota Bandung yang hanya mencari lahan tempat pembuangan sampah, bukan merupakan pemecahan yang tuntas. Sebab itu hanya memindahkan masalah. Seharusnya sampah-sampah itu diproses di TPS sebagai bahan baku kompos. Selanjutnya dikirim ke plan-plan kompos yang ada dan mereka siap menerimanya. Dengan demikian sampah itu benar-benar diolah dan dimanfaatkan menjadi bahan kompos yang punya nilai.

Langkah penanganan sampah di Bandung dan juga beberapa kabupaten di Jabar sepertinya tengah dirumuskan oleh pihak-pihak terkait. Terlebih setelah Gubernur Danny memanggil para bupati dan walikota ke Gedung Sate untuk memecahkan masalah yang berkepanjangan ini.

Langkah ini mestinya menjadi agenda prioritas. Terutama setelah presiden 'mengultimatum' dengan mengatakan apakah soal sampah ini harus ditangani presiden.

"Saya sudah bilang kepada Gubernur dan Walikota, tolong diatasi. Yang malu bukan hanya Bandung, kita semua malu. Harus ada manajemen, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat juga," kata presiden seraya memberi waktu tiga hari.

Walikota Bandung mengaku sudah menjajaki beberapa tempat untuk dijadikan TPA sampah. Misalnya di kawasan Pasir Impun, Cipatat dan Nagrek. Namun masyarakat setempat menolak keras. Kini sedang diupayakan mencari lokasi lain, termasuk ke wilayah kabupaten Garut.

Bupati Bandung Obar Subarna mengaku pihaknya telah menyiapkan TPA baru sebagai pengganti TPA Leuwigajah. Namun dia belum bersedia menyebutkan lokasinya. "Nanti kalau dikatakan sekarang, masyarakat belum apa-apa menolak," ujarnya sembari memberi contoh penolakan yang dilakukan masyarakat di Citatah.

Menurutnya, lokasi yang disiapkan itu tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga diharapkan tidak akan ada yang menolak. TPA ini akan mampu menampung sampah dari kota Bandung, Kab Bandung dan Kota Cimahi. TPA ini akan dimanfaatkan untuk jangka waktu 1-2 tahun.

Selain menentukan lokasi TPA sampah yang sesuai, penerapan teknologi pengolahan sampah agaknya juga harus dilakukan. Kalau tidak, sampah akan tetap menggunung di dalam kota. ■ SP

Tambora Mengguncang Jagad

Dalam bahasa Bima, '*Ta Mbora*' artinya; mari menghilang atau ayo lari atau ayo sembunyi. Ditinjau dari sudut terminologi bahasa, boleh jadi nama Doro (Gunung) Tambora muncul setelah terjadinya ledakan dahsyat tanggal 10 April 1815.

Tiga bola api raksasa meluncur ke udara dari muntahan ledakan Gunung Tambora, pukul tujuh malam tanggal 10 April tahun 1815. Raja Sanggar yang memerintah sebuah kerajaan kecil tidak seberapa jauh dari Tambora, melihat dengan jelas kejadian dahsyat bersejarah itu. Sesaat setelah itu, seluruh gunung yang menjulang 4.200 meter dari permukaan laut itu, tampak seperti sebuah benda api yang cair yang menyebar ke semua penjuru.

Sang raja, tak lama kemudian, juga melihat hujan debu bercampur batu mulai turun di Sanggar. Lantas disusul angin puting beliung dahsyat yang merobohkan hampir semua rumah. Kerusakan sangat parah terjadi di wilayah Sanggar. Pohon-pohon besar dan akarnya tercerabut, terlempar ke udara bersama manusia, ternak, rumah, segalanya. Gelombang laut sangat tinggi menyapu bersih semua bangunan yang diterjangnya.

Menurut laporan Raja Sanggar, angin puting beliung berputar-putar lebih dari satu jam sehingga dentuman letusan tak terdengar. Namun setelah badai itu berlalu dentuman sangat dahsyat terjadi silih berganti sampai tanggal 11 April 1815. Fenomena alam yang timbul tidak hanya menciptakan kengerian, tetapi juga keindahan.

Debu dan kerudung sulfur menciptakan efek optikal yang spektakuler. Matahari senja menyinari kerudung sulfur di lapisan stratosfer, sehingga tampak merah sampai matahari terbenam sekalipun. Pada musim panas dan gugur, tahun 1815, langit senja indah juga muncul di Inggris. Ini memberi inspirasi bagi pelukis romantis Inggris, Joseph William Turner.

Kenangan kepada 191 tahun letusan Tambora, fenomena alam dan musim yang terjadi akibat ledakan dahsyat tersebut, ditulis kembali oleh sejumlah media massa, seperti Harian *Kompas*, *Republika* dan Majalah *Tempo*. Begitu juga media dan penulis asing, mereka menampilkan artikel-artikel dan kisah-kisah yang menarik. Sebut saja, misalnya, Bernice de Jong Boers menulis artikel dalam bahasa Inggris; *Mount Tambora in 1815: A Vulcanic Eruption in Indonesia and its Aftermaths*. Menurut Boers, letusan Tambora juga memicu pecahnya epidemik kolera pertama di dunia.

Pernahkah anda membaca artikel tentang tragedi Pompei? Sebuah kota di kaki Gunung Vesuvius yang terkubur bersama warganya, suatu pagi di tahun 79 Masehi. Kebudayaan Pompei terkubur 1.669 tahun sampai diketemukan di dalam penggalian tahun 1748. Semula Vesuvius memberi

hidup dengan kesuburan tanahnya, tetapi juga mengirim malapetaka yang menghancurkan kota itu bersama warga dan budayanya. Warga Pompei sedang menyelenggarakan pesta, tiba-tiba Vesusius meledak.

Jika Pompei terkubur 1669 tahun, pusat kerajaan di Tambora dan kerajaan lainnya yang berdekatan, hanya butuh waktu seabad lebih untuk menemukannya dari timbunan material letusan. Pemukiman tersebut belum lama ini diketemukan oleh sekelompok arkeolog.

Letusan Tambora menyebarkan gas beracun, memusnahkan semua tanaman dan mahluk hidup di sekitarnya. Kampung-kampung binasa, tak kurang dari 100.000 jiwa melayang. Para pakar gunung berapi memperkirakan letusan tersebut, paling tidak, empat kali lebih hebat dibandingkan dengan bencana Krakatau tahun 1883.

Pakar vulkanologi dari Universitas Rhode Island, AS, yang memimpin penggalian di Tambora, memperkirakan 10.000 orang terkubur hidup-hidup di lokasi penggalian sedalam tiga meter atau lebih. Tim Sigurdsson, termasuk tim arkeologi Indonesia, menemukan aneka gerabah, tulang dan berbagai perhiasan logam dari perunggu. Mereka juga menemukan dua kerangka manusia yang terkubur bersama rumah mereka.

"Bagi saya, ini Pompei dari timur. Semua orang, rumah dan budaya mereka seolah terkubur sebagaimana yang terjadi saat itu," kata Sirgudsson.

Dia percaya tak seorang pun selamat dari amukan letusan. Bayangkan, menurut catatan para ahli vulkanologi, letusan itu memuntahkan tidak kurang dari 400 juta ton uap belerang beracun ke angkasa. Tidak hanya pembunuh massal, awan belerang itu juga menyebabkan pendinginan global. Dampaknya sungguh luar biasa.

Para ahli sejarah mencatat, di Eropa setahun kemudian (1816) menjadi tahun tanpa musim panas. Ladang-ladang jagung di Maine, AS, musnah akibat cuaca beku. Di Prancis dan Jerman ratusan hektar ladang anggur dan jagung mati. Kalaupun selamat, panen tahun itu terjadi lebih lambat.

Menurut Sigurdsson, budaya yang berkembang di Sumbawa sebetulnya telah mengusik kepenasaran para intelektual Eropa, terutama dari Inggris dan Belanda, sejak awal 1800-an. Saat itu ilmuwan kedua negara datang ke Sumbawa seiring penjajahan yang dilakukan pemerintahnya. Mereka kaget mendengar bahasa yang digunakan jauh berbeda dengan yang berkembang di Indonesia umumnya.

Beberapa kalangan ilmuwan yakin bunyi bahasa Sumbawa lebih dekat dengan bunyi bahasa yang berkembang di Indochina, terutama dengan bahasa Mon-Khmer. Belum lagi para ilmuwan kedua negara melakukan penelitian, masyarakat di sekitarnya musnah tersapu amarah Tambora. Letusan itu juga ikut memusnahkan bahasa yang berkembang di sana, kata Sigurdsson yang 20 tahun mencermati lokasi yang ditelitinya.

Beberapa penemuan awal menunjukkan bahwa masyarakat yang terkubur memang punya hubungan erat dengan Indo-China, mungkin hanya hubungan dagang. Contohnya, berbagai gerabah dan keramik yang diketemukan di sana memiliki kedekatan dengan barang sejenis di Vietnam.

Arkeolog dari Universitas Nasional Singapura, John Miksic, percaya lokasi yang diketemukan Sigurdsson memang situs kota yang terkubur letusan Tambora. Namun dia tidak percaya, baik orang-orang maupun bahasanya berasal dari Indochina. Miksic menyimpulkan jika ada keramik dari Vietnam, itu bisa saja diperoleh dari pedagang perantara.

Sejarah Kerajaan Bima mencatat bahwa tiga kerajaan kecil di kawasan itu; Tambora, Sanggar dan Pekat, tunduk di bawah Kerajaan Bima yang melebarkan wilayah taklukannya sampai Dompu dan Flores. Karena itu masyarakatnya menggunakan bahasa Bima. Dan sampai sekarang ketiga daerah itu menggunakan bahasa Bima untuk pergaulan sehari-hari. Demikian pula kebudayaan mereka. Sekarang, kawasan Tambora, Pekat dan Sanggar, bisa dijangkau lewat darat, melalui jalan dari kota Bima-Kore-Kilo-Sanggar-Tambora.

Kekalahan Napoleon

Satu hal yang mencengangkan, dikaitkannya peristiwa itu dengan kekalahan Napoleon Bonaparte di Waterloo, 18 Juni 1815. Jika begitu adanya, maka dampak ikutan letusan Tambora sangat luar biasa, mengubah peta politik dunia saat itu. Peta kekuasaan dunia berubah akibat kekalahan Napoleon. Bukan saja di daratan Eropa, tetapi juga perubahan kondisi politik di Nusantara di abad ke 19.

Kenneth Spink, pakar geologi, tampil dengan teori tersebut, tetapi masih perlu diuji kebenarannya. Dalam satu pertemuan ilmiah tentang *Applied Geosciences* di Warwick, Inggris (*The Geographical Magazine*, Juni 1996), Spink mencoba menggambarkan betapa besar dampak letusan Tambora terhadap tatanan iklim dunia saat itu. Materi vulkanik yang terlontar ke udara dari letusan Tambora diyakini mempengaruhi cuaca di seluruh dunia.

Fenomena alam yang abnormal itu, paling dirasakan di Amerika Utara dan Eropa Barat. Awal Juni 1815, hanya berselang 1,5 bulan setelah letusan Tambora, di Eropa Barat terjadi hujan salah musim. Jalan-jalan berlumpur, sulit dilalui oleh mesin-mesin perang, seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Kondisi ini tentu menghadang ambisi Napoleon untuk menginvasi sejumlah negara tetangga di Eropa.

Gerakan bala bantuan militer dengan senjata berat terhambat. Ruang gerak tokoh militer Prancis yang baru saja lolos dari pengasingan di P. Elba, Maret 1815, menjadi terbatas. Sementara itu pasukannya dihantam tentara Sekutu di Waterloo, 18 Juni 1815. Napoleon tertangkap dan menghabiskan sisa hidupnya sampai 1821 di pembuangannya, Saint Helena.

Kemenangan Sekutu di Waterloo, berdampak pada peta penjajahan di Indonesia. Wilayah-wilayah jajahan Belanda, seperti Riau, yang diduduki Inggris dikembalikan ke Belanda. Penguasa Inggris di Indonesia, Thomas Stamford Raffles segera mengumpulkan laporan tentang letusan Tambora.

Deru letusan sejak tanggal 5 April 1815, di Yogyakarta semula disangka tembakan meriam. Keesokan harinya, langit gelap, matahari tertutup awan tebal. Hari-hari berikutnya jatuh hujan debu. Tanggal 10 April 1815, ledakan-ledakan terdengar semakin keras, sampai di Cirebon. Letusan memuncak tanggal 11 April 1815. Siang itu gelap gulita. Bumi bergetar seperti mau oleng. Debu memenuhi angkasa, angin bersiungan. (*Raffles Report of the Eastern Isles, Oxford University Press*-1984). ■ SH- dari berbagai sumber

Semua Tergantung Soeharto

Status hukum mantan Presiden Soeharto yang baru meninggalkan perawatan dari RS Pusat Pertamina, menjadi berita utama baik elektronik maupun cetak. Pro dan kontra tentang sikap pemerintah menuai protes.

Judul di atas merupakan judul utama Majalah *Tempo*, Edisi 15-21 Mei 2006. Mantan penguasa Orde Baru itu baru saja meninggalkan RS Pusat Pertamina Jakarta, karena pendarahan usus. Di tengah kondisinya yang semakin kritis akhir-akhir ini banyak pihak yang kembali mengungkit soal status dan kelanjutan proses hukumnya. Pemerintah sendiri menyatakan akan menghentikan kasus Soeharto. Sikap itu diambil tak lama setelah Soeharto masuk rumah sakit. Banyak kalangan menilai pemerintah mengambil langkah yang salah jika langsung memaafkan Soeharto tanpa proses hukum. Kenapa pemerintah Yudhoyono mengambil sikap semacam itu? Siapa saja orang Cendana yang melobi Istana? Bagaimana seharusnya penyelesaian status hukum Soeharto? Demikian pertanyaan demi pertanyaan yang dimuat oleh majalah *Tempo*.

Tempo, Edisi 22-28 Mei 2006, menulis 'Membongkar 7 Yayasan: Harta Soeharto'. Dalam dua edisi berturut-turut majalah ini menempatkan masalah Soeharto sebagai laporan Utamanya. Meski pemerintah mengendapkan perkara mantan presiden Soeharto, tapi pengusutan harta kekayaan Soeharto masih berlanjut. Jaksa Agung kini siap menelusuri duit di tujuh yayasan milik penguasa Orde Baru itu. Kini yayasan-yayasan tersebut dipegang oleh kroni-kroninya. Demikian majalah *Tempo* menulis laporan utamanya.

Berita yang tak kalah menarik adalah mandeknya upaya pengungkapan kasus suap aliran dana BNI. Tempo menulis, Skandal BNI; Makbul Melindungi Da'i Bachtiar?

Majalah *TRUST*, edisi 29 Mei-4 Juni 2006 menulis laporan utamanya mengenai Peraturan Pemerintah No. 14/2005 tentang Piutang Negara. *TRUST* menulis judul utamanya 'Berkah dan Bahaya Revisi PP Piutang Negara'. Kendati status hukumnya masih diperdebatkan, revisi Peraturan Pemerintan No. 14/2005 diyakini akan mengurangi kredit bermasalah di bank-bank BUMN. Tapi wewenang yang diberikan kepada bankir ini bisa mengundang munculnya KKN. Sebuah kekhawatiran yang memang selalu muncul di kalangan perbankan.

Majalah *SWA*, edisi 31 Mei 2006 menulis kiprah para taipan-taipan muda yang kaya, ambisius dan penuh gaya. Bisakah mereka jadi andalan masa depan? Mereka masih muda, terdidik dan sangat berambisi menjadi raja di ladang-ladang bisnis yang mereka jajaki. Bekal apa lagi yang harus mereka bawa agar mampu menjadi tulang punggung bisnis nasional? Demikian *SWA* menulis dalam sajian utamanya. Berita lain yang ditulis majalah ini adalah binis penerbangan. Menggiurkan dan mematikan. Peta ke depan dan peluangnya.

Majalah *Investor*, edisi 24 Mei – 5 Juni 2006 menulis laporan utamanya, 'Bank terbaik 2006.' Setelah sempat melaju pada tahun 2004, kinerja perbankan kini kembali mengalami *slow down*. Di tengah *trend* penurunan ini, delapan bank masih menunjukkan kinerjanya dengan cukup baik selama tahun 2005, sehingga dinilai layak mendapatkan predikat bank terbaik. Bank terbaik 2006 adalah, Bank Danamon Tbk, Bank Niaga Tbk, Bank Buana Indonesia Tbk, Bank Chinatrust Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, BPD Jawa Tengah, PT BPD Sulawesi Tenggara, dan Bank HSBC. ■ SB

Virus Maut Ancam Penjara

Ribuan narapidana memiliki potensi tinggi tertular virus HIV/AIDS. Angka kematian di beberapa lembaga pemasyarakatan di Jakarta terus meningkat.

Sedikitnya 50 narapidana (Napi) Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta Timur terinveksi vi rus HIV/AIDS. Demikian dilaporkan harian *Kompas*, 20 Mei 2006. Menurut harian tersebut, jumlah Napi penderita AIDS diperkirakan bertambah, karena tidak semua Napi diperiksa darahnya untuk mengetahui mereka teridentifikasi virus HIV/AIDS. Sebagian besar, penderita virus mematikan itu adalah Napi kasus Narkoba dan berkelamin perempuan.

Rutan yang berdiri tahun 1974 itu memiliki 1.421 penghuni. Terdiri 1.091 orang tahanan, 328 Napi dan dua penghuni anak bawahan (AB). Dari jumlah itu, sebanyak 712 orang (50,14 persen) masuk ke Rutan karena kasus Narkoba.

Jumlah tahanan dan Napi kasus Narkoba, menurut Kepala Rutan Slamet Prihantara, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sejak dirinya menjabat sebagai Karutan pada Mei 2004, jumlah tahanan dan Napi kasus Narkoba mencapai 36 persen dari jumlah keseluruhan penghuni.

Kepala Poliklinik LP Pondok Bambu, Jusi Rusjanti Krisnawan, mengatakan dalam pendeteksian apakah tahanan atau Napi teridentifikasi virus HIV/AIDS, pihaknya menggunakan metode *Voluentary Councelling Testing* (VCT). Dengan metode ini, pemeriksaan dilakukan atas inisiatif mereka.

Kecemasan penyebaran virus HIV/AIDS di dalam penjara telah muncul sejak lama. Ribuan narapidana di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jakarta memiliki potensi tinggi tertular virus HIV/AIDS karena sebagian besar dari mereka menggunakan narkotika dan obat berbahaya (Narkoba).

Menurut laporan *Media Indonesia*, pertengahan November tahun lalu, sekitar 60 persen atau 6.180 dari 10.300 orang narapidana di empat penjara di Jakarta dan sekitarnya terkait langsung maupun tak langsung dengan kasus Narkoba, dan 50 persen dari sekitar 6.180 orang Napi itu berisiko terinfeksi HIV, kata seorang pendamping penderita HIV/AIDS.

Menurut Ketua Partisan (Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan penderita HIV/AIDS) Baby Jim Aditya, para narapidana itu tersebar di LP Salemba, Cipinang, Pondok Bambu, dan Cipinang Narkoba.

Ia mengatakan, relatif tingginya jumlah narapidana yang berpotensi terjangkit HIV/AIDS ini sangat mengkhawatirkan terlebih lagi penjara-penjara itu sudah *over capacity* (kelebihan kapasitas).

Kematian

Keberadaan Jakarta sebagai salah satu sentra peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) menimbulkan banyak konsekuensi. Salah satunya adalah peningkatan angka kematian narapidana serta tahanan di Jakarta dan sekitarnya akibat AIDS.

Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Gunadi, fakta itu merupakan konsekuensi dari beberapa fenomena. Salah satu yang penting adalah kecenderungan meningkatnya prevalensi jumlah Napi dan tahanan yang mengidap HIV berdasarkan tes darah yang dilakukan. Ini berdasarkan pengamatannya terhadap tes darah yang dilakukan antara tahun 1997 hingga 2001.

TEMPOINTERAKTIF

Penjara rawan penularan HIV/AIDS

Hasil *surveillance* HIV/AIDS Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL) pada tahun 2002 juga menyimpulkan, ditemukan 24,5 persen Napi dan tahanan pengidap HIV dari total yang diperiksa. Atau, satu dari 10 Napi/tahanan yang diperiksa terinfeksi HIV. Dalam *surveillance* ini, diperiksa para Napi/tahanan asal Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Rutan Pondok Bambu, dan LP Kelas I Cipinang.

"Celakanya, ketika masalah terkait penyebaran HIV ini makin serius, kami masih menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan LP. Salah satunya adalah problem kelebihan kapasitas Napi, yang sudah mencapai sekitar 200 persen untuk se-wilayah DKI Jakarta," ujar Gunadi seperti dikutip *Kompas*.

Napi dan tahanan yang terinfeksi HIV dan masih menjalani masa hukumannya tentu akan menjadi pemicu penularan HIV di dalam LP dan Rutan. Hal ini karena diakui atau tidak, hingga kini masih terjadi peredaran gelap dan penggunaan Narkoba di dalam LP dan Rutan, termasuk penggunaan Narkoba dengan cara menyuntik, yang sering dilakukan tanpa memakai jarum suntik steril, sehingga berpotensi menularkan HIV.

Dalam menangani HIV/AIDS di dalam LP dan Rutan ini, salah satu kendala utama adalah soal dana. Dari informasi yang dihimpun Kompas, uang pengobatan seorang Napi dan tahanan per tahunnya tak lebih dari Rp 2.500. Dana sekecil itu tentu tak mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang muncul. Apalagi, jika yang bersangkutan telah mengidap HIV. ■ RH

Persembahan Kaum Hawa

Tulisan mereka mampu memberikan pencerahan bagi pembaca dan merupakan karya sastra yang baik.

WWW.INFOARTIS.COM

DEWI LESTARI: Salah seorang penerus sastra perempuan.

Datanglah ke toko buku, dan pergilah ke bagian novel lokal. Maka akan terbaca sederet nama pengarang perempuan yang tertera di sampul novel-novel itu. Pengarang pria memang ada. Tetapi entah kenapa, novelis perempuan tampaknya lebih banyak.

Nama-nama penulis perempuan seperti Ayu Utami, Fira Basuki, Djenar Maesa Ayu, Nova Riyanti Yusuf, Dee (Dewi Lestari), Clara Ng dan sederet nama-nama baru disebutkan sebagai penulis-penulis perempuan generasi masa kini yang saat ini karya-karyanya tengah digandrungi pembaca muda.

Namun, nama pengarang senior seperti NH Dini dan Ratna Indraswari Ibrahim pun masih tetap punya nama. Karya-karya mereka masih dicetak ulang dan karya-karya barunya selalu dinanti pembaca. Tentu saja, gaya penulisan mereka berbeda dengan para yuniornya.

Harian *Kompas* mencermati fenomena ini dan menulisnya pada edisi 15 April 2006 di rubrik Pustakaloka dengan judul "Perempuan Penulis Tak Lekang Dimakan Usia".

Ditulis harian ini, novel *Pertemuan Dua Hati* karya NH Dini yang diterbitkan 1986 hingga kini sudah memasuki cetak ulang ke-13. Novelnya yang sangat feminis, *Pada Sebuah Kapal*, sudah dicetak ulang ke-8. Sedangkan *Dari Fontenay ke Magallianes,* adalah novel terbarunya yang diluncurkan tahun lalu.

Dini mengaku masih tetap menulis hingga sekarang. Di usianya yang 70 tahun, ia masih kemana-mana membawa buku catatan untuk mencatat ide-ide yang muncul mendadak.

Mantan isteri seorang diplomat Perancis kelahiran Semarang, 29 Februari 1936 ini mendisiplinkan diri untuk menulis dengan komputernya minimal dua kali seminggu. Ia juga membantu mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Waktu luangnya dihabiskan dengan berkebun di halaman rumahnya yang berada dalam kompleks Graha Wredha Mulya, Yogyakarta. Ia juga mengurus Pondok Baca yang didirikannya di dalam kompleks khusus lansia itu.

Sementara Ratna Indraswari yang tinggal di Malang membarengi proses kreatifnya dengan berdiskusi dan menggagas berbagai kegiatan di rumahnya yang sering dijadikan pangkalan para mahasiswa, seniman dan wartawan.

Sastra Perempuan

Roman *Buiten Het Gariel* karya Soewarsih Djojopoespito, 1940, menandai periode pertama kebangkitan perempuan penulis. Seperti ditulis *Kompas* dalam laporannya berjudul *"Sastra Perempuan Tempo Dulu",* karya ini sebenarnya muncul tahun 1930 dalam bahasa Sunda, tetapi ditolak Balai Pustaka karena temanya terlalu maju. Tahun 1975, penerbit Djambatan menerbitkannya dalam bahasa Indonesia dengan judul Manusia Bebas.

Tahun 1933, muncul roman *Kalau Tak Untung* karya Selasih yang juga diperhitungkan di jagat sastra. Menyusul Fatimah Hasan Delais dengan karyanya *Kehilangan Mestika*, 1935.

NH Dini memulai debut kepengarangannya periode 1970-an. Pemilik nama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nurkatin menjadi penulis perempuan yang paling produktif ketika itu.

Di masa Orde Baru, dimana kepentingan politik penguasa amat dominan, muncul nama-nama penulis perempuan yang produktif dengan karya-karya yang selalu dicetak ulang. Sederet nama-nama itu antara lain Mira W, V. Lestari, Marga T, La Rose, Titie Said, Lastri Fardani Sukarton, Ike Supomo, Maria A. Sarjono, Nina Pane, Tuti Nonka, Sari Narulita dan Marianne Katopo.

Di masa represif itu, setiap lembar depan novel akan dijumpai tulisan: *Tokoh dan cerita dalam novel ini hanya rekaan semata, adanya kesamaan hanya merupakan kebetulan belaka.*

Kalau di masa sebelumnya, penulis perempuan biasanya tumbuh dari kalangan jurnalis dan pendidik, di masa selanjutnya, para penulis perempuan tumbuh dari kalangan komunitas sastra, penerbitan, media massa maupun bidang-bidang lain.

Nama-nama seperti Dorothea Rosa Herliany, Ratna Indraswari, Helvy Tiana Rosa, Abidah El Halieqy atau Oka Rusmini muncul pada periode sebelum munculnya periode Ayu Utami dkk. Kebanyakan karya-karya mereka berupa cerpen dan puisi.

Banyak kalangan menilai, para penulis perempuan dalam periode ini lebih punya karakter dan konsisten dalam berkarya dibanding generasi sesudahnya. Karya-karya mereka mampu memberikan pencerahan bagi pembaca dan merupakan karya sastra yang baik, mengutip komentar ahli sastra Indonesia, A Teeuw. ■ RH

Musim Salak Telah Berlalu

Kebun buah di Condet sudah berubah menjadi hutan beton. Fungsinya sebagai cagar budaya Betawi sudah tidak berlaku.

FOTO-FOTO WILSON EDWARD

Nama salak condet mulai jarang terdengar. Dulu, buah itu tak kalah pamor-nya dari jenis salak yang berasal dari daerah lain, seperti salak bali atau salak pondoh.

Nama salak condet berasal dari kawasan penghasilnya. Sebelum tahun 1980-an, kawasan Condet, Jakarta Timur, sangat terkenal sebagai penghasil buah-buahan, diantaranya salak itu. Hampir semua penduduk Condet hidup dari hasil kebun. Selain salak, buah unggulan mereka adalah duku dan rambutan.

Sayangnya, seperti ditulis *Koran Tempo*, 9 April 2006, dalam rubrik Reportasenya, saat ini kebun buah di Condet sudah berubah menjadi hutan beton. Padahal, sebelumnya Pemprov DKI menetapkan kawasan ini sebagai cagar budaya.

Condet dipertahankan sebagai kawasan penghasil buah-buahan khas Jakarta, terutama duku dan salak. Selain itu, di kawasan itu masih terdapat rumah-rumah asli Betawi. Lahan untuk bangunan tidak boleh lebih dari 20 persen. Sisanya dijadikan kebun buah-buahan.

Belakangan ini, persoalan yang status Condet mencuat. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya Betawi, kawasan ini dianggap tidak berkembang oleh penduduknya. Warga Condet meminta status cagar budaya dicabut.

Saat ini, Condet memang tak lagi relevan sebagai cagar budaya. Jumlah tanah kosong menyusut. Kebun buah berganti menjadi bangunan-bangunan rumah sewaan, yang pemasukan tiap bulannya lumayan. Panen raya buah-buahan sudah berlalu di daerah ini.

Belum lagi banyaknya pendatang yang tinggal di Condet, menjadikan daerah ini semakin padat. Lokasinya memang strategis, dekat tol Pasarebo dan terminal Kampung Rambutan.

Menurut penduduk, pemerintah DKI jarang mengucurkan bantuan sejak kawasan itu dijadikan cagar budaya.

Sejak menjadi kawasan cagar budaya, harga tanah di Condet memang lebih murah dibanding harga tanah di daerah sekitarnya. Selain itu, warga tak bebas membangun atau menjual lahan pekarangannya.

Masalah status cagar budaya itu sendiri juga tidak konsisten. Beberapa kali aturannya diganti. Anehnya, menurut Kepala Subdinas Pengkajian dan Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta Candrian Attahiyyat, masyarakat sudah salah kaprah menafsirkan Condet sebagai cagar budaya.

Gubernur DKI menetapkan Condet sebagai Kampung Betawi pada 30 April 1974. Setahun kemudian, Pemda menetapkan Condet sebagai daerah penghasil buah-buahan. Tahun 1985, Gubernur DKI Soeprapto menginstruksikan penyusunan konsep pelaksanaan daerah Condet sebagai daerah buah-buahan. Setahun kemudian, berubah lagi. Gubernur DKI menetapkan Condet sebagai daerah *status quo.* Anehnya, instruksi ini dicabut lagi pada tahun yang sama.

Saat ini, status cagar budaya telah dialihkan ke Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Menurut Candrian, artinya Condet tidak lagi menyandang status cagar budaya. Pemanfaatan lahan Condet yang telah melebihi 20 persen kini harus mengikuti peraturan tata kota yang ada.

Kawasan ini telah berubah menjadi kawasan wisata dan dikunjungi wisatawan yang jumlahnya terus meningkat. Menurut catatan Dinas Pariwisata DKI, tahun 2005 jumlah wisatawan mencapai 90.000 orang. Namun, jumlah wisatawan mancanegara hanya sekitar 250 orang per tahun.

Setu Babakan sendiri ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1999.

Untuk mendanai cagar budaya ini, Pemprov DKI mengucurkan Rp 5 miliar. Dana itu dipikul bersama oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Perumahan Rakyat. Tahap awal, pemerintah DKI memugar 67 rumah adat Betawi.

Kawasan Setu Babakan cukup luas. Luas semula hanya 64 hektar, tetapi pemerintah DKI berencana menambah luas sampai 289 hektar. ■ RH

Maklumat Keindonesiaan

Kita bersama-sama di sini untuk menegaskan kembali Indonesia tempat kita berdiri. Indonesia sebagai sebuah warisan yang berharga, tapi juga sebuah cita-cita. Indonesia yang bukan hanya amanat para pendahulu, tapi juga titipan berjuta anak yang akan lahir kelak.

Kita bersama-sama di sini, untuk menyadari kembali bahwa Indonesia adalah satu prestasi sejarah namun juga proyek yang tak mudah. Dalam banyak hal, tanah air ini belum rampung. Tapi sebuah masyarakat sebuah negeri memang proses yang tak akan kunjung usai, seperti dikutip Bung Karno, bagi sebuah bangsa yang berjuang tak ada akhir perjalanan.

Dalam perjalanan itu, kita pernah mengalami rasa bangga tapi juga trauma, tersentuh semangat yang berkobar, tapi juga jiwa yang terpuruk.

Namun, baik atau buruk keadaan, kita bagian dari tanah air dan tanah air ini bagian dari hidup kita:

"Di sanalah kita berdiri, jadi pandu ibuku...."

Di sanalah kita berdiri: di awal abad ke-21, di sebuah zaman yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah mengharuskan kita menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Abad yang penuh harapan, tapi juga korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut. Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketidakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi. Tapi tak lepas dari konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang berbeda.

Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.

Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.

Sejarah mencatat, Indonesia selalu mampu untuk demikian sebab Indonesia sendiri, 17 ribu pulau yang berjajar dari barat sampai ke timur, adalah sumber kreatif yang tumbuh dalam kebinekaan.

Para ibu dan bapak pendiri Republik dengan arif menyadari hal itu. Itulah sebabnya Pancasila digali, dilahirkan, dan disepakati di hari ini, 61 tahun yang lalu.

Tidak, Pancasila bukanlah wahyu dari langit. Ia lahir dari jerih payah dalam sejarah. Ia tumbuh dari benturan kepentingan, sumbang-menyumbang gagasan, saling mendengar dalam bersaing dan berembuk. Dengan demikian ia mengakui perbedaan manusia dan ketidaksempurnaannya. Ia tak menganggap diri doktrin yang mahabenar.

Tapi justru itulah sebabnya kita menegakkannya. Sebab, kita telah belajar untuk tidak jadi manusia yang menganggap diri mahabenar.

Maka Indonesia tak menganggap Pancasila sebagai agama-sebagaimana Indonesia tidak pernah dan tidak hendak mendasarkan dirinya pada satu agama apapun. Nilai luhur agama-agama mengilhami kita, namun justru karena itu kita mengakui keterbatasan manusia. Dalam keterbatasan itu, tak ada manusia yang bisa memaksa, berhak memonopoli kebenaran, patut menguasai percakapan.

Maka hari ini kita tegaskan kembali Indonesia sebagai cita-cita bersama, cita-cita yang belum selesai. Maka hari ini kita berseru, agar bangun jiwa Indonesia, bangun badannya, dalam berbeda dan bersatu.

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT INI DIPERSEMBAHKAN OLEH BERITAINDONESIA